

---

# LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

---

TRIWULAN III

# 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN  
Triwulan III-2019

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya laporan triwulan profil industri perbankan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini memuat berbagai informasi tentang kinerja, profil risiko, kebijakan pengembangan dan hasil pengawasan perbankan selama triwulan III-2019. Selanjutnya disajikan pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi dan inklusi keuangan. Laporan ini juga memuat informasi mengenai koordinasi OJK dengan lembaga lain terkait stabilitas sistem keuangan serta koordinasi terkait implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Terkait dengan penerapan APU dan PPT, OJK ikut berperan dalam *Mutual Evaluation Review* (MER) yang merupakan penilaian kepatuhan rezim APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Melambatnya perekonomian global dan ketidakpastian perang dagang AS dan Tiongkok berdampak pada perlambatan perekonomian domestik di triwulan III-2019. Perlambatan tersebut turut dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi, investasi dan ekspor domestik yang belum pulih. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi domestik masih mencapai 5,02% utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan lembaga non profit rumah tangga (LNPRT). Dari sisi perbankan, fungsi intermediasi berjalan dengan baik seiring dengan *funding gap* yang menipis, serta ketahanan perbankan masih terjaga ditopang permodalan yang berada pada level tinggi. Profil risiko perbankan juga masih terjaga sejalan dengan risiko kredit yang *manageable*, risiko pasar yang terjaga, serta risiko likuiditas yang membaik. Untuk mempertahankan kondisi ketahanan perbankan yang baik, OJK senantiasa memitigasi risiko yang mungkin timbul karena faktor global dan memfokuskan upaya agar kegiatan intermediasi perbankan berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Januari 2020



**Heru Kristiyana**  
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>1</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>3</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>7</b>
<b>Daftar Grafik.....</b>	<b>8</b>
<b>Daftar Box .....</b>	<b>10</b>
<b>Ringkasan Eksekutif.....</b>	<b>11</b>
<b>Infografis .....</b>	<b>13</b>
<b>Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional .....</b>	<b>17</b>
A. Overview Perekonomian Global dan Domestik.....	17
B. Overview Kinerja Perbankan.....	21
1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK).....	21
1.1 Aset BUK.....	21
1.2 Sumber Dana BUK.....	22
1.3 Penggunaan Dana BUK.....	24
1.4 Rentabilitas BUK.....	25
1.5 Permodalan BUK.....	26
2. Kinerja Bank Syariah .....	28
2.1 Aset Bank Syariah.....	28
2.2 Sumber Dana Bank Syariah.....	29
2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah .....	29
2.4 Rentabilitas BUS.....	30
2.5 Permodalan BUS.....	30
3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR).....	31
3.1 Aset BPR.....	31
3.2 Sumber Dana BPR.....	32
3.3 Penggunaan Dana BPR.....	33
3.4 Rentabilitas BPR.....	34
3.5 Permodalan BPR.....	34
4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	35
4.1 Aset BPRS.....	35
4.2 Sumber Dana BPRS.....	35
4.3 Penggunaan Dana BPRS .....	36
4.4 Rentabilitas BPRS.....	37
4.5 Permodalan BPRS.....	37
5. Pekembangan Penyaluran Kredit Sektoral .....	38
6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM .....	40
7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING).....	42
<b>Bab II Profil Risiko Perbankan.....</b>	<b>49</b>
1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	49
2. Risiko Kredit.....	49
2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	50
2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi .....	51

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial) .....	53
3. Risiko Pasar.....	54
3.1 Risiko Nilai Tukar.....	55
3.2 Risiko Suku Bunga .....	55
4. Risiko Likuiditas.....	56
5. Tata Kelola Perbankan.....	58
<b>Bab III Pengaturan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional.....</b>	<b>61</b>
1. Pengaturan Perbankan .....	61
1.1 BPR.....	61
1.2 Perbankan Syariah.....	61
2. Pengembangan Pengawasan Perbankan .....	61
2.1 Bank Umum.....	61
2.2 BPR.....	62
2.3 Perbankan Syariah.....	62
<b>Bab IV Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan .....</b>	<b>65</b>
1. Penegakan Kepatuhan Perbankan .....	65
1.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank).....	65
1.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi.....	66
1.3 Penguatan Penerapan Program APU dan PPT.....	66
2. Kelembagaan Perbankan.....	69
2.1 Bank Umum.....	69
2.2 Bank Syariah.....	71
2.3 BPR.....	73
<b>Bab V Koordinasi Antar Lembaga.....</b>	<b>77</b>
1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan .....	77
1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).....	77
1.2 Bank Indonesia (BI).....	79
1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	80
2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT .....	80
<b>Bab VI Asesmen Lembaga Internasional.....</b>	<b>85</b>
<i>Mutual Evaluation Review (MER)</i> .....	85
<b>Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan .....</b>	<b>89</b>
A. Perlindungan Konsumen.....	89
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen .....	89
1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan.....	91
i. Layanan Pertanyaan.....	91
ii. Layanan Penerimaan Informasi.....	92
iii. Layanan Pengaduan .....	92
2. Asistensi Layanan Konsumen OJK.....	93
3. <i>Forum Group Discussion (FGD)</i> Penegakan Kepatuhan PUJK dalam Pemberian Informasi dan/atau Dokumen terkait Pengaduan Konsumen .....	93
4. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen.....	93
5. Pemeriksaan <i>Market Conduct</i> .....	94

6. Pemantauan Iklan Triwulanan.....	95
B. Literasi dan Inklusi Keuangan.....	95
1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)....	95
2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).....	96
3. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA).....	96
4. Bulan Inklusi Keuangan .....	96
<b>Lampiran.....</b>	<b>101</b>
Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko.....	101
Lampiran II. Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan II-2019.....	103
Lampiran III. <i>Glossary</i> .....	108

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Umum BUK.....	21
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK.....	22
Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan .....	22
Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan .....	23
Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar.....	24
Tabel 6 Penggunaan Dana BUK.....	24
Tabel 7 Rentabilitas dan CAR Perbankan .....	26
Tabel 8 Komponen Permodalan BUK.....	27
Tabel 9 Indikator Umum Bank Syariah .....	28
Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan .....	29
Tabel 11 Indikator Umum BPR .....	31
Tabel 12 Penyebaran DPK BPR .....	32
Tabel 13 Kredit BPR berdasarkan Sektor Ekonomi.....	33
Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran .....	34
Tabel 15 Indikator Umum BPRS .....	35
Tabel 16 Pembiayaan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi .....	36
Tabel 17 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi.....	38
Tabel 18 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM .....	41
Tabel 19 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank .....	42
Tabel 20 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING .....	42
Tabel 21 Perkembangan ATMR .....	49
Tabel 22 Perkembangan Kualitas Kredit .....	50
Tabel 23 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan .....	51
Tabel 24 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan .....	51
Tabel 25 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank .....	51
Tabel 26 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi.....	54
Tabel 27 Perkembangan LCR Perbankan .....	57
Tabel 28 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan.....	65
Tabel 29 DTTOT pada Triwulan III-2019.....	68
Tabel 30 Jaringan Kantor BUK.....	70
Tabel 31 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK.....	71
Tabel 32 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah.....	72
Tabel 33 FPT Calon Pengurus dan DPS Perbankan Syariah.....	73
Tabel 34 Jaringan Kantor BPR.....	73
Tabel 35 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR.....	74
Tabel 36 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS.....	74
Tabel 37 Total Layanan Per Sektor .....	90
Tabel 38 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan .....	91
Tabel 39 Realisasi Laku Pandai Triwulan III-2019.....	96

## Daftar Grafik

Grafik 1	Perkembangan Harga Komoditas .....	18
Grafik 2	Pertumbuhan Ekonomi Q3-2019 Beberapa Negara .....	18
Grafik 3	Pertumbuhan PDB Indonesia.....	19
Grafik 4	Pertumbuhan Ekspor Indonesia.....	20
Grafik 5	Pertumbuhan Impor Indonesia.....	20
Grafik 6	Neraca Perdagangan Indonesia.....	20
Grafik 7	Komposisi Sumber Dana Perbankan.....	22
Grafik 8	Tren Pertumbuhan Komposisi DPK.....	22
Grafik 9	Tren Pangsa Komposisi DPK.....	23
Grafik 10	Kredit Valuta Asing.....	25
Grafik 11	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan .....	25
Grafik 12	Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah.....	28
Grafik 13	Pertumbuhan DPK Bank Syariah .....	29
Grafik 14	Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur.....	30
Grafik 15	Laba dan ROA BUS.....	30
Grafik 16	Perkembangan Aset BPR.....	32
Grafik 17	Perkembangan DPK BPR.....	32
Grafik 18	Tren Aset BPRS.....	35
Grafik 19	Tren Pertumbuhan DPK BPRS.....	36
Grafik 20	Tren ROA dan BOPO BPRS .....	37
Grafik 21	Pertumbuhan Kredit Porsi Tertinggi berdasarkan Sektor Ekonomi (yoY) .....	39
Grafik 22	Pertumbuhan Kredit yang Meningkat berdasarkan Sektor Ekonomi (yoY) .....	39
Grafik 23	Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah.....	41
Grafik 24	Penyebaran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING) .....	50
Grafik 25	Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit.....	50
Grafik 26	Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net .....	50
Grafik 27	Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi .....	52
Grafik 28	Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi.....	52
Grafik 29	Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi .....	53
Grafik 30	Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial).....	54
Grafik 31	Tren CDS dan NDF Indonesia .....	54
Grafik 32	Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBNIndonesia.....	55
Grafik 33	PDN dan Pergerakan Nilai Tukar .....	55
Grafik 34	Jumlah Bank terhadap Range PDN .....	55
Grafik 35	Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga.....	56
Grafik 36	Perkembangan Parameter IRRBB .....	56
Grafik 37	LDR berdasarkan Valuta .....	57
Grafik 38	<i>Funding Gap</i> Kredit dan DPK .....	57
Grafik 39	AL/NCD dan AL/DPK .....	57
Grafik 40	Perkembangan Suku Bunga PUAB .....	58
Grafik 41	Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris .....	58
Grafik 42	Penyebaran Jaringan Kantor BUK.....	69

Grafik 43	Penyebaran Jaringan Kantor BUS.....	72
Grafik 44	Penyebaran Jaringan Kantor BPR.....	74
Grafik 45	Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan.....	90
Grafik 46	Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan .....	92
Grafik 47	Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan .....	92

## **Daftar Box**

Box 1 Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan IV-2019.....	47
Box 2 Penerbitan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.....	68

## Ringkasan Eksekutif

Ketidakpastian perang dagang AS dan Tiongkok yang masih berlanjut berdampak pada melambatnya perdagangan dan produksi manufaktur yang berujung pada perlambatan ekonomi secara global, termasuk Indonesia. Pada triwulan III-2019, perekonomian domestik tumbuh melambat yaitu 5,02% (yoY) dibandingkan triwulan sebelumnya (5,05%, yoY). Perlambatan dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi dan investasi serta kinerja ekspor yang belum pulih. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi domestik masih cukup baik tumbuh di atas 5% ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR).

Dari sisi perbankan, perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik berpengaruh pada melambatnya kredit yang tumbuh 7,89% (yoY) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,69% (yoY). Sementara itu, kondisi likuiditas tersedia memadai karena didukung pertumbuhan DPK sebesar 7,47% (yoY), meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 6,60% (yoY). Seiring dengan upaya Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menjaga kestabilan sistem keuangan domestik, persepsi terhadap prospek ekonomi domestik membaik. Hal ini tercermin dari meningkatnya *capital inflow*, khususnya ke pasar SBN. Secara keseluruhan, profil risiko perbankan masih tetap terjaga.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan di tengah ketidakpastian ekonomi global, OJK berupaya meningkatkan mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Pada periode laporan, OJK menerbitkan tiga ketentuan perbankan terkait penguatan kelembagaan BPR dan BPRS, pelaporan BPR serta penilaian tingkat kesehatan BPRS. Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga diperkuat baik dari sisi penabung antara lain melalui program Laku Pandai, Simpanan Pelajar (SimPel), dan Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA), maupun dari sisi peminjam antara lain melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring). Selain itu, koordinasi dengan lembaga terkait juga ditingkatkan antara lain dalam menjaga stabilitas sistem keuangan baik secara bilateral maupun melalui wadah KSSK serta dalam memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di sektor jasa Keuangan dengan lembaga penegak hukum maupun PPATK.

Halaman ini sengaja dikosongkan

# INFO GRAFIS

September  
2019

## OVERVIEW MAKROEKONOMI



### Ekonomi Global

IMF kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 menjadi sebesar 3% (WEO Oktober 2019) seiring perang dagang AS-Tiongkok yang masih berlanjut dan penurunan PMI Manufaktur.

- ✓ Ekonomi AS melambat dipengaruhi penurunan ekspor dan perlambatan investasi dan konsumsi.
- ✓ Ekonomi Eropa dan Jepang melambat dipengaruhi tertiannya eksport dan penurunan produksi (PMI zona kontraksi).
- ✓ Ekonomi Tiongkok melambat dipengaruhi perlambatan investasi dan konsumsi serta penurunan eksport.

### Risiko

- Perang dagang masih berlanjut
- Penurunan harga komoditas dunia
- Faktor geopolitik global



### Ekonomi Domestik

Ekonomi domestik tumbuh 5,02% (yoY), melambat dari 5,05% (yoY) pada triwulan sebelumnya dipengaruhi perlambatan konsumsi, investasi dan eksport yang masih belum pulih.

- ✓ Konsumsi masih cukup baik didorong konsumsi rumah tangga yang moderat dan konsumsi LNPT yang tumbuh cukup tinggi.
- ✓ Investasi melambat didorong perlambatan investasi nonbangunan.
- ✓ Ekspor membaik meskipun masih lemah, sementara impor turun.
- ✓ Neraca perdagangan masih defisit.

### Risiko

- Fluktuasi nilai tukar
- Perlambatan ekonomi global
- Penurunan harga komoditas eksport Indonesia
- Current Account Deficit (CAD)

## KINERJA BANK UMUM



*Intermediasi berjalan baik disertai pertumbuhan DPK yang mulai meningkat dan funding gap yang menipis*

## PROFIL RISIKO



### ATMR (yoY)

Periode	ATMR Kredit	ATMR Operasional	ATMR Pasar
Sep '18	7,85%	9,91%	13,97%
Jun '19	4,59%	6,81%	-17,40%
Sep '19	9,35%	6,92%	47,67%

*Profil risiko perbankan masih terjaga*

### AL/NCD



### PDN



### NPL



## PERMODALAN DAN RENTABILITAS BANK UMUM

### CAR



### ROA



### NIM



### BOPD



*Rentabilitas perbankan masih cukup baik seiring dengan stabilitas ROA sehingga mendukung permodalan (CAR) pada level tinggi*

Halaman ini sengaja dikosongkan

# Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

# Bab I

## Kinerja Industri Perbankan Nasional

**Perang dagang AS dan Tiongkok yang masih berlanjut berdampak pada melambatnya perekonomian global dan domestik. Meski demikian, perekonomian domestik tetap tumbuh baik ditopang oleh konsumsi. Ketahanan permodalan perbankan juga masih solid disertai fungsi intermediasi dan kinerja keuangan perbankan yang terjaga.**

### A. Overview Perekonomian Global dan Domestik

Seiring dengan berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, perekonomian global pada akhir 2019 diprediksi tumbuh melambat sebagaimana revisi ke bawah proyeksi pertumbuhan global oleh beberapa lembaga internasional. Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) IMF Oktober 2019, pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 diproyeksi tumbuh 3%, turun dari proyeksi WEO Juli 2019 sebesar 3,2%. Penurunan tersebut dipengaruhi output industri yang turun sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan produksi manufaktur, melemahnya *business confidence index*, dan menurunnya permintaan global akibat tindakan proteksionisme beberapa negara untuk melindungi pasar dalam negeri. Investasi global juga menunjukkan pelemahan sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan impor barang *intermediate*<sup>1</sup> dan barang modal.

Rilis kedua data pertumbuhan tahunan ekonomi AS pada triwulan III-2019 diprediksi tumbuh 2,1% (yo), melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan

sebelumnya sebesar 2,3% (yo). Perlambatan dipengaruhi oleh menurunnya ekspor serta melambatnya investasi dan konsumsi rumah tangga. Perlambatan ekspor dan investasi AS dipengaruhi oleh perang dagang dengan Tiongkok yang berdampak pada perlambatan aktivitas produksi sebagaimana tercermin dari PMI *Manufacturing* AS yang masih berada di zona kontraksi sebesar 47,8. Konsumsi domestik juga melambat seiring dengan menurunnya Indeks Keyakinan Konsumen yang menurun dalam tiga bulan terakhir selama periode laporan.

Ekonomi kawasan Eropa pada triwulan III-2019 tumbuh stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 1,2% (yo). Namun demikian, pertumbuhan tersebut relatif melambat dibandingkan dengan pertumbuhan awal tahun 2018 yang berada di atas 2%. Melemahnya perekonomian Eropa dipengaruhi oleh penurunan produksi manufaktur yang diindikasikan oleh PMI Manufaktur Eropa yang berada di zona kontraksi (45,7) serta melambatnya perdagangan eksternal sebagai imbas dari perang dagang yang semakin meluas. Selain itu, risiko

<sup>1</sup> Barang setengah jadi yang akan diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.

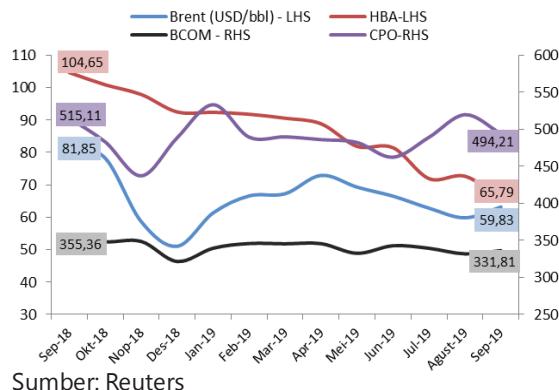
geopolitik terkait Brexit juga menjadi faktor pendorong rendahnya pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa. Perekonomian Jepang pada triwulan III-2019 juga mencatatkan perlambatan dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 2% (yoY) menjadi 1,8% (yoY). Pertumbuhan pada periode laporan masih ditopang oleh peningkatan konsumsi –akibat konsumsi awal (*front-loading purchase*) sebelum diberlakukannya kebijakan fiskal kenaikan pajak penjualan pada Oktober 2019-, serta meningkatnya investasi non-manufaktur. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Jepang tertahan oleh kegiatan manufaktur Jepang yang masih terkontraksi (PMI=48,9) disertai kontraksi ekspor yang masih berlanjut.

Seiring dengan ketidakpastian akan solusi perang dagang, ekonomi Tiongkok pada triwulan III-2019 tumbuh 6,0% (yoY) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,2% (yoY) dan dibawah predksi pasar sebesar 6,1%. Perlambatan dipengaruhi oleh melambatnya investasi, menurunnya ekspor, serta tertahannya konsumsi. Perang dagang dengan AS juga berdampak pada penurunan kinerja *trade-related industry* di Tiongkok yang juga tercermin pada PMI Manufaktur yang masih berada di zona kontraksi (49,8).

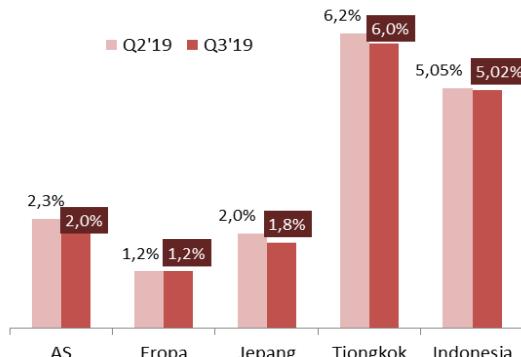
Permintaan global yang masih lemah akibat perlambatan pertumbuhan, baik di negara *Advance Economies* (AE) maupun *Emerging Market Economies* (EM), serta efek disruptif perang dagang antara AS dan Tiongkok membuat volume perdagangan dunia ikut turun dan berdampak pada turunnya harga

komoditas. Penurunan harga komoditas tercermin pada turunnya indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) dari tahun sebelumnya 355,36% menjadi 331,81%. Harga minyak dunia masih lebih rendah dari tahun sebelumnya meskipun mulai meningkat sejak awal tahun. Hal ini dikarenakan masih rendahnya *demand* meskipun *supply* minyak sudah diturunkan dengan keputusan OPEC+ untuk memperpanjang *oil cuts* sebesar 1,2 mbpd selama 9 bulan (hingga triwulan I-2020). Harga CPO juga masih turun dibandingkan tahun lalu dipengaruhi oleh kelebihan pasokan dibandingkan permintaan. Turunnya permintaan CPO dipengaruhi oleh antara lain (i) implementasi larangan impor CPO untuk biofuel di Eropa secara bertahap sejak Mei 2019, (ii) peningkatan produksi *rapeseed* – substitusi CPO di India, dan (iii) penurunan harga *soybean*-substitusi CPO.

**Grafik 1 Perkembangan Harga Komoditas**

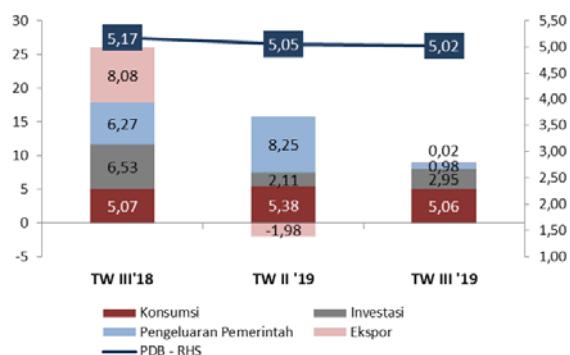


**Grafik 2 Pertumbuhan Ekonomi Q3-2019 Beberapa Negara**



Perlambatan ekonomi dunia juga turut berpengaruh pada melambatnya perekonomian domestik. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% (yoY) pada triwulan III-2019, melambat dibandingkan 5,05% (yoY) pada triwulan sebelumnya maupun 5,17% (yoY) pada triwulan III-2018. Perlambatan utamanya didorong oleh melambatnya konsumsi dan investasi serta ekspor yang masih tertekan.

**Grafik 3 Pertumbuhan PDB Indonesia**



Sumber: BPS

Konsumsi masih menjadi sumber pertumbuhan PDB meskipun pada triwulan III-2019 melambat hanya tumbuh 5,06% (yoY) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,38% (yoY). Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga tumbuh tertinggi 7,44% (yoY) diikuti pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,01% (yoY). Tetapi tingginya pertumbuhan konsumsi didorong oleh konsumsi masyarakat berpendapatan rendah yang masih cukup baik sebagaimana tercermin dari naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Selain itu, kebijakan stimulus fiskal pemerintah melalui penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) turut menopang konsumsi rumah tangga

khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 4,21% (yoY), melambat dari triwulan sebelumnya (5,01%, yoY). Perlambatan dipengaruhi oleh melambatnya investasinya nonbangunan yang terindikasi dari penurunan penjualan alat angkut dan alat berat untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan. Sementara itu, investasi bangunan tumbuh cukup baik didorong oleh pembangunan proyek strategis nasional yang terus berlanjut, seperti infrastruktur dan pembangunan kawasan ekonomi di berbagai wilayah, serta meningkatnya pembangunan proyek properti oleh swasta sebagaimana tercermin dari meningkatnya penjualan semen.

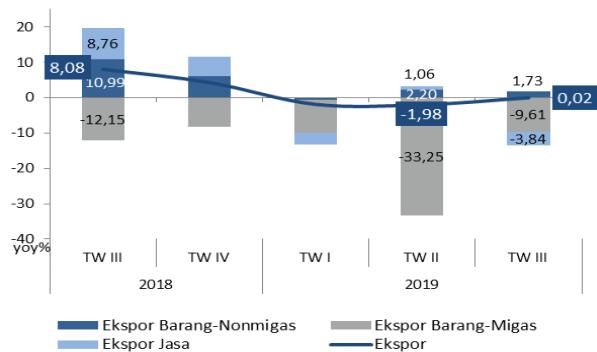
Di samping itu, kinerja ekspor mulai membaik meskipun belum cukup kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Ekspor pada triwulan III-2019 tumbuh 0,02% (yoY), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 1,98% (yoY). Membaiknya kinerja ekspor didorong oleh meningkatnya ekspor nonmigas sebagai dampak positif dari negara tujuan ekspor yang lebih terdiversifikasi untuk menahan dampak negatif dari perang dagang yang masih berlanjut. Peningkatan ekspor nonmigas antara lain didukung oleh meningkatnya ekspor barang tambang dan galian, ekspor emas seiring persetujuan tambahan kuota ekspor, dan ekspor bijih mineral yang didorong oleh *frontloading* ekspor nikel ke Tiongkok. Selain itu,

kontraksi ekspor migas yang berkurang juga turut mendorong perbaikan ekspor.

Di lain sisi, impor menurun terutama impor nonmigas baik pada barang modal, barang baku, maupun barang konsumsi. Penurunan impor bahan baku dan barang modal dipengaruhi oleh melambatnya industri pengolahan terkait ekspor dan menurunnya permintaan alat angkut dalam mendukung kinerja industri pertambangan seiring dengan penurunan permintaan dan harga komoditas dunia. Sementara penurunan impor barang konsumsi sejalan dengan melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Selain itu, impor migas juga turun antara lain dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait program Biodiesel 20 (B20), serta kebijakan terkait kewajiban penjualan minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam negeri.

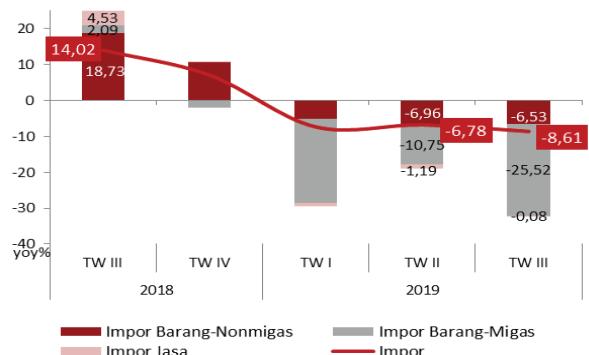
Meskipun kinerja ekspor mulai membaik, namun selama triwulan III-2019 neraca perdagangan masih mencatatkan defisit sebesar USD112 juta, menurun dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar USD2,29 miliar.

**Grafik 4 Pertumbuhan Ekspor Indonesia**



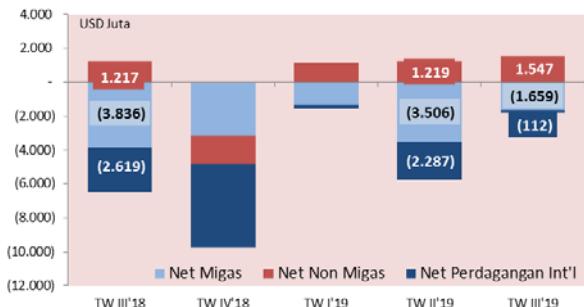
Sumber: BPS

**Grafik 5 Pertumbuhan Impor Indonesia**



Sumber: BPS

**Grafik 6 Neraca Pedagangan Indonesia**



Sumber: BPS

## B. Kinerja Perbankan

### Overview Kinerja Bank Umum

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik, kredit tumbuh 7,89% (yoY) dan DPK tumbuh 7,47% (yoY) dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut berdampak pada funding gap yang semakin menipis sehingga likuiditas perbankan tersedia memadai. Secara umum, ketahanan bank umum dalam menyerap risiko masih cukup solid dengan tingkat permodalan (CAR) tercatat sebesar 23,19%, didukung dengan risiko kredit yang stabil tercermin dari NPL Gross dan NPL Net yang berada jauh di bawah threshold 5%.

#### 1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Kinerja BUK cukup baik dengan kredit yang tumbuh 7,81% (yoY), disertai pertumbuhan DPK yang mulai membaik dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,52% (yoY). Hal tersebut membuat funding gap semakin menipis sehingga berdampak pada likuiditas yang cukup memadai dalam

mengantisipasi penarikan nasabah. Ketahanan BUK juga masih solid dengan tingkat permodalan yang terus meningkat. Namun demikian, perlu diperhatikan potensi meningkatnya risiko kredit BUK yang ditunjukkan oleh tren peningkatan NPL gross sejak awal tahun.

**Tabel 1 Indikator Umum BUK**

Indikator	Nominal		qtq		yoY	
	Sep '18	Jun '19	Sep '19	Jun '19	Sep '19	Sep '18
<b>Total Aset (Rp Miliar)</b>	7.462.753	7.920.038	7.993.250	1,38%	0,92%	8,56%
<b>Kredit (Rp Miliar)</b>	4.921.564	5.255.085	5.306.141	3,34%	0,97%	12,95%
<b>DPK (Rp Miliar)</b>	5.231.010	5.532.926	5.624.575	2,27%	1,66%	6,53%
- Giro (Rp Miliar)	1.283.502	1.367.355	1.393.013	6,69%	1,88%	9,56%
- Tabungan (Rp Miliar)	1.643.352	1.736.841	1.744.253	4,43%	0,43%	9,03%
- Deposito (Rp Miliar)	2.304.155	2.428.731	2.487.308	-1,49%	2,41%	3,24%
<b>CAR (%)</b>	22,91	22,63	23,28	(79)	65	(34)
<b>ROA (%)</b>	2,50	2,51	2,48	(10)	(3)	3
<b>NIM (%)</b>	5,14	4,90	4,90	4	(0)	(20)
<b>BOPO (%)</b>	79,13	80,24	80,50	(269)	26	42
<b>NPL Gross (%)</b>	2,61	2,47	2,63	(1)	16	(26)
<b>NPL Net (%)</b>	1,17	1,14	1,15	3	0	(6)
<b>LDR (%)</b>	94,08	94,98	94,34	98	(64)	535
						25

Sumber: SPI September 2019

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoY rasio dalam *basis point* (bps)

#### 1.1 Aset BUK

Aset BUK tumbuh sebesar 7,11% (yoY) melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,56% (yoY). Perlambatan seiring

dengan melambatnya pertumbuhan kredit sebagai porsi aset terbesar.

Berdasarkan kelompok bank, perlambatan aset utamanya terjadi pada kelompok

BUMN dan BUSN Devisa yang merupakan kelompok bank dengan porsi aset besar. Di sisi lain, BPD dan BUSN Non Devisa justru mencatatkan peningkatan pertumbuhan, meskipun dalam porsi yang cukup kecil yaitu 9,54% dari total aset perbankan.

Aset perbankan masih dikuasai oleh bank-bank besar sebagaimana ditunjukkan oleh *Concentration Ratio* (CR) aset 4 bank yang mencapai 49,70% sedangkan asset 20 bank

besar menguasai 80,46% dari total aset perbankan (Tabel 2).

**Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK**

Tahun	Aset	
	CR4 %	CR20 %
2015	46,24	79,47
2016	48,18	80,14
2017	48,81	79,87
2018	49,65	79,93
Mar '19	48,88	80,83
Jun '19	49,54	80,78
<b>Sep '19</b>	<b>49,70</b>	<b>80,46</b>

Sumber: OJK

**Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan**

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	Δ qtq		Δ yoy	
	Sep '18	Jun '19	Sep '19		Jun '19	Sep '19	Sep '18	Sep '19
BUMN	3.130.413	3.380.283	3.413.715	42,71%	2,28%	0,99%	12,12%	9,05%
BUSN Devisa	3.201.931	3.345.150	3.359.953	42,03%	0,76%	0,44%	6,24%	4,94%
BUSN Non Devisa	62.418	73.344	75.117	0,94%	7,70%	2,42%	15,56%	20,35%
BPD	619.901	667.400	687.060	8,60%	4,47%	2,95%	1,19%	10,83%
KCBA	448.090	453.861	457.404	5,72%	-5,57%	0,78%	11,52%	2,08%
<b>Total</b>	<b>7.462.753</b>	<b>7.920.038</b>	<b>7.993.250</b>	<b>100%</b>	<b>1,38%</b>	<b>0,92%</b>	<b>8,56%</b>	<b>7,11%</b>

Sumber: SPI September 2019

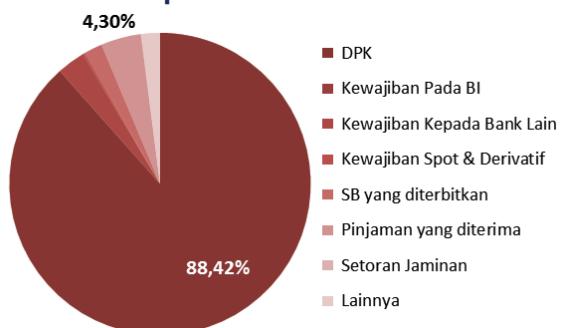
## 1.2 Sumber Dana BUK

DPK merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 88,42% dari dana perbankan. Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 7,52% (yoY) meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,53% (yoY). Pertumbuhan DPK didorong oleh pertumbuhan deposito yang tumbuh 7,95% (yoY), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,24% (yoY). Sementara itu, pertumbuhan giro dan tabungan masih tercatat melambat masing-masing tumbuh 8,53% (yoY) dan 6,14% (yoY).

Berdasarkan mata uang, peningkatan utamanya terjadi pada DPK Rupiah yang tumbuh 8,47% (yoY) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,85% (yoY). Peningkatan DPK Rupiah ini utamanya akibat meningkatnya pertumbuhan

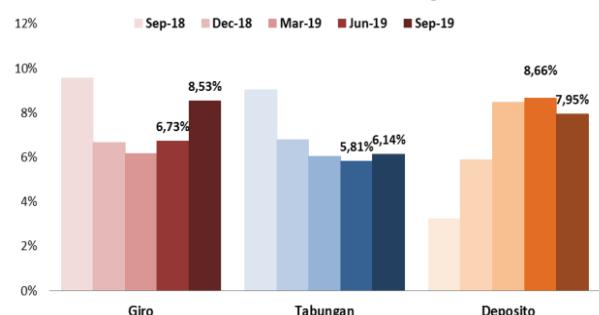
deposito rupiah yang tumbuh 8,35% (yoY) (September 2018 sebesar 2,52% (yoY)).

**Grafik 7 Komposisi Sumber Dana Perbankan**

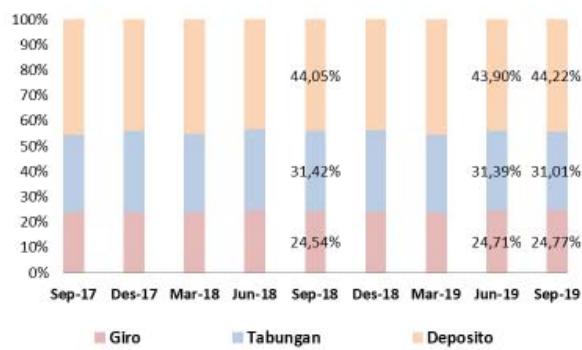


Sumber: SPI September 2019

**Grafik 8 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK**



Sumber: SPI September 2019

**Grafik 9 Tren Pangsa Komposisi DPK**

Sumber: SPI September 2019

Berdasarkan *tiering*, pertumbuhan DPK utamanya ditopang oleh pertumbuhan deposito nominal >Rp2M (31,46% dari total DPK BUK) yang tumbuh 11,47% (yoY), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,63% (yoY). Sementara itu, perlambatan tabungan dipengaruhi oleh melambatnya tabungan nominal <Rp2M yang juga memiliki porsi cukup besar (25,45% dari total BUK) tumbuh sebesar 6,50% (yoY) dibanding tahun sebelumnya mencapai sebesar 10,37% (yoY). Perlambatan giro juga umumnya terjadi pada giro nominal >Rp2M yang juga

memiliki porsi cukup besar (21,09% dari total BUK) tumbuh sebesar 9,41% (yoY) melambat dari tahun sebelumnya sebesar 10,20% (yoY).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok BUMN sebesar 43,95%, diikuti BUSN Devisa sebesar 42,08%. Pertumbuhan DPK kelompok BUMN melambat, sementara pertumbuhan DPK tertinggi terdapat pada kelompok BPD seiring dengan adanya *dropping* dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan pembayaran kepada mitra kerja Pemerintah Pusat.

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan porsi 77,33%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (50,00%) diikuti Jawa Timur (9,94%) dan Jawa Barat (8,07%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

**Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan**

Kelompok Bank	Nominal (Rp Miliar)			Porsi (%)	qtq		yoY	
	Sep '18	Jun '19	Sep '19		Jun '19	Sep '19	Sep '18	Sep '19
BUMN	2.277.069	2.416.474	2.472.065	43,95	1,93%	2,30%	11,86%	8,56%
BUSD	2.242.002	2.357.442	2.366.665	42,08	1,68%	0,39%	2,97%	5,56%
BUSND	46.014	53.913	55.596	0,99	8,01%	3,12%	17,35%	20,83%
BPD	485.073	530.690	549.899	9,78	6,84%	3,62%	-2,10%	13,36%
KCBA	180.853	174.407	180.350	3,21	-0,01%	3,41%	10,98%	-0,28%
<b>Total</b>	<b>5.231.010</b>	<b>5.532.926</b>	<b>5.624.575</b>	<b>100</b>	<b>2,27%</b>	<b>1,66%</b>	<b>6,53%</b>	<b>7,52%</b>

Sumber: SPI September 2019

**Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar**

Wilayah	DPK (Rp Miliar)			% Pangsa terhadap total DPK
	Sep '18	Jun '19	Sep '19	
DKI Jakarta	2.627.923	2.876.667	2.812.074	50,00%
Jawa Timur	514.576	562.370	558.868	9,94%
Jawa Barat	424.271	488.916	454.045	8,07%
Jawa Tengah	271.092	305.824	296.879	5,28%
Sumatera Utara	219.879	231.261	227.895	4,05%
<b>Total DPK 5 Provinsi</b>	<b>4.057.741</b>	<b>4.465.038</b>	<b>4.349.760</b>	<b>77,33%</b>
<b>Total DPK</b>	<b>5.231.010</b>	<b>5.532.926</b>	<b>5.624.575</b>	

Sumber: SPI September 2019, diolah

### 1.3 Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar (68,15%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (12,58%) dan penempatan pada Bank Indonesia (8,50%). Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan DPK, bank juga meningkatkan penempatan dana pada surat berharga untuk menambah keuntungan sejalan dengan peningkatan nilai wajar surat berharga yang juga

dipengaruhi oleh perbaikan sentimen investor terhadap kondisi keuangan domestik yang ditunjukkan oleh peningkatan rating Indonesia oleh S&P. Penempatan bank pada surat berharga tercatat tumbuh 3,16% (yoY) jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 0,01% (yoY). Penempatan dana pada Bank Indonesia juga tumbuh meningkat 8,69% (yoY) setelah sebelumnya terkontraksi -3,62% (yoY).

**Tabel 6 Penggunaan Dana Bank**

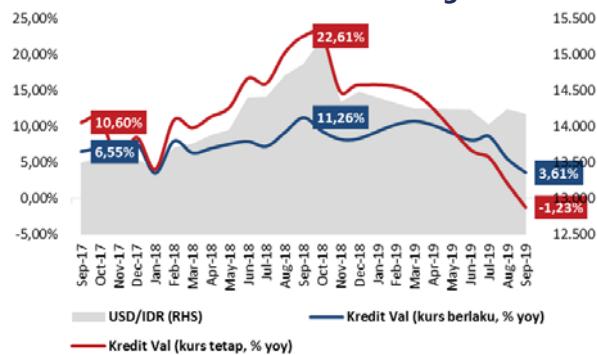
Penggunaan Dana	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoY (%)	
	Sep '18	Jun '19	Sep '19		Jun '19	Sep '19	Sep '18	Sep '19
Kredit Yang Diberikan	4.976.020	5.315.600	5.362.236	68,87	3,34	0,88	13,25	7,76
- Kepada Pihak Ketiga	4.921.564	5.255.085	5.306.141	68,15	3,34	0,97	12,95	7,81
- Kepada Bank Lain	54.456	60.514	56.094	0,72	3,15	<b>-7,30</b>	49,98	3,01
Penempatan pada Bank Lain	258.458	271.051	258.246	3,32	<b>-0,59</b>	<b>-4,72</b>	4,00	<b>-0,08</b>
Penempatan pada Bank Indonesia	608.786	627.762	661.666	8,50	<b>-3,53</b>	5,40	<b>-3,62</b>	8,69
Surat Berharga	949.700	923.707	979.721	12,58	24,57	6,06	0,01	3,16
Penyertaan	41.524	44.378	48.749	0,63	1,21	9,85	14,02	17,40
CKPN Aset Keuangan	161.685	162.657	173.925	2,23	1,41	6,93	2,23	7,57
Tagihan Spot dan Derivatif	23.038	20.929	16.135	0,21	20,56	<b>-22,91</b>	126,23	<b>-29,96</b>
Tagihan Lainnya	254.933	332.467	285.490	3,67	13	<b>-14</b>	<b>-11,42</b>	11,99
<b>TOTAL</b>	<b>7.274.143</b>	<b>7.698.551</b>	<b>7.786.168</b>	<b>100</b>	<b>5,10</b>	<b>1,14</b>	<b>8,31</b>	<b>7,04</b>

Sumber: SPI September 2019

Berdasarkan denominasi mata uang, kredit kepada pihak ketiga bukan bank lebih banyak dalam bentuk rupiah dengan porsi 85,18%, sedangkan kredit valas sebesar 14,82%. Kredit rupiah tumbuh 9,56% (yoY)

meningkat dari tahun sebelumnya 11,25% (yoY), sedangkan kredit valas terkontraksi 1,23% (yoY), jauh melambat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 22,61% (yoY). Di sisi lain, jika menggunakan perhitungan kurs

berlaku, kreditvalas masih tercatat tumbuh sebesar 3,61% (yoY) meskipun tetap melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,26% (yoY). Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan kredit valas tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah permintaan kredit namun juga dipengaruhi oleh nilai tukar (Grafik 10).

**Grafik 10 Kredit Valuta Asing**

Sumber: SPI September 2019

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (72,90%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 46,92% dan kredit investasi (KI) sebesar 25,98%, sedangkan sisanya sebesar 27,10% adalah kredit konsumsi (KK).

Kredit produktif masih tumbuh walaupun melambat menjadi sebesar 8,32% (yoY) setelah tahun sebelumnya tumbuh 13,53% (yoY). Perlambatan didorong oleh melambatnya Kredit Modal Kerja (KMK) sebagai kredit dengan porsi terbesar yang tumbuh 5,86% (yoY) dibandingkan 14,22% (yoY) pada tahun sebelumnya. Perlambatan kredit produktif ini mengindikasikan pelaku usaha yang cenderung menahan ekspansi usaha di tengah ketidakpastian perekonomian global. Selain itu, perlambatan juga dipengaruhi oleh melambatnya KK yang tumbuh 6,49% (yoY) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,43% (yoY).

**Grafik 11 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan**

Sumber: SPI September 2019

#### 1.4 Rentabilitas BUK

Pada September 2019, rentabilitas BUK masih terjaga meskipun ROA perbankan sedikit menurun menjadi 2,48% dari 2,50% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh laba yang tumbuh melambat sebesar 6,99% (yoY) dari 10,05% (yoY), utamanya akibat peningkatan beban bunga kepada pihak ketiga bukan bank.

Secara umum, semua kelompok BUKU mengalami penurunan ROA, sedangkan berdasarkan kelompok kepemilikan hanya BUSN Devisa dan KCBA yang masih menunjukkan peningkatan ROA menjadi masing-masing 2,09% dan 3,52%.

Sementara itu, BOPO perbankan tercatat meningkat menjadi 80,50% dari 79,13% pada tahun sebelumnya. Peningkatan BOPO terutama disebabkan oleh meningkatnya beban operasional selain bunga dari kerugian transaksi *spot* dan *derivative* selain juga disebabkan meningkatnya beban bunga DPK. Peningkatan BOPO terjadi pada semua kelompok BUKU, sementara berdasarkan kepemilikan hanya BUSN Devisa dan KCBA yang mengalami penurunan BOPO.

Selain itu, kenaikan suku bunga deposito mendorong pertumbuhan beban bunga DPK yang berdampak kepada menurunnya pendapatan bunga bersih yang dikarenakan

peningkatan *cost of fund*. Hal tersebut berdampak kepada penurunan NIM perbankan menjadi 4,90% dari 5,14% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

**Tabel 7 Rentabilitas dan CAR Perbankan**

Rasio	BUMN		BUSN Devisa		BUSN Non Devisa	
	Sep '18	Sep '19	Sep '18	Sep '19	Sep '18	Sep '19
ROA	3,01%	2,82%	2,05%	2,09%	1,62%	1,22%
NIM	5,75%	5,28%	4,53%	4,41%	5,93%	5,53%
BOPO	71,94%	76,98%	82,84%	81,59%	86,00%	90,19%
CAR	20,80%	21,10%	21,41%	21,99%	25,85%	27,70%
Rasio	BPD		KCBA		Industri	
	Sep '18	Sep '19	Sep '18	Sep '19	Sep '18	Sep '19
ROA	2,48%	2,15%	2,44%	3,52%	2,50%	2,48%
NIM	6,27%	5,93%	3,66%	4,20%	5,14%	4,90%
BOPO	76,79%	79,36%	90,43%	88,34%	79,13%	80,50%
CAR	20,64%	20,32%	47,91%	49,71%	22,91%	23,28%
Rasio	BUKU 1		BUKU 2			
	Sep '18	Sep '19	Sep '18	Sep '19		
ROA	1,59%	1,22%	1,58%	1,53%		
NIM	5,57%	5,30%	5,08%	4,78%		
BOPO	86,05%	89,88%	85,81%	86,57%		
CAR	21,23%	24,17%	24,36%	25,34%		
Rasio	BUKU 3		BUKU 4			
	Sep '18	Sep '19	Sep '18	Sep '19		
ROA	1,80%	1,78%	3,14%	3,10%		
NIM	4,21%	3,97%	5,73%	5,48%		
BOPO	87,29%	88,30%	70,92%	73,35%		
CAR	25,70%	24,98%	21,06%	21,97%		

Sumber: SPI September 2019

## 1.5 Permodalan BUK

Secara umum, permodalan BUK masih sangat memadai dengan sebagian besar (80,09%) berupa modal inti. Pada September 2019, modal inti tumbuh 12,54% (yoY), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,69% (yoY). Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya cadangan modal dan tambahan modal disetor sehingga mendorong pertumbuhan modal sebesar 9,26% (yoY).

Sementara itu, ATMR BUK tercatat tumbuh sebesar 8,11% (yoY), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,53% (yoY). Dengan adanya kenaikan

modal tersebut, CAR BUK naik sebesar 62 bps (yoY) menjadi 23,28%.

Berdasarkan kepemilikan bank, CAR tertinggi berada pada KCBA yaitu 49,71%. Tingginya CAR KCBA tersebut antara lain ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari *head office* serta penempatan wajib KCBA dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang diperhitungkan sebagai CEMA dan memiliki bobot risiko cukup rendah dalam perhitungan ATMR. Seiring dengan tingginya CAR KCBA, CAR yang tinggi berdasarkan BUKU tercatat pada BUKU 2 dan BUKU 3, yang didalamnya banyak terdapat bank KCBA.

**Tabel 8 Komponen Permodalan BUK**

No	Komponen Modal (Rp T)	Sep-18	Dec-18	Sep-19	mtm	ytd	oyy	Porsi
<b>1</b>	<b>Modal Inti</b>	<b>959,08</b>	<b>1.003,20</b>	<b>1.079,34</b>	<b>1,28%</b>	<b>7,59%</b>	<b>12,54%</b>	<b>80,09%</b>
<b>A</b>	Modal Inti Utama	955,73	1.003,83	1.079,06	1,17%	7,49%	12,90%	80,07%
	Modal disetor	176,02	179,25	181,13	0,57%	1,05%	2,91%	13,44%
	Cadangan Tambahan Modal	852,89	900,71	974,98	1,48%	8,24%	14,31%	72,34%
	Laba	613,85	648,33	685,96	1,85%	5,80%	11,75%	50,90%
	Laba/Rugi Tahun Lalu	511,89	509,74	580,17	0,00%	13,82%	13,34%	43,05%
	Laba/Rugi Tahun Berjalan	101,96	138,59	105,80	13,35%	-23,66%	3,76%	7,85%
	Dana Setoran Modal	4,15	5,43	3,06	-30,76%	-43,71%	-26,29%	0,23%
	Cadangan Lainnya	234,89	246,96	285,96	1,09%	15,79%	21,74%	21,22%
	Faktor Pengurang	73,18	76,13	77,05	3,69%	1,21%	5,29%	5,72%
<b>B</b>	Modal Inti Tambahan	3,35	(0,63)	0,28	-131,89%	-144,25%	-91,63%	0,02%
<b>2</b>	<b>Modal Pelengkap</b>	<b>93,56</b>	<b>90,96</b>	<b>88,78</b>	<b>-4,33%</b>	<b>-2,40%</b>	<b>-5,11%</b>	<b>6,59%</b>
	Surat berharga subordinasi	27,36	26,77	25,60	4,35%	-4,37%	-6,43%	1,90%
	Pinjaman Subordinasi	17,88	19,14	19,37	1,27%	1,24%	8,37%	1,44%
	PPA atas aset produktif	49,54	51,57	53,52	2,35%	3,78%	8,04%	3,97%
	Lainnya	(1,22)	(6,52)	(9,71)	207,98%	49,01%	699,32%	-0,72%
<b>3</b>	<b>CEMA</b>	<b>181</b>	<b>175</b>	<b>180</b>	<b>0,17%</b>	<b>2,36%</b>	<b>-0,68%</b>	<b>13,33%</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL MODAL</b>	<b>1.233</b>	<b>1.270</b>	<b>1.348</b>	<b>0,74%</b>	<b>6,15%</b>	<b>9,26%</b>	<b>100%</b>
<b>5</b>	<b>ATMR</b>	<b>5.354</b>	<b>5.527</b>	<b>5.788</b>	<b>2,06%</b>	<b>4,73%</b>	<b>8,11%</b>	
	ATMR Kredit	4.455	4.692	4.872	0,00%	3,82%	9,35%	
	ATMR Operasional	772	772	825	0,00%	6,92%	6,92%	
	ATMR Pasar	65	68	95	0,00%	41,11%	47,67%	
Rasio	CAR	22,91%	22,97%	23,28%	(31)	31	37	
	Rasio Modal Inti	21,19%	21,29%	21,70%	(25)	41	51	

Sumber: LBU

## 2. Kinerja Bank Syariah

Kinerja bank syariah (BUS dan UUS) pada triwulan III-2019 secara umum masih terjaga, tercermin rasio CAR BUS yang masih cukup untuk menyerap risiko dengan didukung peningkatan rentabilitas sejalan

dengan perbaikan efisiensi dan perbaikan kualitas pembiayaan (penurunan NPF) bank syariah. Likuiditas bank syariah juga masih memadai dengan FDR berada dalam *threshold* aman.

**Tabel 9 Indikator Umum Bank Syariah**

Indikator	Nominal			qtq		yoY	
	Sep '18	Jun '19	Sep '19	Jun '19	Sep '19	Sep '18	Sep '19
<b>BUS dan UUS (Rp miliar)</b>							
Total Aset	456.922	486.892	490.415	1,47%	0,72%	15,65%	7,33%
Pembiayaan	310.519	333.080	343.864	1,86%	3,24%	14,34%	10,74%
Dana Pihak Ketiga	355.446	386.624	389.802	1,02%	0,82%	11,57%	9,67%
- Giro Wadiah	44.258	52.918	46.058	9,26%	-12,96%	15,84%	4,07%
- Tabungan Mudharabah	105.811	118.718	122.570	4,45%	3,24%	16,96%	15,84%
- Deposito Mudharabah	205.377	214.988	221.174	-2,56%	2,88%	8,15%	7,69%
<b>BUS (%)</b>							
CAR	21,25	19,56	20,39	(30)	83	509	(86)
ROA	1,41	1,61	1,66	15	5	41	25
NOM	1,59	1,82	1,84	16	2	49	25
BOPO	88,08	85,72	85,14	(210)	(59)	(360)	(295)
NPF gross	3,82	3,36	3,32	(9)	(4)	(59)	(50)
FDR	78,95	79,74	81,56	136	182	(117)	262

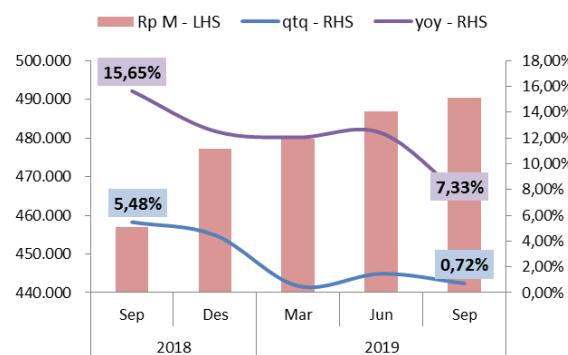
Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), September 2019

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoY rasio dalam *basis point* (bps)

### 2.1 Aset Bank Syariah

Aset bank syariah tumbuh sebesar 7,33% (yoY), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 15,65% (yoY) sejalan dengan perlambatan DPK dan modal. Komponen utama aset adalah pembiayaan (66,02%), surat berharga (14,34%) dan penempatan pada Bank Indonesia (10,36%). Pertumbuhan ketiga komponen utama aset tersebut tercatat melambat dibandingkan periode sebelumnya dengan perlambatan utama terjadi pada penempatan pada Bank Indonesia yang terkontraksi -6,33% (yoY).

**Grafik 12 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah**



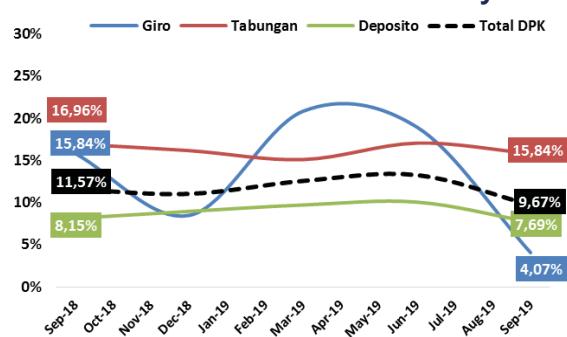
Sumber: SPS September 2019

## 2.2 Sumber Dana Bank Syariah

Pada September 2019, DPK bank syariah tumbuh 9,67% (yo), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,57% (yo). Perlambatan terjadi pada semua komponen DPK baik giro, tabungan dan deposito yang masing-masing tumbuh 4,07% (yo), 15,84% (yo) dan 7,69% (yo) setelah tahun sebelumnya tumbuh masing-masing 15,84% (yo), 16,96% (yo) dan 8,15% (yo).

Berdasarkan komposisinya, DPK bank syariah sebagian besar merupakan dana investasi non profit sharing sebesar 85,36%, utamanya disalurkan pada deposito rupiah tenor 1 bulan.

**Grafik 13 Pertumbuhan DPK Bank Syariah**



Sumber: SPS September 2019

## 2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah

Dana bank syariah lebih banyak digunakan untuk tujuan pembiayaan. Pada September 2019, pembiayaan bank syariah tumbuh 10,74% (yo), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 14,34% (yo). Perlambatan pembiayaan tersebut disebabkan oleh melambatnya meningkatnya pertumbuhan pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumsi yang memiliki porsi total 75,49% dari total pembiayaan bank syariah.

Berdasarkan jenis penggunaannya, pembiayaan BUS masih didominasi untuk tujuan pembiayaan produktif (55,79%), sedangkan untuk tujuan konsumsi sebesar 44,21%. Pembiayaan produktif tumbuh 8,91% (yo), melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 10,97% (yo). Perlambatan tersebut disebabkan oleh pembiayaan modal kerja yang cukup dalam dari 8,50% (yo) menjadi 3,96% (yo). Pembiayaan konsumsi juga tercatat melambat dari 19,08% (yo) menjadi 13,13% (yo).

Berdasarkan jenis akad, piutang dan pembiayaan bagi hasil masih merupakan komponen terbesar, masing-masing menyumbang 49,87% dan 47,04% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah.

**Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan**

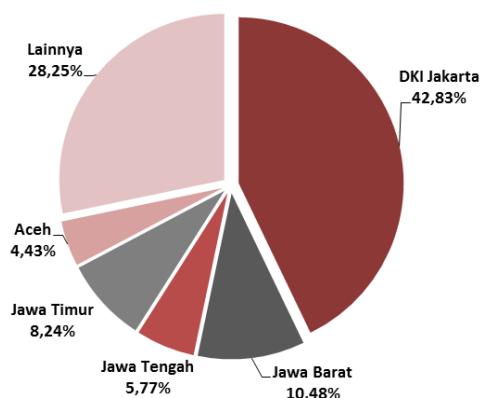
JENIS PENGGUNAAN	Nilai (Rp Miliar)			Porsi (%)	qtq (%)		yo (%)	
	Sep '18	Jun '19	Sep '19		Jun '19	Sep '19	Sep '18	Sep '19
Modal Kerja	103.479	105.453	107.572	31,28	-1,01	2,01	8,50	3,96
Investasi	72.668	81.165	84.271	24,51	4,12	3,83	14,69	15,97
Konsumsi	134.372	146.462	152.021	44,21	2,77	3,80	19,08	13,13
<b>Total</b>	<b>310.519</b>	<b>333.080</b>	<b>343.864</b>	<b>100</b>	<b>1,86</b>	<b>3,24</b>	<b>14,34</b>	<b>10,74</b>

Sumber: SPS, September 2019

Di tengah melambatnya pertumbuhan pemberian pembiayaan, rasio NPF gross BUS tercatat membaik yaitu sebesar 3,32%, lebih rendah dari 3,82% pada tahun sebelumnya. Secara umum, perbaikan risiko pembiayaan terjadi hampir pada semua sektor ekonomi dan didorong oleh perbaikan yang cukup besar pada beberapa sektor, diantaranya sektor *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan, serta transportasi, pergudangan dan komunikasi serta industri pengolahan.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 71,50%, khususnya DKI Jakarta (42,83%), Jawa Barat (10,48%), Jawa Timur (8,24%), dan Jawa Tengah (5,77%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya pembiayaan yang terpusat di wilayah Jawa didukung pula dengan sebaran jaringan kantor BUS dan UUS yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa.

**Grafik 14 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur**

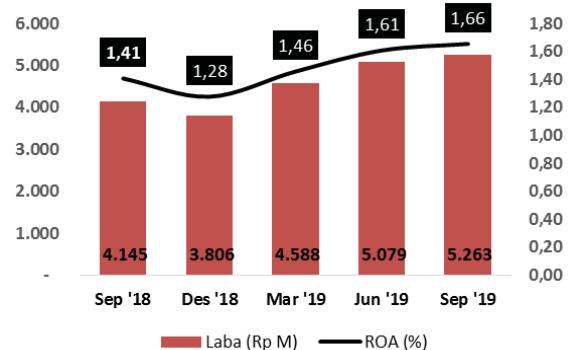


Sumber: SPS September 2019

## 2.4 Rentabilitas BUS

Rentabilitas BUS meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu tercermin dari kenaikan ROA menjadi 1,66% dari 1,41% pada tahun sebelumnya, sejalan dengan laba yang masih tumbuh sebesar 26,97% (yoY). Peningkatan laba BUS utamanya disebabkan perbaikan NOM BUS yang meningkat menjadi 1,84% dari 1,59% pada tahun sebelumnya serta perbaikan efisiensi dengan BOPO turun menjadi 85,14% dari 88,08% pada tahun sebelumnya. Turunnya rasio BOPO utamanya didorong oleh turunnya beban operasional dari berkurangnya kerugian penurunan nilai aset keuangan dan lainnya. Selain itu, pendapatan operasional juga tumbuh meningkat didorong oleh pembiayaan yang diberikan yang tumbuh 8,23% (yoY) dibanding tahun sebelumnya 3,66% (yoY).

**Grafik 15 Laba dan ROA BUS**



Sumber: SPS September 2019

## 2.5 Permodalan BUS

Pada September 2019, sebagian besar modal BUS merupakan modal inti (91,56%), dan tercatat tumbuh 8,42% (yoY). Secara umum, modal BUS tumbuh 3,27% (yoY), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 37,66% (yoY) akibat melambatnya modal disetor pada periode laporan.

Dari sisi risiko, ATMR BUS tercatat meningkat sebesar 7,64% (yo) dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 4,71% (yo). Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh ATMR kredit yang tumbuh 6,24% (yo), meningkat dibanding tahun

lalu sebesar 2,48% (yo) seiring dengan pertumbuhan kredit yang masih *double digit*.

Dengan pertumbuhan modal yang lebih lambat dibandingkan ATMR, rasio CAR BUS turun sebesar 86 bps (yo) menjadi 20,39%.

### Overview Kinerja BPR

*Fungsi intermediasi BPR (Konvensional dan Syariah) secara umum berjalan cukup baik meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga terjaga ditopang oleh upaya penguatan permodalan, didukung dengan efisiensi BPR yang mengalami perbaikan.*

### 3. Kinerja BPR Konvensional (BPR)

Fungsi intermediasi BPR berjalan cukup baik, tercermin dari peningkatan pertumbuhan aset, kredit dan DPK dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan

BPR juga masih solid yang terlihat dari tingkat permodalan (CAR) yang cukup tinggi meskipun masih dibayangi kenaikan risiko kredit (NPL) dan rentabilitas yang menurun.

**Tabel 11 Indikator Umum BPR**

Indikator	Nominal			qtq		yoY	
	Sep '18	Jun '19	Sep'19	Jun '19	Sep '19	Sep '18	Sep '19
<b>Total Aset (Rp miliar)</b>	131.508	139.512	144.779	1,57%	3,78%	8,16%	10,09%
<b>Kredit (Rp miliar)</b>	95.800	104.616	106.733	3,16%	2,02%	8,94%	11,41%
<b>Dana Pihak Ketiga (Rp miliar)</b>	88.744	94.962	99.071	1,30%	4,33%	8,76%	11,64%
- Tabungan (Rp miliar)	27.935	29.138	30.800	-1,57%	5,70%	12,22%	10,26%
- Deposito (Rp miliar)	60.810	65.824	68.271	2,62%	3,72%	7,24%	12,27%
<b>CAR (%)</b>	22,75	22,78	22,79	(139)	1	6	4
<b>ROA (%)</b>	2,49	2,37	2,29	(6)	(8)	(7)	(20)
<b>BOPO (%)</b>	81,24	82,34	82,39	49	6	17	115
<b>NPL Gross (%)</b>	7,16	7,25	7,34	31	9	16	18
<b>NPL Net (%)</b>	5,38	5,58	5,55	30	(4)	21	17
<b>LDR (%)</b>	76,94	78,91	77,81	155	(110)	35	87
<b>CR (%)</b>	16,17	15,17	15,67	16	51	(96)	(50)

Sumber: SPI, September 2019

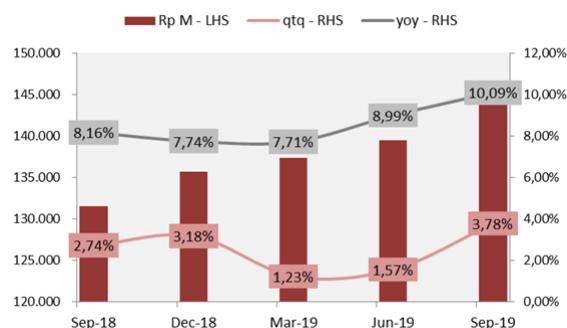
Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

#### 3.1 Aset BPR

Dalam satu tahun terakhir, aset BPR tumbuh 10,09% (yo), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,16% (yo). Peningkatan tersebut seiring dengan

peningkatan pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, modal BPR juga masih tercatat tumbuh meskipun melambat.

**Grafik 16 Perkembangan Aset BPR**



Sumber: SPI, September 2019

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR lebih banyak di Pulau Jawa (57,65%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 23,69% dan 13,49%. Namun demikian, pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara masing-masing sebesar 39,33% (yoY) dan 21,65% (yoY), meskipun memiliki porsi yang kecil terhadap total aset BPR (0,15% dan 1,07%). Sementara itu, Jawa Tengah merupakan daerah dengan porsi aset terbesar BPR tercatat tumbuh 12,95% (yoY).

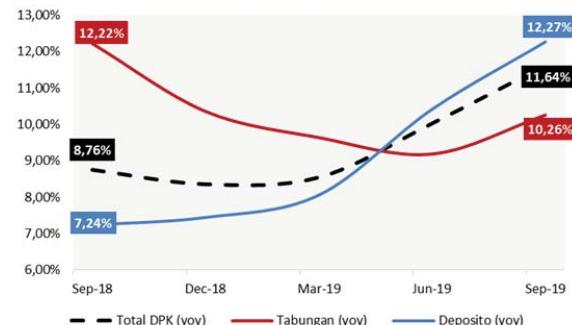
### 3.2 Sumber Dana BPR

Komposisi sumber dana BPR masih didominasi oleh DPK dengan porsi 82,92%, diikuti pinjaman yang diterima (11,31%), antar bank pasiva (5,05%), dan kewajiban segera (0,71%).

DPK BPR tumbuh 11,64% (yoY), meningkat dibandingkan 8,76% (yoY) pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan deposito sebagai

komponen DPK terbesar yang tumbuh 12,27% (yoY), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,24% (yoY). Sementara itu, tabungan masih tercatat melambat dari 12,22% (yoY) pada tahun sebelumnya menjadi 10,26% (yoY).

**Grafik 17 Perkembangan DPK BPR**



Sumber: SPI, September 2019

Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar (68,91%). Sebaran DPK BPR juga terkonsentrasi di Jawa (59,67%), diikuti Sumatera (17,90%), Bali-Nusa Tenggara (14,02%), Sulawesi (6,36%), dan Kalimantan (2,05%). Seiring dengan besarnya asetnya, penghimpunan DPK utamanya juga berada di Jawa Tengah (26,16%) dan Jawa Barat (13,07%), yang masing-masing tumbuh meningkat 13,32% (yoY) dan 8,05% (yoY) (September 2018 masing-masing sebesar 12,17%, yoY dan 2,67%, yoY).

Pertumbuhan DPK BPR tertinggi terdapat di Maluku Utara yang tumbuh 51,82% (yoY), meskipun dengan porsi yang tidak terlalu besar, yaitu 0,12% dari total DPK BPR.

**Tabel 12 Penyebaran DPK BPR**

Wilayah	DPK (Rp M)			Porsi	qtq		yoY	
	Sep '18	Jun '19	Sep '19		Jun '19	Sep '19	Sep '18	Sep '19
Sumatera	16.587	17.404	17.730	17,90%	1,10%	1,87%	5,83%	6,89%
Jawa	52.742	56.355	59.120	59,67%	0,82%	4,91%	8,66%	12,09%
Kalimantan	2.067	1.947	2.034	2,05%	-0,75%	4,49%	16,14%	-1,58%
Bali dan Nusa Tenggara	11.938	13.128	13.887	14,02%	1,87%	5,78%	12,75%	16,32%
Sulawesi, Maluku dan Papua	5.410	6.128	6.300	6,36%	5,93%	2,80%	7,85%	16,45%
<b>Jumlah</b>	<b>88.744</b>	<b>94.962</b>	<b>99.071</b>	<b>100%</b>	<b>1,30%</b>	<b>4,33%</b>	<b>8,76%</b>	<b>11,64%</b>

Sumber: SPI, September 2019

### 3.3 Penggunaan Dana BPR

Alokasi penempatan dana BPR masih terbatas pada 2 hal, yaitu dalam bentuk kredit dengan porsi 76,67% dan penempatan pada bank lain dengan porsi 23,33%. Kredit BPR pada September 2019 tumbuh 11,41% (yo), meningkat dibandingkan 8,94% (yo) pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan penyaluran kredit di BUK, penyaluran kredit BPR juga masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran (porsi sebesar 24,66%) yang tumbuh 8,23% (yo). Sementara itu, pertumbuhan kredit tertinggi terjadi di sektor perantara keuangan yang tumbuh 75,10% (yo) namun hanya berkontribusi kecil dengan porsi sebesar 0,55% terhadap total kredit BPR.

Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (53,00%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja (45,09%) dan Kredit Investasi (7,92%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi (47,00%).

Pertumbuhan kredit BPR utamanya didorong oleh pertumbuhan KMK sebesar 11,58% (yo), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 10,26% (yo). Penyaluran KMK BPR utamanya disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran (49,13% dari total penyaluran KMK) yang tumbuh 7,23% (yo). Selain itu, sektor pertanian dan perburuan (11,31% dari total kredit BPR) juga tumbuh tinggi 14,36% (yo) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,39% (yo).

**Tabel 13 Kredit BPR berdasarkan Sektor Ekonomi**

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp Miliar)			Porsi		qtq	yoY	
	Sep '18	Jun '19	Sep '19	Sep '19	Jun '19		Sep '18	Sep '19
Pertanian, Perburahan, dan Kehutanan	5.507	6.075	6.241	5,85%	3,74%	2,73%	5,92%	13,32%
Perikanan	401	462	473	0,44%	6,96%	2,45%	17,02%	17,93%
Pertambangan dan Penggalian	245	332	333	0,31%	4,35%	0,09%	14,10%	35,73%
Industri Pengolahan	1.414	1.575	1.563	1,46%	3,20%	-0,77%	21,49%	10,57%
Listrik, Gas dan Air	114	152	141	0,13%	8,90%	-7,64%	32,62%	22,99%
Konstruksi	3.461	4.045	4.423	4,14%	7,26%	9,36%	33,39%	27,79%
Perdagangan Besar dan Eceran	24.322	26.302	26.324	24,66%	3,54%	0,08%	8,44%	8,23%
Penyediaan Akomodasi dan Penyedian Makan Minum	995	1.234	1.275	1,19%	2,45%	3,31%	15,47%	28,15%
Transportasi, Pergudangan dan Perantara Keuangan	2.076	2.458	2.566	2,40%	3,32%	4,41%	12,24%	23,60%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2.622	3.041	3.053	2,86%	6,39%	0,42%	20,10%	16,44%
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	154	155	139	0,13%	6,42%	-10,21%	5,71%	-9,84%
Jasa Pendidikan	307	401	403	0,38%	6,96%	0,48%	25,92%	31,27%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	255	285	295	0,28%	2,21%	3,48%	10,34%	15,80%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	2.502	2.676	2.800	2,62%	3,15%	4,66%	6,58%	11,94%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	1.148	1.260	1.248	1,17%	2,15%	-0,93%	11,30%	8,79%
Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	4.350	4.566	4.708	4,41%	2,76%	3,11%	4,95%	8,21%
Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	4.287	4.604	4.892	4,58%	2,46%	6,27%	10,96%	14,12%
Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	41.303	44.462	45.267	42,41%	2,03%	1,81%	6,52%	9,60%
<b>TOTAL</b>	<b>95.800</b>	<b>104.616</b>	<b>106.733</b>	<b>100%</b>	<b>3,16%</b>	<b>2,02%</b>	<b>8,94%</b>	<b>11,41%</b>

Sumber: SPI, September 2019

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (57,39%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (1,76%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah BPR yang sebagian besar berada di wilayah Jawa (75,17% atau 4.726 BPR) sedangkan BPR yang beroperasi

di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,13% (134 BPR) dari total BPR Nasional.

Pada periode ini, risiko kredit BPR meningkat 18 bps (yoj) dengan rasio NPL gross sebesar 7,34% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,16%.

**Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran**

Wilayah	Kredit (Rp M)				Porsi	qtq		yoj	
	Jun '18	Mar '19	Jun '19	Sep '19		Jun '19	Sep '19	Sep '18	Sep '19
Sumatera	18.823	20.274	20.616	20.918	19,60%	1,69%	1,46%	7,53%	9,33%
Jawa	53.605	57.738	60.061	61.251	57,39%	4,02%	1,98%	9,83%	12,66%
Kalimantan	1.522	1.695	1.820	1.883	1,76%	7,38%	3,43%	6,73%	16,92%
Bali dan Nusa Tenggara	11.541	12.351	12.558	12.840	12,03%	1,67%	2,25%	6,43%	9,80%
Sulawesi, Maluku dan Papua	8.787	9.352	9.561	9.841	9,22%	2,23%	2,94%	10,41%	9,41%
<b>Jumlah</b>	<b>94.279</b>	<b>101.410</b>	<b>104.616</b>	<b>106.733</b>	<b>100%</b>	<b>3,16%</b>	<b>2,02%</b>	<b>8,94%</b>	<b>11,41%</b>

Sumber: SPI, September 2019

### 3.4 Rentabilitas BPR

Pada periode laporan, rentabilitas BPR menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun menjadi 2,29% atau lebih rendah sebesar 20 bps dibandingkan tahun sebelumnya (2,49%). Hal tersebut dipengaruhi melambatnya laba operasional yang tumbuh 1,05% (yoj), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,16% (yoj). Sejalan dengan penurunan ROA, pada bulan September 2019, BOPO juga meningkat 115 bps (yoj) menjadi 82,39% dibanding tahun sebelumnya sebesar 81,24%.

### 3.5 Permodalan BPR

Di tengah laba yang tumbuh melambat, permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR tercatat meningkat dari 22,75% pada September 2018 menjadi

22,79%. Hal tersebut seiring dengan upaya BPR untuk memperkuat permodalan antara lain melalui merger dan konsolidasi, yang ditandai dengan berkurangnya jumlah BPR.

Selain itu, sebagai upaya untuk memperkuat kestabilan dan ketangguhan BPR, OJK mengarahkan BPR untuk dapat memperkuat permodalannya, utamanya dalam komponen modal inti sebesar minimum Rp3 miliar (untuk BPR yang memiliki modal inti dibawah Rp3 miliar) dan Rp6 miliar (untuk BPR yang memiliki modal inti antara Rp3 s.d. < Rp6 miliar) pada Desember 2019 (POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat dan POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

#### 4. Kinerja BPR Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada triwulan III-2019 tumbuh cukup baik dengan aset, pembiayaan, dan DPK BPRS masing-masing tumbuh 11,94% (yo), 16,11% (yo), dan 11,58% (yo). Risiko pembiayaan juga menurun cukup signifikan

dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih pada level yang cukup tinggi. Sementara itu ketahanan BPRS masih terjaga yang tercermin pada permodalan juga cukup baik.

**Tabel 15 Indikator Umum BPRS**

Indikator	Nominal (Rp Miliar)			qtq	Sep '19	Sep '18	yoY
	Sep '18	Jun '19	Sep '19				
<b>Total Aset (Rp Miliar)</b>	11.895	12.448	13.315	0,31%	6,97%	16,50%	11,94%
<b>Pembiayaan (Rp Miliar)</b>	8.680	9.726	10.078	3,50%	3,62%	14,87%	16,11%
<b>Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)</b>	7.739	8.100	8.635	-0,45%	6,61%	19,31%	11,58%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	2.731	2.773	3.033	-4,73%	9,35%	20,79%	11,06%
- Deposito iB (Rp Miliar)	5.009	5.326	5.603	1,94%	5,19%	18,52%	11,86%
<b>CAR (%)</b>	19,78	19,54	19,48	(65)	(6)	(111)	(30)
<b>ROA (%)</b>	2,30	2,51	2,52	14	1	(27)	23
<b>BOPO (%)</b>	86,18	85,78	85,89	(122)	11	(13)	(29)
<b>NPF Gross (%)</b>	11,60	8,83	8,27	12	(56)	80	(333)
<b>FDR (%)</b>	112,15	120,08	116,71	458	(337)	(434)	456

Sumber: SPS September 2019

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)

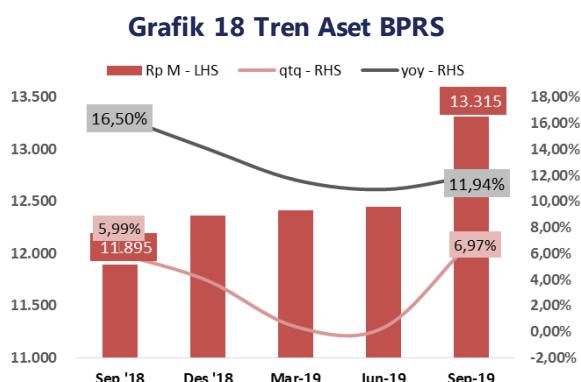
#### 4.1 Aset BPRS

Pada September 2019, aset BPRS tercatat sebesar Rp13,31 triliun atau tumbuh 11,94% (yo), melambat dibanding 16,50% (yo) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh masih melambatnya pertumbuhan DPK.

#### 4.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar 77,13% atau mencapai Rp8,63 triliun. DPK BPRS tumbuh 11,58% (yo), jauh melambat dibandingkan pertumbuhan September 2018 sebesar 19,31% (yo). Perlambatan DPK terjadi baik pada deposito *Islamic Bank* (iB) yang tumbuh 11,86% (yo) (September 2018=18,52%, yo) maupun tabungan iB yang tumbuh 11,06% (yo) (Sep-18=20,79%, yo).

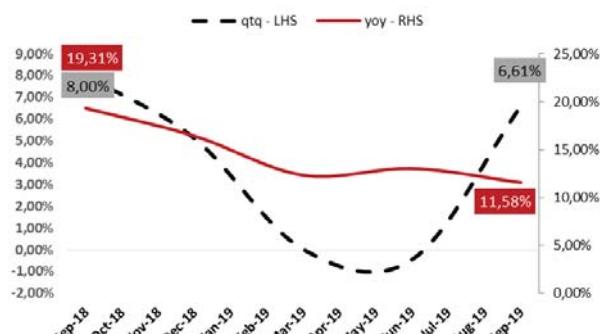
Secara triwulanan, DPK BPRS tumbuh 6,61% (qtq) setelah pada periode sebelumnya terkontraksi sebesar -0,45% (qtq). Pertumbuhan tersebut didorong oleh tabungan iB yang meningkat signifikan, 9,35% (qtq) setelah sebelumnya terkontraksi -4,73% (qtq). Sejalan dengan tabungan iB, deposito iB secara triwulanan juga tumbuh 5,19% (qtq) meningkat



Sumber: SPS September 2019

dibandingkan posisi Juni 2019 sebesar 1,94% (qtq).

**Grafik 19 Tren Pertumbuhan DPK BPRS**



Sumber: SPS September 2019

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB yakni 64,88% yang utamanya (37,35% atau senilai Rp3,23 triliun) dalam bentuk akad *mudharabah* dengan tenor 12 bulan.

### 4.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada September 2019, dana BPRS sebagian besar (80,65%) digunakan untuk pembiayaan atau mencapai Rp10,08 triliun. Pembiayaan BPRS tumbuh 16,11% (oy), meningkat dari 14,87% (oy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan perbaikan kualitas pembiayaan BPRS yang tercermin dari penurunan NPF gross menjadi 8,27% (September 2018 sebesar 11,60%).

Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar pembiayaan BPRS disalurkan pada sektor perdagangan, restoran, dan hotel sebesar 20,42%, yang tumbuh sebesar 6,17% (oy) (September 2018=11,68%, oy). Sementara pertumbuhan pembiayaan tertinggi disalurkan ke sektor perindustrian yang tumbuh 86,05% (oy) sejalan dengan mulai membaiknya kegiatan usaha, meskipun dengan porsi yang kecil (1,94%).

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS masih didominasi untuk tujuan konsumsi (47,32%), yang tumbuh 22,03% (oy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 14,37% (oy). Sementara itu, secara umum pertumbuhan pembiayaan produktif sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya, didorong oleh perlambatan pembiayaan investasi yang hanya tumbuh 3,81% (oy) (September 2018=21,28%, oy). Namun demikian, pembiayaan modal kerja tercatat tumbuh meningkat. Pembiayaan modal kerja yang memiliki porsi 37,75% dari total penyaluran pembiayaan BPRS tumbuh 14,52% (oy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,84% (oy).

**Tabel 16 Pembiayaan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi**

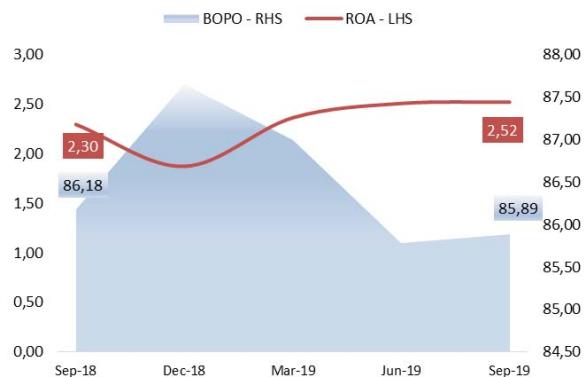
Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		oy	
	Sep '18	Jun '19	Sep '19		Jun '19	Sep '19	Sep '18	Sep '19
Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian	380.878	328.677	352.183	3,49%	3,21%	7,15%	3,42%	-7,53%
Pertambangan	19.622	26.053	24.868	0,25%	-1,64%	-4,55%	5,03%	26,74%
Perindustrian	104.949	173.858	195.256	1,94%	18,78%	12,31%	43,63%	86,05%
Listrik, gas dan air	11.407	13.632	15.744	0,16%	-8,08%	15,49%	7,37%	38,02%
Konstruksi	667.629	799.996	837.920	8,31%	10,01%	4,74%	22,16%	25,51%
Perdagangan, restoran dan hotel	1.937.929	2.081.421	2.057.486	20,42%	2,91%	-1,15%	11,68%	6,17%
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	101.186	114.199	121.249	1,20%	5,53%	6,17%	10,13%	19,83%
Jasa dunia usaha	785.260	752.190	837.168	8,31%	6,81%	11,30%	28,18%	6,61%
Jasa sosial/masyarakat	762.882	837.423	867.495	8,61%	7,54%	3,59%	11,80%	13,71%
Lain-lain	3.907.902	4.598.654	4.768.725	47,32%	1,07%	3,70%	14,37%	22,03%
<b>TOTAL</b>	<b>8.679.643</b>	<b>9.726.103</b>	<b>10.078.094</b>	<b>100%</b>	<b>3,50%</b>	<b>3,62%</b>	<b>14,87%</b>	<b>16,11%</b>

Sumber: SPS September 2019

#### 4.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS membaik, tercermin dari rasio ROA yang meningkat sebesar 2,52% dari 2,30% pada tahun sebelumnya. Peningkatan ROA tersebut didorong oleh pertumbuhan laba BPRS sebesar 13,91% (yoY), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,89% (yoY). Seiring dengan membaiknya rentabilitas BPRS, efisiensi BPRS juga tercatat membaik, tercermin dari rasio BOPO yang turun ke level 85,89% dari 86,18% pada tahun sebelumnya.

**Grafik 20 Tren ROA dan BOPO BPRS**



Sumber: SPS September 2019

#### 4.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS relatif cukup kuat meskipun CAR menurun 30 bps (yoY) menjadi 19,48% dibanding tahun sebelumnya sebesar 19,78%. Meskipun demikian, CAR BPRS tersebut dinilai masih cukup memadai dalam menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS.

## 5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral

Penyaluran kredit berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan, dengan porsi masing-masing sebesar 18,14% dan 16,61%.

Sementara itu, untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar disalurkan ke sektor rumah tangga yaitu 23,40% terhadap total kredit.

**Tabel 17 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi**

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			qtq		yoy		Porsi
		Sep '18	Jun '19	Sep '19	Jun '19	Sep '19	Sep '18	Sep '19	
<b>Lapangan Usaha</b>									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	338,57	362,56	370,14	2,40%	2,09%	11,35%	9,33%	6,70%
2	Perikanan	11,52	13,02	13,78	5,51%	5,79%	10,54%	19,60%	0,25%
3	Pertambangan dan Penggalian	137,18	136,55	129,72	-0,87%	-5,00%	24,58%	-5,44%	2,35%
4	Industri Pengolahan	868,92	902,05	917,46	3,82%	1,71%	9,73%	5,59%	16,61%
5	Listrik, gas dan air	173,48	208,93	197,44	11,81%	-5,50%	33,34%	13,81%	3,57%
6	Konstruksi	290,87	348,34	367,27	7,59%	5,43%	17,24%	26,27%	6,65%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	961,47	999,85	1.002,34	2,79%	0,25%	12,31%	4,25%	18,14%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	97,80	104,20	106,87	3,82%	2,56%	2,02%	9,27%	1,93%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	210,08	232,46	232,24	8,64%	-0,10%	20,37%	10,55%	4,20%
10	Perantara Keuangan	225,95	250,02	243,99	7,65%	-2,41%	8,27%	7,99%	4,42%
11	Real Estate	238,36	258,47	262,48	1,83%	1,55%	10,53%	10,12%	4,75%
12	Administrasi Pemerintahan	24,60	25,41	26,62	-2,30%	4,76%	6,95%	8,21%	0,48%
13	Jasa Pendidikan	11,23	13,32	13,44	5,14%	0,97%	17,81%	19,75%	0,24%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20,28	25,19	27,99	8,98%	11,12%	14,97%	38,03%	0,51%
15	Jasa Kemasyarakatan	75,22	79,18	80,22	-2,58%	1,32%	21,00%	6,65%	1,45%
16	Jasa Perorangan	2,69	3,37	3,41	23,43%	1,09%	1,72%	26,73%	0,06%
17	Badan Internasional	0,13	0,17	0,27	0,39%	53,70%	-14,92%	97,80%	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	2,54	1,93	1,76	21,30%	-9,08%	-17,14%	-30,96%	0,03%
<b>Bukan Lapangan Usaha</b>									
19	Rumah Tangga	1.193,83	1.270,17	1.292,70	1,26%	1,77%	13,59%	8,28%	23,40%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	235,38	232,45	234,06	0,01%	0,69%	2,80%	-0,56%	4,24%
<b>Industri</b>		<b>5.120</b>	<b>5.468</b>	<b>5.524</b>	<b>3,33%</b>	<b>1,03%</b>	<b>12,69%</b>	<b>7,89%</b>	<b>100%</b>

Sumber: SPI, September 2019

Penyaluran kredit bank umum triwulan III-2019 tumbuh 7,89% (yoY), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,69% (yoY). Hal tersebut dipengaruhi oleh masih lemahnya harga komoditas dan daya beli masyarakat seiring dengan perlambatan pertumbuhan perekonomian global.

Ditinjau dari porsinya, hingga saat ini sebagian besar penyaluran kredit perbankan Indonesia masih disalurkan ke sektor rumah tangga (23,40%) yang tumbuh 8,28% (yoY), melambat dari tahun sebelumnya yang

tumbuh sebesar 13,59% (yoY). Kredit sektor ini utamanya disalurkan untuk subsektor pemilikan rumah tinggal yang pada periode ini melambat 8,28% (yoY) dari 13,59% (yoY). Kredit untuk pemilikan rumah tinggal utamanya disalurkan untuk pemilikan rumah tinggal tinggal tipe 22 s.d 70 (KPR tipe menengah), yang tumbuh melambat menjadi 15,93% (yoY) dari 18,05% (yoY) pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran

(18,14%). Kredit di sektor ini tumbuh 4,25% (yo), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,31% (yo). Penyaluran kredit terbesar pada sektor ini adalah perdagangan eceran kecuali mobil dan sepeda motor (7,54%) dan perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor (7,49%) yang masing-masing tumbuh menjadi 5,60% (yo) dan 5,10% (yo).

Sektor industri pengolahan juga masih merupakan salah satu sektor dengan penyaluran kredit terbesar pada periode ini, yaitu sebesar 16,61% dengan porsi terbesar disalurkan kepada industri makanan dan minuman serta industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, yang keduanya tercatat tumbuh melambat. Secara umum, kredit sektor industri pengolahan tercatat tumbuh 5,59% (yo), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,73% (yo). Meskipun secara umum melambat, beberapa sektor industri menunjukkan pertumbuhan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, diantaranya industri barang galian bukan logam dan industri logam dasar.

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar, 6,70% dari total penyaluran kredit perbankan, utamanya untuk sektor perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, laju pertumbuhan kredit perkebunan kelapa sawit tercatat semakin melambat. Sebelumnya pada September 2018, pertumbuhan kredit perkebunan kelapa sawit tumbuh sebesar 11,66% (yo), sedangkan tahun ini hanya tumbuh sebesar 2,55% (yo). Melambatnya pertumbuhan kredit di sub sektor perkebunan kelapa

sawit ini seiring dengan melambatnya ekspor kelapa sawit Indonesia dan menurunnya harga CPO di pasar global. Penurunan harga CPO dipasar global terjadi karena ada beberapa sentimen global yang terjadi seperti kenaikan stok di India, aturan yang ketat untuk menembus pasar Eropa, serta melunaknya China untuk produk kedelai Amerika Serikat (AS).

**Grafik 21 Pertumbuhan Kredit Porsi Tertinggi berdasarkan Sektor Ekonomi (yo)**



Sumber: SPI, September 2019

**Grafik 22 Pertumbuhan Kredit yang Meningkat berdasarkan Sektor Ekonomi (yo)**



Sumber: SPI, September 2019

Meskipun secara industri pertumbuhan kredit tercatat melambat, pada periode laporan terdapat beberapa sektor kredit yang mencatatkan peningkatan pertumbuhan, salah satunya adalah kredit ke sektor konstruksi. Sektor ini memiliki

porsi cukup besar, yaitu 6,65% dari total penyaluran kredit dan mencatat pertumbuhan yang tinggi 26,27% (yoY), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 17,24% (yoY). Porsi dan pertumbuhan yang tinggi tersebut seiring dengan maraknya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Pertumbuhan kredit pada sektor itu utamanya didorong oleh pertumbuhan yang tinggi pada sub sektor konstruksi gedung dan bangunan sipil utamanya dipicu oleh penyaluran kredit untuk bangunan jalan tol yang tumbuh 86,46% (yoY). Hal ini sesuai dengan target Pemerintah untuk membangun jalan tol 1.070 km pada tahun 2019 dengan tujuan meningkatkan konektivitas antar daerah serta efisiensi waktu tempuh transportasi dan jaringan logistik. Lokasi proyek untuk penyaluran kredit pembangunan jalan tol masih berpusat di Pulau Jawa, namun mulai terlihat peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit di beberapa provinsi di luar Pulau Jawa, diantaranya Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur.

Selain itu, sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum juga tumbuh

meningkat dibanding tahun sebelumnya, dari 2,02% (yoY) menjadi 9,27% (yoY), dengan penyaluran utama ke subsektor penyediaan akomodasi hotel bintang. Peningkatan kredit di sektor ini sejalan dengan dijadikannya sektor pariwisata sebagai salah satu kredit sektor prioritas yang digalakkan oleh Pemerintah pada tahun ini.

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga mencatat pertumbuhan kredit yang meningkat sebesar 38,03% (yoY) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,97% (yoY). Namun demikian, porsi penyaluran kredit pada sektor ini sangat kecil (0,51% dari total penyaluran kredit bank umum).

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial juga tumbuh meningkat dibanding tahun sebelumnya, dari 6,95% (yoY) menjadi 8,21% (yoY). Penyaluran kredit di sektor ini sangat kecil, yaitu sebesar 0,48% dari total penyaluran kredit bank umum, dengan sub-sektor utama administrasi pemerintahan, dan kebijaksanaan ekonomi dan sosial.

## 6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

Pada triwulan III-2019, kredit UMKM tumbuh 12,34% (yoY), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,35% (yoY). Peningkatan kredit UMKM masih ditopang oleh penyaluran ke sektor perdagangan besar dan eceran, diikuti sektor pengolahan dan pertanian seiring

dengan porsi penyaluran ke sektor tersebut yang cukup besar. Apabila dilihat dari pertumbuhannya, penyaluran UMKM ke sektor listrik, gas dan air tumbuh tertinggi yaitu sebesar 115,50% (yoY), meskipun dengan porsi yang sangat kecil yaitu 0,60% dari total penyaluran kredit UMKM.

**Tabel 18 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM**

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)		Porsi	qtq	yoy			
	Jun '18	Des '18			Sep '19	Jun '19	Sep '19	Sep '18
<b>Perdagangan besar dan eceran</b>								
Baki Debet	480.540	499.248	528.042	50,79%	2,63%	1,16%	8,85%	8,41%
NPL	19.896	17.170	20.024	3,79%	6,92%	0,95%	0,34%	5,61%
<b>Industri pengolahan</b>								
Baki Debet	93.234	99.028	104.160	10,02%	3,11%	1,90%	5,32%	10,05%
NPL	3.811	3.292	3.916	3,76%	7,63%	2,46%	11,04%	7,58%
<b>Pertanian, Perburuan dan Kehutanan</b>								
Baki Debet	83.439	89.560	103.315	9,94%	9,62%	1,62%	11,87%	23,17%
NPL	2.519	2.073	2.632	2,55%	1,02%	10,68%	-13,00%	18,08%
<b>Listrik, Gas, dan Air</b>								
Baki Debet	3.497	4.307	6.230	0,60%	11,21%	24,13%	-4,78%	115,50%
NPL	698	135	149	2,39%	-1,33%	0,68%	-26,79%	21,14%
<b>Lainnya</b>								
Baki Debet	253.367	277.829	297.873	28,65%	5,48%	3,12%	11,26%	15,93%
NPL	13.459	9.751	12.396	4,16%	11,96%	6,22%	-10,69%	15,61%
<b>Baki Debet UMKM</b>	<b>914.077</b>	<b>969.972</b>	<b>1.039.620</b>		4,18%	1,95%	9,35%	12,34%
<b>NPL UMKM</b>	<b>40.383</b>	<b>32.421</b>	<b>39.117</b>	<b>3,76%</b>	8,06%	3,34%	-3,34%	9,65%

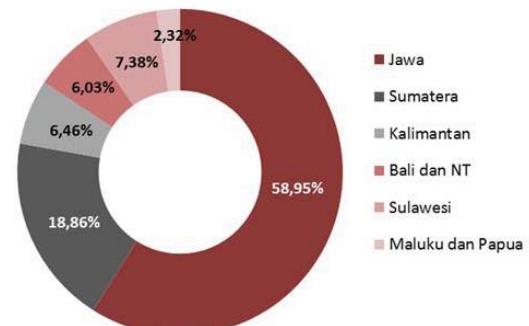
Ket : Shaded area merupakan rasio NPL

Sumber: SPI, September 2019

Kualitas kredit UMKM tercatat membaik dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari 3,85% menjadi 3,76%. Perbaikan NPL tersebut terjadi pada sebagian besar sektor ekonomi, utamanya pada sektor listrik, air, dan gas dengan penurunan NPL UMKM menjadi 2,39% (September 2018=4,25%).

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,95%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 22,19%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang tumbuh masing-masing 24,12% (yoy) dan 20,01% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (58,54%) dan BUSN (33,08%). Secara umum, penyaluran kredit UMKM dari seluruh kelompok bank meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan tertinggi pada kelompok bank KCBA dan bank Campuran tumbuh tertinggi sebesar 16,57% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -7,63% (yoy).

**Grafik 23 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah**

Sumber: SPI, September 2019

**Tabel 19 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank**

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoY	
	Sep '18	Des '18	Sep '19		Jun '19	Sep '19	Sep '18	Sep '19
BUMN	532.987	551.935	608.595	58,54%	4,85%	2,71%	11,95%	14,19%
BUSN	313.857	338.455	343.860	33,08%	2,94%	-0,49%	6,22%	9,56%
BPD	70.952	70.089	78.242	7,53%	5,57%	7,71%	6,78%	10,27%
KCBA dan Campuran	7.654	9.493	8.922	0,86%	-2,36%	-1,13%	-7,63%	16,57%
<b>Total UMKM</b>	<b>925.451</b>	<b>969.972</b>	<b>1.039.620</b>	100%	4,18%	1,95%	9,35%	12,34%

Sumber: SPI September 2019

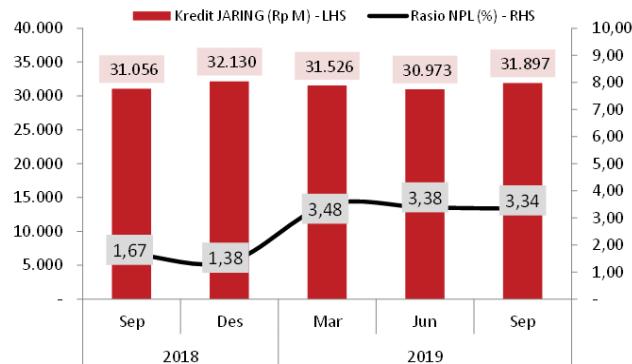
## 7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan September 2019, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp31,90 triliun atau tumbuh 2,71% (yoY), melambat dibandingkan tahun sebelumnya (16,38%, yoY). Perlambatan terjadi dipengaruhi oleh turunnya kredit pada subsektor industri pengolahan dan perdagangan hasil perikanan yang masing-masing turun sebesar 6,24% (yoY) dan 8,12% (yoY), serta melambatnya penyaluran kredit ke subsektor budidaya yang hanya tumbuh 6,61% (yoY). Namun demikian, pertumbuhan pada periode laporan masih cukup baik ditopang oleh penyaluran kredit ke subsektor penangkapan dan jasa sarana produksi perikanan yang masing-masing tumbuh 30,15% (yoY) dan 31,57% (yoY).

Sampai dengan September 2019, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp31,90 triliun atau tumbuh 2,71% (yoY), melambat dibandingkan tahun sebelumnya (16,38%, yoY). Perlambatan terjadi dipengaruhi oleh turunnya kredit pada subsektor industri pengolahan dan perdagangan hasil perikanan yang masing-

masing turun sebesar 6,24% (yoY) dan 8,12% (yoY), serta melambatnya penyaluran kredit ke subsektor budidaya yang hanya tumbuh 6,61% (yoY). Namun demikian, pertumbuhan pada periode laporan masih cukup baik ditopang oleh penyaluran kredit ke subsektor penangkapan dan jasa sarana produksi perikanan yang masing-masing tumbuh 30,15% (yoY) dan 31,57% (yoY).

**Grafik 24 Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)**



Sumber: OJK

**Tabel 20 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING**

Kegiatan Usaha	2018 (%)		2019 (%)
	Sep	Jun	
Penangkapan	2,57	9,34	9,20
Budidaya	1,50	1,50	1,53
Jasa sarana produksi	3,90	2,50	2,73
Industri Pengolahan	0,36	0,46	0,48
Perdagangan	2,21	3,14	2,79
<b>NPL</b>	<b>1,67</b>	<b>3,38</b>	<b>3,34</b>

Sumber: OJK

**Box 1. Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO)  
Triwulan IV-2019**

Berdasarkan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO)<sup>2</sup> pada triwulan IV-2019, optimisme responden terhadap prospek bisnis perbankan sedikit berkurang dibandingkan hasil survei triwulan III-2019. Hal tersebut tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang tercatat sebesar 64 poin (zona optimis) atau turun dari 66 pada periode sebelumnya. Optimisme responden secara umum berasal dari keyakinan bahwa kondisi makroekonomi masih cukup baik (IKM=60 poin) meskipun dibarengi risiko yang cenderung meningkat (IPR=56) dan kinerja perbankan (IEK=77) yang sedikit menurun dibandingkan periode sebelumnya.

**Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) Triwulan IV-2019**

KETERANGAN	Q 3'19	Q 4'19
INDEKS EKSPEKTASI KONDISI MAKROEKONOMI (IKM)	55	60
INDEKS PERSEPSI RISIKO (IPR)	61	56
INDEKS EKSPEKTASI KINERJA (IEK)	81	77
<b>INDEKS ORIENTASI BISNIS BANK (IBP)</b>	<b>66</b>	<b>64</b>

Sumber: SBPO, diolah

Lebih lanjut penjelasan tiga indeks yang membentuk IBP sebagai berikut:

**1. Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)**

Kondisi makroekonomi pada triwulan IV-2019 secara umum diyakini masih cukup kondusif, yang terlihat dari Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) sebesar 60, meningkat dari 55 periode sebelumnya. Keyakinan kondisi makroekonomi yang kondusif utamanya karena keyakinan ruang penurunan suku bunga acuan masih terbuka, nilai tukar USD/IDR yang relatif menguat, dan keyakinan bahwa kebijakan pemerintah akan akomodatif untuk mendorong perekonomian. Faktor yang membuat responden cukup optimis adalah keyakinan bahwa pertumbuhan PDB pada triwulan IV-2019 yang masih akan tumbuh di atas 5%, optimisme berasal dari keyakinan akan adanya konsumsi cukup besar menjelang akhir tahun, peningkatan kredit serta adanya ekspektasi terhadap pemerintah dalam menetapkan kebijakan untuk dapat mendorong kegiatan perekonomian. Namun demikian, inflasi diperkirakan meningkat dipengaruhi kenaikan permintaan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru sebesar 11 bps dari triwulan sebelumnya menjadi 3,50%. Sedangkan, nilai tukar IDR/USD diperkirakan menguat ke kisaran Rp14.087/USD pada triwulan IV-2019 (Kurs tengah BI September'19=Rp14.174/USD) akibat kondisi politik Indonesia yang stabil serta masuknya dana investasi asing ke *emerging market*, khususnya Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat kekhawatiran repatriasi dana asing yang diakibatkan oleh masih berlanjutnya perang dagang AS – Tiongkok.

<sup>2</sup> SBPO pada triwulan IV-2019 dilakukan terhadap seluruh populasi Bank Umum (111 bank) dengan jumlah responden sebanyak 96 bank menyampaikan jawaban kepada OJK. Porsi responden tersebut memiliki pangsa aset sebesar 94,02% dari total aset industri perbankan.

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global sebagaimana dijelaskan di atas, sebagian besar responden memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2019 akan berada di kisaran 5,00% – 5,10% (yoY).

## 2. Indeks Persepsi Risiko (IPR)

Secara umum, eksposur risiko perbankan sedikit meningkat pada triwulan IV-2019 yang terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 56, menurun dibandingkan triwulan III-2019 sebesar 61. Peningkatan persepsi risiko tersebut utamanya dipengaruhi oleh peningkatan risiko likuiditas yang diindikasikan dari penurunan ekspektasi *net cash flow* dan NIM pada triwulan IV-2019 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Menurunnya *net cashflow* tersebut dipengaruhi oleh rencana peningkatan penyaluran kredit serta adanya penarikan dana pemerintah. Sementara itu, penurunan ekspektasi NIM disebabkan oleh penurunan tingkat suku bunga acuan sehingga berdampak pada penurunan pendapatan, di sisi lain bank dihadapkan dengan persaingan untuk memperoleh dana pihak ketiga (DPK) yang menyebabkan meningkatnya *cost of fund*. Responden berpandangan bahwa NIM/NOM perbankan pada triwulan IV-2019 diperkirakan tumbuh sebesar 5,05%, lebih rendah dari persepsi NIM/NOM perbankan pada hasil survei triwulan III-2019 tumbuh sebesar 5,10%, namun lebih tinggi dari NIM/NOM agregat perbankan pada Oktober 2019 sebesar 4,78%.

Di sisi lain, persepsi risiko kredit pada triwulan IV-2019 akan menurun yang diindikasikan oleh persepsi responden terhadap perbaikan kualitas kredit dengan penurunan rasio NPL/NPF menjadi sebesar 1,99% pada triwulan IV-2019, lebih baik dibandingkan persepsi pada triwulan III-2019 sebesar 2,15%. Penurunan rasio NPL/NPF tersebut dipengaruhi oleh ekspektasi meningkatnya penyaluran kredit baru, pelunasan kredit dan hasil mitigasi risiko.

Sementara itu, risiko pasar terkait nilai tukar diperkirakan relatif sama dibandingkan triwulan sebelumnya, karena perbankan umumnya menjaga PDN dalam tingkat yang rendah dan cenderung dalam posisi *long* (aset valas lebih besar dari kewajiban valas).

## 3. Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)

Kinerja perbankan pada triwulan IV-2019 diperkirakan masih optimis meskipun menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang ditunjukkan dengan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) sebesar 77, turun dari triwulan III-2019 sebesar 81. Persepsi penurunan kinerja perbankan tersebut sejalan dengan perkiraan pertumbuhan kredit/pembangunan di akhir 2019 atas persepsi responden pada triwulan IV-2019 sebesar 9,59% (yoY) dibandingkan dengan persepsi responden pada triwulan III-2019 sebesar 10,69% (yoY). Meskipundemikian, penyaluran kredit/pembangunan pada triwulan IV-2019 diperkirakan dapat tumbuh sebesar 5,50% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2019 sebesar 3,40% sejalan dengan penurunan BI7DRR, kebijakan fiskal pemerintah yang akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta upaya perbankan yang lebih giat dalam mencapai target Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2019. Mayoritas responden juga memperkirakan bahwa ekspektasi pertumbuhan DPK pada triwulan IV-

2019 adalah sebesar 3,14% (qtq), menurun dibandingkan triwulan III-2019 sebesar 4,13% (qtq). Hingga akhir tahun 2019, responden memperkirakan DPK dapat tumbuh sebesar 7,43% (oy), pertumbuhan DPK tersebut antara lain didorong oleh upaya bank untuk menarik dana guna menjaga likuiditas tetap terjaga.

Sementara itu, pada triwulan IV-2019, laba perbankan diperkirakan masih cukup baik. Keyakinan tersebut berasal dari kenaikan pendapatan bunga akibat peningkatan kredit, perbaikan kualitas kredit (penurunan biaya CKPN), meningkatnya NIM/NOM dan bank masih memiliki pendapatan dari kegiatan *treasury* hingga akhir tahun. Selanjutnya, modal perbankan pada triwulan IV-2019 diperkirakan tumbuh sebesar 4,77% (qtq) yang berasal dari meningkatnya laba, tambahan setoran modal, penambahan komponen laba ditahan dan *right issue*.

#### **4. Anecdotal Information**

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, mayoritas responden (82,29%) menyatakan bahwa mereka telah mulai melakukan kegiatan digitalisasi perbankan untuk meningkatkan kinerja, mengikuti perkembangan teknologi dan mempermudah pelayanan kepada nasabah.

Kemajuan teknologi mendorong perusahaan *fintech* bermunculan. Namun mayoritas responden menganggap perusahaan *fintech* belum akan memengaruhi pangsa pasar perbankan pada triwulan IV-2019, baik pada sisi penghimpunan maupun penyaluran dana.

Hal-hal yang dianggap dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan antara lain meningkatnya persaingan suku bunga untuk menarik DPK, isu resesi yang membuat pelaku usaha lebih berhati-hati, kondisi ekonomi global akibat perang dagang antara AS dan Tiongkok yang masih tidak stabil berdampak negatif terhadap debitur berbasis eksport, melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik, fluktuasi nilai tukar, dan daya beli masyarakat yang cenderung stagnan atau bahkan menurun.

#### **Komponen Pembentuk IBP**

Komponen Indeks	Q 3'19	Q 4'19
<b>Indeks Ekspektasi Kinerja Makroekonomi</b>	<b>55</b>	<b>60</b>
PDB	53	51
BI7DRR	90	84
Inflasi	45	43
IDR/USD	32	60
<b>Indeks Persepsi Risiko</b>	<b>61</b>	<b>56</b>
NPL/NPF	66	71
NIM	62	57
PDN	51	51
Cashflow	64	47
<b>Indeks Ekspektasi Kinerja</b>	<b>81</b>	<b>77</b>
Kredit/Pembiayaan	85	84
DPK	78	65
Keuntungan	82	78
Modal	80	82
<b>IBP</b>	<b>66</b>	<b>64</b>

Sumber: SBPO, diolah

Halaman ini sengaja dikosongkan

# Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab II

# Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko perbankan masih terjaga sejalan dengan risiko kredit yang *manageable*, risiko pasar yang terjaga, serta risiko likuiditas yang membaik seiring *funding gap* yang menipis. Namun demikian, terdapat potensi peningkatan risiko kredit sejalan dengan indikasi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang menekan permintaan kredit, diikuti dengan peningkatan rasio NPL sejak awal tahun 2019.

### 1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pada triwulan III-2019, eksposur risiko terhadap aset perbankan sedikit melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ATMR pada September 2019 sebesar 8,11% (yoY) melambat dibandingkan September 2018 sebesar 9,53% (yoY). Perlambatan antara lain didorong oleh melambatnya ATMR operasional sejalan dengan risiko operasional yang tergolong moderat dengan didukung tata kelola yang terjaga baik.

Namun demikian, terjadi peningkatan pertumbuhan pada ATMR Kredit dan ATMR Pasar. ATMR Kredit pada periode laporan tumbuh 9,35% (yoY) sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,85% (yoY) sebagai dampak dari naiknya pertumbuhan nominal NPL. ATMR Pasar juga tumbuh meningkat yaitu 47,67% (yoY) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 13,97% (yoY). Peningkatan ATMR pasar seiring dengan naiknya ketidakpastian global yang berdampak pada volatilitas di pasar saham dan valuta asing.

**Tabel 21 Perkembangan ATMR**

Komponen ATMR (Rp T)	Sep '19	yoY		
		Sep '18	Jun '19	Sep '19
ATMR Kredit	4.872	7,85%	4,59%	9,35%
ATMR Operasional	825	9,91%	6,81%	6,92%
ATMR Pasar	95	13,97%	-17,40%	47,67%
<b>Total ATMR</b>	<b>5.788</b>	<b>9,53%</b>	<b>5,29%</b>	<b>8,11%</b>

Sumber: OJK, diolah

### 2. Risiko Kredit

Risiko kredit pada periode laporan tetap terjaga tercermin dari rasio NPL *gross* yang tercatat stabil dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,66%. Disamping itu, rasio NPL *net* tercatat menurun yaitu sebesar 1,18% pada September 2019 dibandingkan 1,22% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, perlu diperhatikan adanya potensi kenaikan risiko kredit kedepan yang diindikasikan oleh meningkatnya pertumbuhan nominal NPL sebesar 7,86% (yoY) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,09% (yoY), naiknya rasio *Loan at risk*<sup>17</sup> menjadi 7,96% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,63%, serta melambatnya pertumbuhan kredit yang

<sup>17</sup> *Loan at risk* merupakan kualitas kredit yang berpotensi untuk menjadi NPL (*Non Performing Loan*), terdiri dari kredit kualitas Dalam Perhatian Khusus (*Kolektabilitas 2*) dan restrukturisasi kredit kualitas Lancar (*restru Kolektabilitas 1*).

dipengaruhi tertekannya aktivitas usaha debitur seiring dengan melambatnya

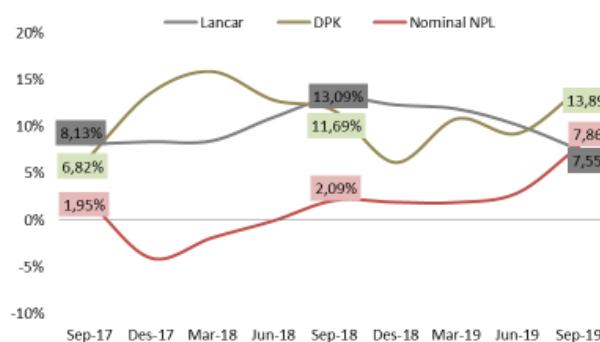
perekonomian global dan masih lemahnya harga komoditas global.

**Tabel 22 Perkembangan Kualitas Kredit**

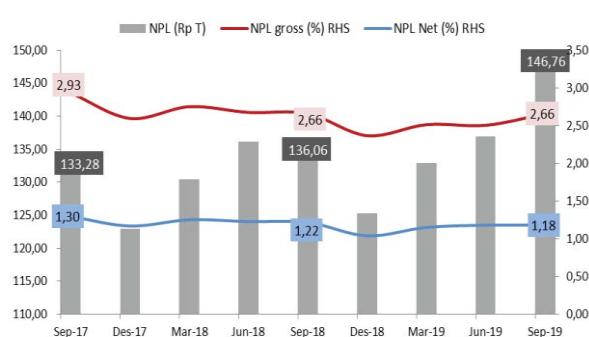
Kualitas Kredit (Rp T)	Sep '18	Jun '19	Sep '19	Porsi	qtq		yoY	
					Jun'19	Sep'19	Sep-18	Sep'19
1. Lancar	4.711	5.024	5.066	91,71%	3,30%	0,85%	13,09%	7,55%
- Non Restru	4.593	4.905	4.938	89,39%	3,25%	0,67%	13,51%	7,50%
- Restru	117	119	128	2,32%	5,56%	8,19%	-1,42%	9,28%
2. DPK	273	307	311	5,63%	4,05%	1,34%	11,69%	13,89%
3. Kurang Lancar	22	18	23	0,42%	12,14%	27,24%	-10,65%	5,62%
4. Diragukan	22	22	18	0,33%	-6,28%	-17,60%	19,93%	-17,28%
5. Macet	92	96	105	1,90%	3,72%	9,09%	1,96%	14,42%
Nominal NPL	136	137	147		2,98%	7,22%	2,09%	7,86%
Rasio NPL %	2,66%	2,50%	2,66%		-1	15	-28	0
Loan at Risk (Kual. 2 + Restru kual.1)	391	426	440		4,46%	3,25%	7,40%	12,50%
Rasio Loan at Risk %	7,63%	7,79%	7,96%		8	17	-38	33
<b>Total Kredit</b>	<b>5.120</b>	<b>5.468</b>	<b>5.524</b>		<b>3,33%</b>	<b>1,03%</b>	<b>12,69%</b>	<b>7,89%</b>

Sumber: SPI September 2019

**Grafik 25 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit**



**Grafik 26 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net**



Sumber: SPI September 2019

## 2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan jenis penggunaan, terjadi perbaikan kualitas kredit pada Kredit Investasi (KI) tercermin pada menurunnya rasio NPL KI dari 2,65% pada September 2018 menjadi 2,56% pada periode laporan. Sementara itu, terdapat peningkatan NPL pada Kredit Modal Kerja (KMK) dan KK (Kredit Konsumsi). NPL KMK dan KK masing-masing naik menjadi 3,25% dan 1,75% dari

3,20% dan 1,74% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan NPL pada KMK dan KK dipengaruhi oleh meningkatnya NPL pada sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit yang cukup besar antara lain pada sektor industri pengolahan dan rumah tangga yang juga diiringi oleh perlambatan kredit. Pertumbuhan KMK dan KK tercatat hanya sebesar masing-masing 5,94% (yoY) dan 6,82% (yoY) jauh melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun

lalu yaitu masing-masing sebesar 13,77% (yoY) dan 11,66% (yoY).

Berdasarkan kelompok bank, peningkatan NPL KMK utamanya terjadi pada BPD dengan NPL sebesar 8,65% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7,52%. Selain itu, NPL KI BPD juga cukup tinggi yaitu sebesar 5,37% namun sudah menurun dari tahun sebelumnya sebesar 7,27%. Tingginya NPL

KMK dan KI pada BPD antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan *monitoring*, serta *skills* dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemda. Adapun NPL KK BPD tergolong paling rendah dan menurun dari tahun sebelumnya 1,13% menjadi 0,99%.

**Tabel 23 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan**

Kredit (Rp T)	Sep '18	Jun '19	Sep '19	yoY	
				Sep '18	Sep '19
KMK	2.424	2.561	2.568	13,77%	5,94%
KI	1.267	1.404	1.430	11,83%	12,84%
KK	1.429	1.502	1.527	11,66%	6,82%
Total Kredit	5.120	5.467	5.524	12,69%	7,89%

Sumber: SPI September 2019

**Tabel 24 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan**

NPL Gross %	Sep '18	Jun '19	Sep '19	yoY	
				Sep '18	Sep '19
NPL KMK	3,20	3,12	3,25	-26	5
NPL KI	2,65	2,16	2,56	-60	-9
NPL KK	1,74	1,77	1,75	-3	1
Total NPL	2,66	2,50	2,66	-28	0

**Tabel 25 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank**

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK		
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK		Kredit (Rp M)	Porsi KI		Kredit (Rp M)	Porsi KK	
		Thdp Total	NPL (%)		Thdp Total	NPL (%)		Thdp Total	NPL (%)
BUMN	1.033.599	43,74	3,40	659.856	27,92	2,33	669.552	28,33	1,74
BUSN Devisa	1.113.088	50,68	2,94	595.266	27,10	2,65	487.971	22,22	2,16
BUSN Non Devisa	48.379	64,26	2,55	12.076	16,04	3,46	14.836	19,70	2,72
BPD	88.902	19,60	8,65	51.396	11,33	5,37	313.191	69,06	0,99
Campuran	125.271	65,10	2,84	40.729	21,17	4,25	26.425	13,73	2,34
KCBA	158.273	64,96	1,90	70.597	28,97	0,68	14.781	6,07	2,79
<b>TOTAL</b>	<b>2.567.513</b>	<b>46,48</b>	<b>3,25</b>	<b>1.429.921</b>	<b>25,88</b>	<b>2,56</b>	<b>1.526.756</b>	<b>27,64</b>	<b>1,75</b>

Sumber: SPI September 2019

## 2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Berdasarkan sektor ekonomi, perbaikan rasio NPL terbesar terdapat pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi dengan penurunan NPL dari tahun sebelumnya 3,01% menjadi 2,16%. Penurunan tersebut utamanya didorong oleh perbaikan pada subsektor transportasi, antara lain pada angkutan jalan seiring dengan perbaikan infrastruktur serta meningkatnya pertumbuhan kredit pada

subsektor dimaksud dari 15,65% (yoY) pada September 2018 menjadi 17,74% (yoY) pada periode laporan.

Sebaliknya, peningkatan rasio NPL terbesar terdapat pada sektor perikanan dengan rasio NPL pada tahun sebelumnya sebesar 2,20% meningkat menjadi sebesar 5,48%. Peningkatan didorong oleh pemburukan kualitas kredit pada subsektor penangkapan perikanan laut sebagai pengaruh dari pemburukan usaha industri perikanan

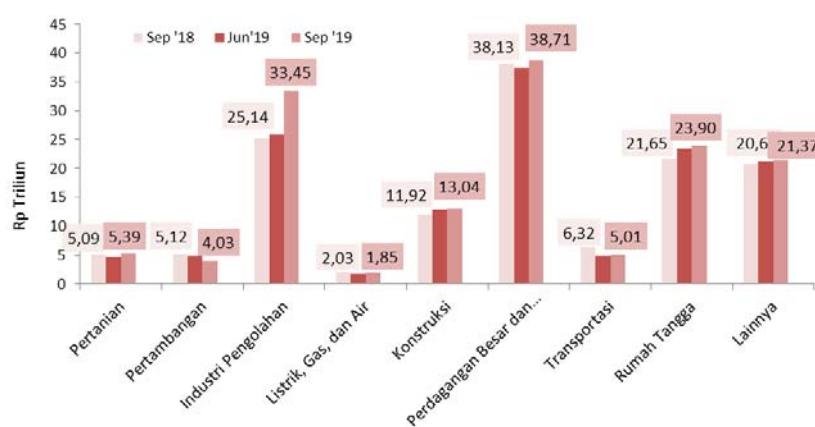
tangkap akibat perubahan iklim yang menurunkan hasil tangkapan ikan laut. Selain itu, adanya kebakaran kapal bermuatan besar di pelabuhan Benoa Bali pada pertengahan tahun 2018 juga berpengaruh pada penurunan hasil penangkapan ikan laut.

Selain itu, peningkatan NPL juga terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dari tahun sebelumnya 5,17% menjadi 6,87%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya tingkat okupansi hotel yang tercermin dari penurunan Tingkat

Penghunian Kamar (TPK) pada September 2018 sebesar 58,95% menjadi 53,52% pada September 2019 (BPS). Penurunan terjadi seiring dengan konsumen yang cenderung menahan konsumsinya ditengah gejolak perlambatan ekonomi global.

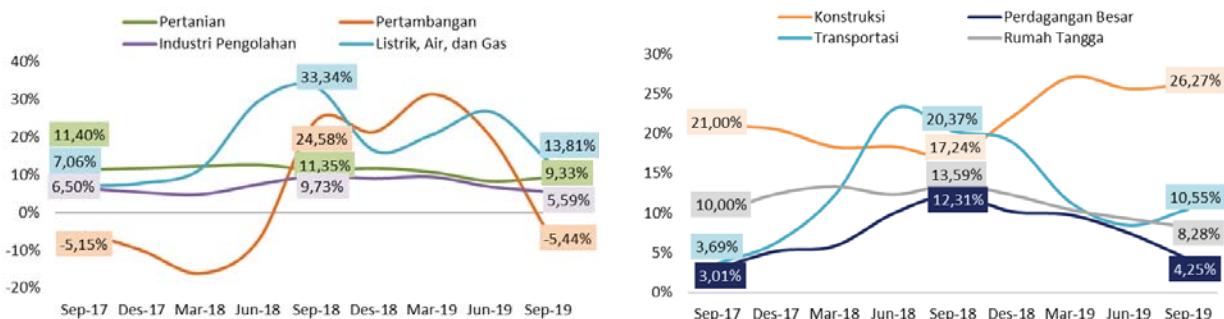
Perlambatan ekonomi global juga ikut mempengaruhi penurunan kegiatan usaha, antara lain tercermin dari naiknya NPL pada sektor rumah tangga untuk pemilikan Ruko dan Rukan yang meningkat dari tahun sebelumnya 5% menjadi 5,61%.

**Grafik 27 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi**

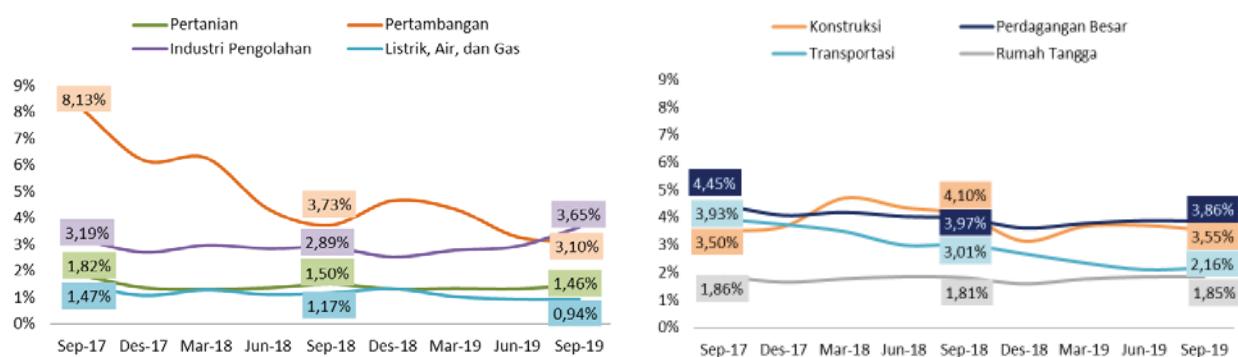


Sumber: SPI September 2019

**Grafik 28 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi**



Sumber: SPI September 2019

**Grafik 29 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi**

Sumber: SPI September 2019

### 2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, terdapat perbaikan NPL di wilayah Papua dan Maluku, Kalimantan dan Jawa. Rasio NPL pada ketiga wilayah tersebut masing-masing turun menjadi sebesar 2,64%; 2,89%; dan 2,53%.

Perbaikan NPL di wilayah Papua dan Maluku utamanya terdapat pada sektor pertambangan dengan penurunan rasio NPL sebesar 530 bps (yoY) yaitu dari 11,62% menjadi 6,32%. Perbaikan NPL sektor pertambangan pada wilayah tersebut sejalan dengan membaiknya kinerja perusahaan tambang di Maluku Utara serta meningkatnya penyaluran kredit tambang pada wilayah tersebut. Selain itu, penurunan NPL sektor konstruksi juga turut mendorong penurunan NPL di wilayah ini.

Perbaikan NPL di wilayah Kalimantan ditopang oleh penurunan rasio NPL pada sektor pertambangan, industri pengolahan,

perdagangan besar, dan transportasi. Sementara itu, perbaikan NPL di wilayah Jawa didorong oleh membaiknya kualitas kredit pada hampir seluruh sektor utamanya pada sektor konstruksi dan transportasi.

Meski demikian, terdapat hal yang perlu menjadi perhatian yaitu peningkatan rasio NPL di wilayah Sulawesi, yaitu dari tahun sebelumnya sebesar 3,60% menjadi 4,75%. Peningkatan didorong oleh kenaikan rasio NPL pada sektor industri pengolahan di wilayah tersebut dari tahun sebelumnya sebesar 2,87% menjadi 39,19%. Selain itu, NPL sektor konstruksi di wilayah Sulawesi juga tercatat masih sangat tinggi (berada di atas 5%) yaitu 15,12% namun sudah menurun dari tahun sebelumnya 21,67%. Penyumbang NPL terbesar sektor konstruksi di wilayah Sulawesi adalah Provinsi Gorontalo dengan rasio NPL sebesar 42,46%.

Grafik 30 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)



Sumber: SPI September 2019

Tabel 26 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi

	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Total
Jawa	1.45%	3.55%	3.36%	0.82%	2.49%	3.57%	2.06%	1.90%	2.53%
Sumatera	1.60%	3.13%	3.71%	4.58%	8.17%	5.29%	2.54%	1.65%	2.99%
Kalimantan	0.46%	2.95%	1.32%	4.99%	14.05%	4.24%	2.78%	2.10%	2.89%
Sulawesi	1.75%	1.83%	39.19%	0.25%	15.12%	4.68%	4.43%	1.98%	4.75%
Bali & Nusa Tenggara	3.50%	0.00%	3.48%	2.50%	6.82%	3.90%	4.17%	1.40%	2.47%
Papua & Maluku	4.81%	6.32%	3.57%	2.77%	8.00%	3.49%	4.07%	1.67%	2.64%
<b>Total</b>	<b>1.46%</b>	<b>3.10%</b>	<b>3.65%</b>	<b>0.94%</b>	<b>3.55%</b>	<b>3.86%</b>	<b>2.16%</b>	<b>1.85%</b>	<b>2.66%</b>

Sumber: SPI September 2019, diolah

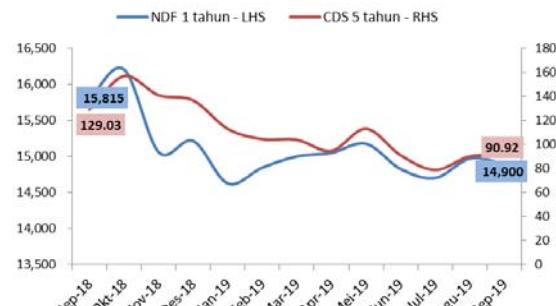
### 3. Risiko Pasar

Ditengah perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian perang dagang AS-Tiongkok yang masih berlanjut, tekanan pada pasar keuangan domestik pada triwulan III-2019 sedikit meningkat namun masih terjaga seiring dengan upaya Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menjaga kestabilan sistem keuangan Indonesia melalui kebijakan yang akomodatif. Terjadinya pasar keuangan domestik tercermin pada nilai tukar Rupiah terhadap USD yang menguat serta pasar SBN yang mencatatkan *net buy* pada triwulan berjalan meskipun kinerja pasar saham masih tertekan. Pada perbankan, risiko pasar yang terjaga terlihat dari rasio PDN yang masih berada pada level rendah serta potensi keuntungan bank

dari kenaikan nilai wajar portofolio SBN yang dimiliki.

Sejalan dengan itu, risiko pasar kedepan diperkirakan menurun yang terindikasi dari penurunan *Credit Default Swap* (CDS) dan *Non Deliverable Forward* (NDF) yang mengindikasikan membaiknya sentimen investor terhadap pasar keuangan Indonesia.

Grafik 31 Tren CDS dan NDF Indonesia

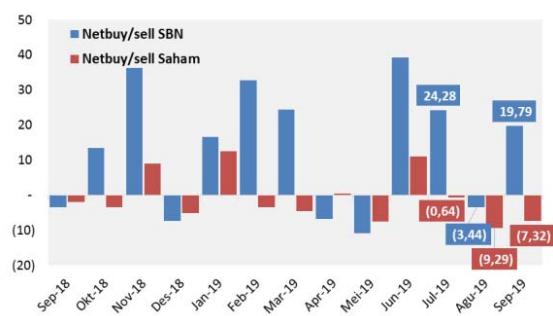


Sumber: Reuters

### 3.1 Risiko Nilai Tukar

Nilai tukar Rupiah terhadap USD pada akhir September 2019 tercatat sebesar Rp14.174/USD, terapresiasi 5,06% (yoY) dibandingkan tahun sebelumnya (akhir September 2018) yang berada pada level Rp14.929/USD. Penguatan nilai tukar antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya cadangan devisa yang tumbuh 8,26% (yoY) dan masuknya aliran dana asing (*capital inflow*) ke Indonesia terutama ke pasar SBN. *Capital inflow* ke pasar SBN tercermin pada investor non residen yang mencatatkan *net buy* selama triwulan III-2019 sebesar Rp40,63 triliun, meningkat dibandingkan *net buy* SBN pada triwulan sebelumnya sebesar Rp21,63 triliun. Sementara itu, pasar saham pada periode laporan masih tertekan seiring masih berlanjutnya ketidakpastian global. Hal tersebut tercermin pada investor asing yang mencatatkan *net sell* selama triwulan berjalan sebesar Rp17,24 triliun.

**Grafik 32 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia**

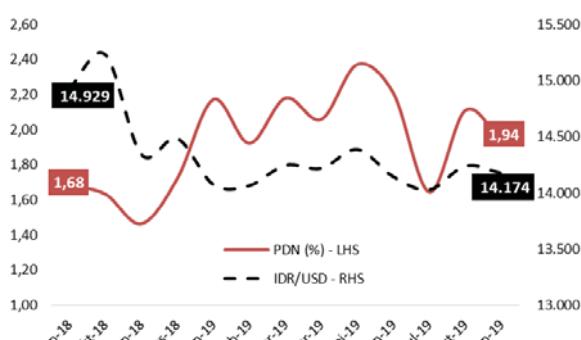


Sumber: DJPPR dan Market Bisnis

Penguatan nilai tukar Rupiah dapat meningkatkan risiko bank dengan PDN dalam posisi *long* (aset valas lebih besar dari kewajiban valas). Rasio PDN terhadap modal pada triwulan III-2019 meningkat menjadi 1,94% dibandingkan dengan 1,68% pada tahun sebelumnya sebagai akibat meningkatnya posisi *long* aset valas pada neraca perbankan. Namun demikian, rasio

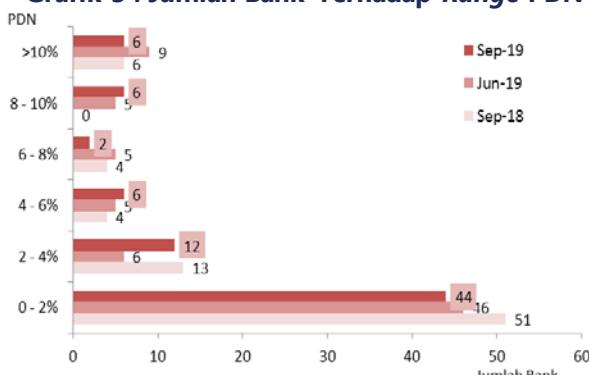
PDN tersebut masih terjaga rendah jauh dibawah *threshold* 20% yang menunjukkan eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank masih cukup rendah. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank (44 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%) dan tidak terdapat bank yang memiliki rasio PDN di atas 20%.

**Grafik 33 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar**



Sumber: SIP OJK dan Reuters

**Grafik 34 Jumlah Bank Terhadap Range PDN**



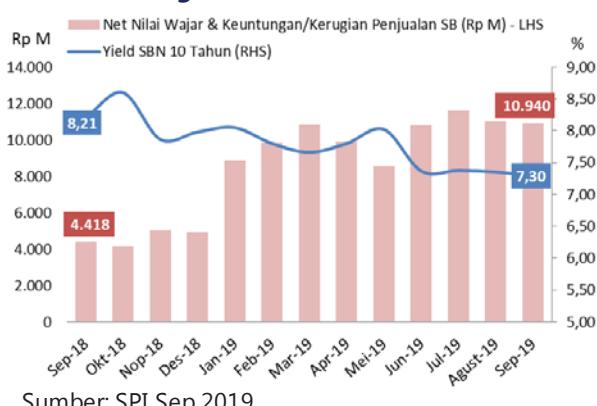
Sumber: SIP OJK

### 3.2 Risiko Suku Bunga

Pada periode laporan, risiko suku bunga yang bersumber dari portofolio *trading book* menurun tercermin dari naiknya nilai wajar surat berharga yang dimiliki bank seiring dengan penurunan suku bunga acuan yang diikuti penurunan *yield* surat berharga. Pada September 2019, *yield* SBN tenor 10 tahun turun 91 bps (yoY) menjadi 7,30% dari tahun sebelumnya 8,21%. Penurunan ini membuat nilai wajah surat berharga yang dimiliki bank

meningkat dari posisi September 2018 sebesar Rp4.418 miliar menjadi Rp10.940 miliar pada September 2019. Dengan demikian, selama satu tahun terakhir terdapat potensi keuntungan bank sebesar Rp6.522 miliar yang berasal dari portofolio *trading book*.

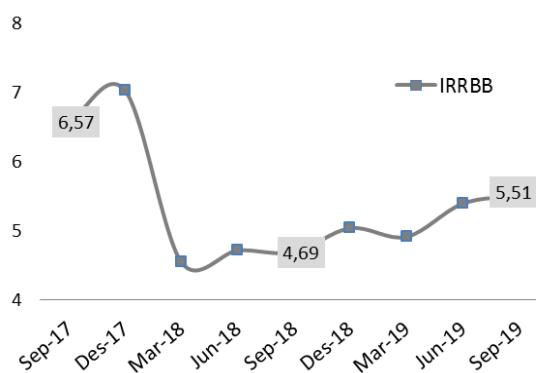
**Grafik 35 Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga dan Yield SBN 10 Tahun**



Sumber: SPI Sep 2019

Selain itu, risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* masih terjaga, tercermin dari *Interest Risk Rate in the Banking Book* (IRRBB) yang masih berada pada level rendah yaitu sebesar 5,51%, meskipun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,69%. Peningkatan IRRBB dipengaruhi oleh pertumbuhan kewajiban suku bunga tetap jangka panjang yang lebih besar dari pertumbuhan aset suku bunga tetap jangka panjang. Namun demikian, aset perbankan dengan suku bunga tetap jangka panjang masih lebih besar dibandingkan dengan kewajiban dengan suku bunga tetap jangka panjang, sehingga kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan masih memadai.

**Grafik 36 Perkembangan Parameter IRRBB**



Sumber: SIP September 2019

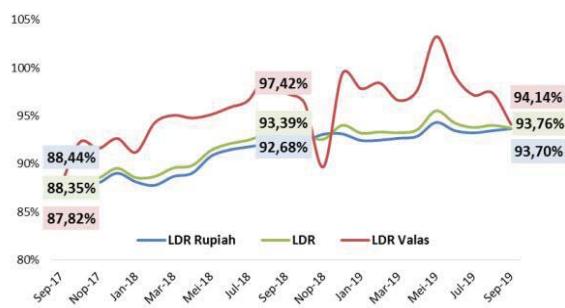
#### 4. Risiko Likuiditas

Pada triwulan berjalan, kondisi likuiditas perbankan masih terjaga dan memadai, tercermin dari LDR yang meskipun berada pada level yang tinggi namun *funding gap* mulai menyempit. Selain itu, terjaganya likuiditas perbankan juga tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih jauh di atas *threshold*, rasio LCR yang berada di atas 100% serta transaksi PUAB yang masih kondusif.

Pada September 2019, LDR perbankan tercatat sebesar 93,76% lebih tinggi dibandingkan posisi September 2018 sebesar 93,39%. Meski masih diatas 92%, LDR tersebut sudah mulai turun sejak pertengahan tahun 2019. Kenaikan LDR tersebut didorong oleh naiknya LDR rupiah sebesar 93,70% meningkat dibandingkan 92,68% pada periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan LDR valas menurun pada September 2019 sebesar 94,14% dibandingkan 97,42% pada September 2018. Meskipun masih cukup tinggi, kondisi likuiditas perbankan masih terjaga seiring dengan *funding gap* yang mulai menyempit.

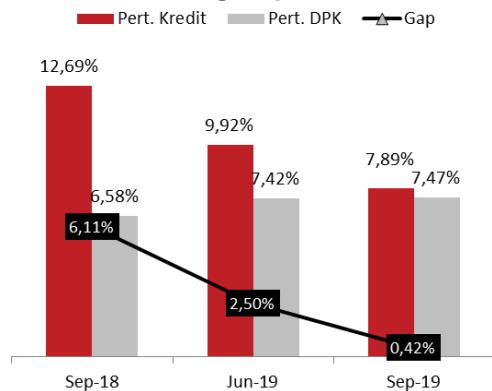
Seiring dengan meningkatnya alat likuid dan DPK, rasio AL/NCD dan AL/DPK juga masih terjaga jauh berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 92,20% dan 19,43%, meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 90,86% dan 19,16%.

**Grafik 37 LDR berdasarkan Valuta**



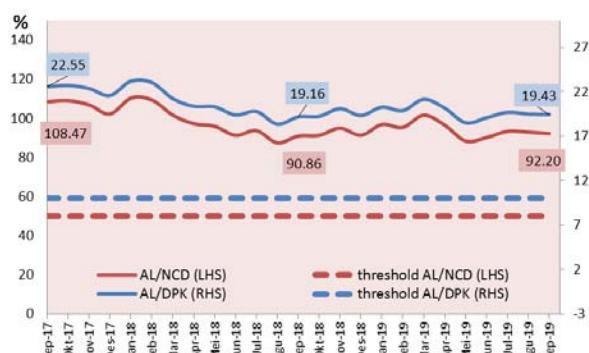
Sumber: SPI, diolah

**Grafik 38 Funding Gap Kredit dan DPK**



Sumber: SPI, diolah

**Grafik 39 AL/NCD dan AL/DPK**



Sumber: OJK, diolah

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tercermin

dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan yang berada di atas 100% yaitu sebesar 198,57% meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 183,30%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh HQLA yang meningkat seiring dengan naiknya portofolio kepemilikan surat berharga oleh bank. Berdasarkan kelompok bank, KCBA memiliki LCR tertinggi sebesar 259,96%, utamanya karena didukung oleh komponen CEMA yang berbentuk surat berharga serta relatif rendahnya NCO.

**Tabel 27 Perkembangan LCR Perbankan**

Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Sep-18	Jun-19	Sep-19
BUKU 3	148	165	181
BUKU 4	735	756	793
KCBA	80	83	88
Asing non KCBA	274	294	309
<b>Total HQLA</b>	<b>1,237</b>	<b>1,299</b>	<b>1,371</b>

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Sep-18	Jun-19	Sep-19
BUKU 3	111	116	115
BUKU 4	368	371	395
KCBA	38	33	34
Asing non KCBA	157	144	146
<b>Total NCO</b>	<b>675</b>	<b>665</b>	<b>690</b>

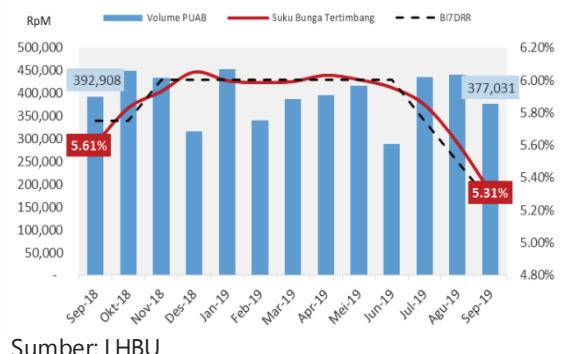
  

Kelompok	LCR (%)		
	Sep-18	Jun-19	Sep-19
BUKU 3	133.32%	142.25%	157.62%
BUKU 4	199.66%	203.88%	200.47%
KCBA	209.14%	251.50%	259.96%
Asing non KCBA	174.10%	203.72%	211.31%
<b>LCR Total</b>	<b>183.30%</b>	<b>195.44%</b>	<b>198.57%</b>

Sumber: OJK

Selain kecukupan alat likuid bank yang masih memadai, akses bank terhadap sumber likuiditas di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) juga cukup baik. Meskipun volume PUAB sedikit turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya namun suku bunga rata-rata tertimbang juga menurun. Penurunan suku bunga PUAB seiring dengan turunnya suku bunga acuan BI7DRR.

**Grafik 40 Perkembangan Suku Bunga PUAB**



Sumber: LHBu

## 5. Tata Kelola Perbankan

Penerapan tata kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG pada perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

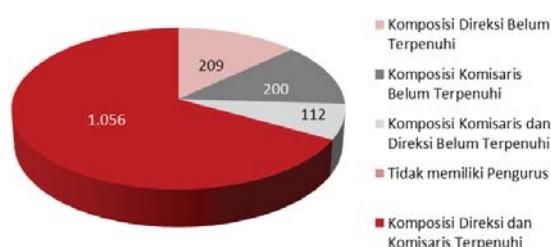
Penilaian tata kelola untuk bank umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sementara penilaian tata kelola untuk BPR dilakukan setiap triwulanan. Oleh karena itu, pada triwulan berjalan penerapan tata kelola yang dibahas adalah tata kelola BPR.

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2015, BPR wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Mempertimbangkan

variasi bisnis dan ukuran BPR yang beragam, dilakukan pembedaan kelompok BPR dalam penerapan *corporate governance*. Salah satu pertimbangan adalah bahwa semakin besar modal inti dan total aset maka semakin tinggi pula risiko BPR karena memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak. Hal tersebut berdampak pada kompleksitas risiko yang dihadapi BPR sehingga membutuhkan praktik tata kelola yang baik/GCG yang lebih memadai.

Pada triwulan III-2019, terdapat 66,96% atau sebanyak 1.056 BPR yang sudah memenuhi ketentuan jumlah keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang jauh berada di *remote area*, relatif kurang menariknya remunerasi, serta keterbatasan SDM yang memiliki sertifikasi profesi sebagaimana ketentuan berlaku. Dalam mendorong peningkatan tata kelola BPR, OJK secara aktif melakukan pembahasan langsung termasuk meningkatkan pemeriksaan serta pembinaan khususnya terhadap BPR yang belum memenuhi ketentuan GCG.

**Grafik 41 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris**



Sumber: OJK

# Pengaturan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab III

# Pengaturan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional

Pada periode laporan, OJK menerbitkan tiga ketentuan perbankan terkait penguatan kelembagaan BPR dan BPRS, pelaporan BPR serta penilaian tingkat kesehatan BPRS. Selain itu dalam rangka pengembangan pengawasan, OJK senantiasa memperkuat pengawasan melalui penyusunan pedoman dan SPO serta perumusan tools pengawasan berbasis TI.

### 1. Pengaturan Perbankan

#### 1.1 BPR

Pada triwulan III-2019, OJK menerbitkan dua ketentuan BPR, yaitu:

1. POJK Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
2. SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.

#### 1.2 Perbankan Syariah

Pada triwulan III-2019, OJK menerbitkan satu kebijakan yang khusus mengatur tentang perbankan syariah, yaitu POJK Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. POJK ini merupakan ketentuan konversi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (PBI Tingkat Kesehatan BPRS) yang tidak terdapat

perubahan substansi. POJK ini mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen. Dengan diberlakukan POJK ini maka PBI Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dinyatakan tidak berlaku.

### 2. Pengembangan Pengawasan Perbankan

#### 2.1 Bank Umum

Pengembangan pengawasan Bank Umum pada triwulan III-2019, mencakup antara lain:

1. Penguatan pengawasan berbasis Teknologi Informasi, berupa aplikasi OJK-BOX dan *Condensed Report*<sup>29</sup> dengan melakukan sosialisasi dan *capacity building* kepada pengawas dan Bank;
2. Penyusunan pedoman koordinasi untuk internal Pengawas Bank dengan satuan kerja yang memiliki fungsi investigasi

---

<sup>29</sup> Laporan yang berisi rasio utama terkait kondisi bank umum.

- Bank dalam menindaklanjuti penyimpangan ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Bank; dan
3. Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pengawasan APU dan PPT bagi bank umum untuk memperkuat standar pengawasan bank umum terkait APU dan PPT.

## 2.2 BPR

Pada triwulan III-2019, kegiatan pengembangan pengawasan BPR dan/atau BPRS yang telah dilakukan meliputi:

1. Penyusunan Rancangan SEDK tentang Perubahan atas SEDK Nomor 2/SEDK.03/2019 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program APU dan PPT Berdasarkan Risiko bagi BPR dan BPRS. Berdasarkan *mock interview* bersama TA IMF dalam rangka persiapan menghadapi MER FATF pada tahun 2020, salah satu yang menjadi perhatian adalah perbedaan *tools* penilaian sektor perbankan dengan sektor lainnya, sehingga diperlukan perubahan pada SEDK dimaksud dalam rangka penyeragaman formulasi penilaian tingkat risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dengan formulasi pada sektor Pasar Modal dan IKNB. Hingga saat ini, rancangan SEDK perubahan dimaksud sedang dalam proses finalisasi.
2. Pengembangan lanjutan bahan *user requirement* pengembangan Sistem Informasi Pengawasan BPR (SIP BPR) untuk modul perencanaan pengawasan BPR berdasarkan risiko. Bahan *user requirement* ini merupakan dasardalam

pengembangan sistem aplikasi SIP BPR modul perencanaan pengawasan BPR berdasarkan risiko.

3. Penyelesaian Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengawasan BPR. SPO dimaksud ditujukan untuk dapat menjadi petunjuk teknis bagi Pengawas BPR. Proses penyusunan dan pengkinian SPO akan dilakukan secara bertahap. Pada triwulan III-2019, SPO yang telah diselesaikan yaitu:
  - a. SPO terkait Ketentuan Laporan Bulanan BPR, Laporan Publikasi BPR, Laporan Tahunan BPR; dan
  - b. SPO terkait Rencana Bisnis BPR.

## 2.3 Perbankan Syariah

Pada triwulan III-2019, kegiatan pengembangan pengawasan perbankan syariah yang telah dilakukan yaitu:

1. Penyempurnaan proses pengawasan Bank Syariah yang terstandarisasi, meliputi:
  - a. Penerbitan SEDK Pedoman Pengawasan atas Pelaksanaan Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada 30 Agustus 2019.
  - b. Penyusunan Kriteria BPRS sebagai penyalur KUR.
2. Untuk menunjang sistem pelaporan dan pengawasan yang terotomasi, sedang dilakukan:
  - a. Proses *mapping* konversi data dari RBB format syariah ke RBB format konvensional.
  - b. *User Acceptance Test (UAT)* Laporan Bulanan BPRS.

# Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab IV

# Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan prudensial perbankan, OJK senantiasa memantau kepatuhan perbankan terhadap penerapan program APU/PPT dan memonitor ada tidaknya dugaan/kejadian Tipibank. Selain itu, OJK juga senantiasa meningkatkan pelayanan antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

### 1. Penegakan Kepatuhan Perbankan

#### 1.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Seiring dengan perkembangan industri perbankan, para pelaku tipibank (*fraudsters*) senantiasa berupaya mencari dan kemudian memanfaatkan kelemahan bank, baik dalam pemenuhan ketentuan (*compliance*), pengawasan yang ditetapkan, dan prosedur internal bank.

Selama triwulan III-2019, terdapat 13 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang terjadi pada 7 kantor bank (2 kantor

BU dan 5 kantor BPR). PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan untuk memastikan apakah dapat ditindaklanjuti dengan investigasi. Di samping itu, pada periode yang sama terdapat 3 PKP pada 2 kantor BPR yang masih dalam proses analisis untuk menentukan tindak lanjut penanganannya; 5 PKP pada 2 kantor bank (1 kantor BU dan 1 kantor BPR) yang dikembalikan kepada satker pengawasan sebelum dilakukan investigasi; dan 5 PKP pada 3 kantor bank (1 kantor BU dan 2 kantor BPR) yang diinvestigasi.

**Tabel 28 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan**

Tahapan Kegiatan	Triwulan III-2019					
	Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total	
	BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP
<b>1. PKP yang diterima</b>	2	5	4	9	7	13
<b>2. PKP dalam proses analisis *)</b>	0	2	0	3	2	3
<b>3. PKP yang dikembalikan sebelum investigasi</b>	1	1	2	3	2	5
<b>4. PKP yang diinvestigasi *)</b>	1	2	2	3	3	5
a. Persiapan dan/atau Proses Investigasi *)	0	1	0	2	1	2
b. Investigasi Selesai/Tindak Lanjut dalam Proses Pelimpahan ke Satker Penyidikan OJK	1	1	2	1	2	3
<b>5. Pelimpahan kepada Satker Penyidikan OJK *)</b>	3	4	3	9	7	12

\*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya  
Sumber: OJK

Adapun rincian penanganan PKP yang diinvestigasi yaitu 2 PKP pada 1 kantor BPR dalam proses Persiapan dan/atau Proses Investigasi dan 3 PKP pada 2 kantor bank (1 kantor BU dan 1 kantor BPR) Investigasi Selesai/Tindak Lanjut dalam Proses Pelimpahan ke Satuan Kerja Penyidikan. Sebagai tindak lanjut dari hasil investigasi, selama triwulan III-2019, terdapat pelimpahan 12 PKP pada 7 kantor bank (3 kantor BU dan 4 kantor BPR) kepada Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK. Berdasarkan hasil pelimpahan, pada triwulan III-2019 terdapat 12 kasus dugaan tipibank, diantaranya pada bidang perkreditan sebanyak 11 kasus dan bidang penyalahgunaan aset sebanyak 1 kasus. Pelaku dugaan tipibank tersebut didominasi oleh Direksi sebanyak 7 orang (2 orang Direksi BU dan 5 orang Direksi BPR) dan Pejabat Eksekutif sebanyak 7 orang (5 orang Pejabat Eksekutif BU dan 2 orang Pejabat Eksekutif BPR), selanjutnya dilakukan oleh 1 orang Komisaris, 1 orang Pemegang Saham, dan 1 orang Karyawan.

Mengingat penyebab dugaan tipibank pada umumnya bersumber dari internal bank seperti kelemahan pengawasan internal, kurangnya integritas pegawai, dan kelemahan sistem bank, maka manajemen bank perlu meningkatkan pengawasan melalui pelaksanaan *independent review* oleh SKAI, kaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya.

Selain itu, dalam upaya peningkatan pemahaman mengenai peran OJK dalam penanganan dugaan tipibank, manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank, serta penerapan strategi anti *fraud*, pada

triwulan III-2019 telah dilakukan sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan kepada industri perbankan (Bank Umum dan BPR) di provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa di Universitas Sriwijaya dan Universitas Muhammadiyah Palembang.

## **1.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi**

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan III-2019 terdapat 17 pemberian keterangan ahli dan 4 pemberian keterangan saksi. Sebanyak 17 Pemberian keterangan ahli tersebut merupakan pemenuhan atas 16 permintaan dari Kepolisian Negara RI (Polri) dan 1 permintaan dari Kejaksaan RI. Selain itu, terdapat 4 pemberian keterangan saksi sebagai saksi pelapor atas permintaan yang berasal dari Kejaksaan RI.

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

## **1.3 Penguatan Penerapan Program APU dan PPT**

OJK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur di Sektor Jasa Keuangan, berkomitmen penuh untuk terus mendorong penguatan pengawasan APU PPT oleh OJK dan penguatan penerapan

program APU PPT oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penguatan penerapan program APU PPT berbasis risiko oleh PJK selama triwulan III-2019, sebagai berikut:

1. *Keynote speaker* dan narasumber pada kegiatan sosialisasi dengan topik kesiapan industri perasuransian menghadapi MER FATF yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).
2. *Knowledge sharing session* terkait penerapan program APU PPT kepada para pelaku *FinTech*.
3. Penyelenggaraan *Workshop Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko* bagi BPR/BPRS.
4. Narasumber pada Bank Mandiri *Anti Money Laundering Leader Forum* Tahun 2019.
5. Narasumber pada Diskusi Panel "*Regulatory Landscape in Indonesia, Financial Crime Compliance Risks and Expectations for Financial Institutions*" pada Kegiatan *Correspondent Banking Academy* (CBA).
6. Pelatihan Pengembangan Kompetensi *Front Officer* BPR/S.

Dalam rangka penguatan pengawasan program APU PPT berbasis risiko dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. *In-House Training* Penerapan *Risk Based Approach* dalam Pengawasan Program

APU PPT dan Implementasi Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) Tahap 2.

2. Materi program APU PPT dan SIGAP pada *workshop* untuk pengawas BPR di wilayah Indonesia Timur.
3. *Workshop Certified AML Specialist (CAMS)*.
4. *Workshop implementasi SIGAP* untuk Pengawas OJK di wilayah Indonesia bagian Barat.
5. *Training of Trainers* Pengawasan Program APU PPT dengan narasumber dari OJK, AUSTRAC, Konsultan EY, dan Talkinc.

Memperhatikan bahwa dalam program APU PPT, PJK berkewajiban untuk melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar Proliferasi) termasuk kewajiban untuk menindaklanjuti dan mengelola daftar tersebut, OJK melakukan penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi kepada seluruh PJK. Pada triwulan III-2019, tidak terdapat penetapan atas Daftar Proliferasi, namun terdapat dua DTTOT sebagai berikut:

**Tabel 29 DTTOT pada Triwulan III-2019**

No.	No. DTTOT	Jumlah Daftar	
		Individu	Korporasi
1	DTTOT/P-3/92/VII/RES.6.1./2019	370 WNA dan 23 WNI yang bersumber dari ISIL (Daesh) and <i>Al-Qaeda Sanction List</i> dan <i>Taliban List</i>	84 entitas luar negeri dan 5 entitas dalam negeri yang diduga terkait dengan jaringan terorisme Al-Qaeda dan Taliban
		5 WNI yang bersumber dari pemerintah Indonesia	1 entitas dalam negeri yang bersumber dari pemerintah Indonesia
2	DTTOT/P-3a/96/VIII/RES.6.1./2019	Bertambah 2 orang WNA yang bersumber dari ISIL (Daesh) and <i>Al-Qaeda Sanction List</i>	

Sumber: Kepolisian RI

**Box. 2 Penerbitan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan**

Pada tanggal 30 September 2019, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh:

- Komitmen Indonesia untuk memenuhi standar internasional terkait APU PPT
  - a. Hasil *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia oleh *Asia Pacific Group on Money Laundering* tahun 2017/2018 yang memuat beberapa *key deficiencies* dan rekomendasi pemenuhan *deficiencies* tersebut.
  - b. Hasil *Second Round Review on Exchange of Information on Request for Tax Purposes* (EOIR) yang memuat rekomendasi untuk memastikan bahwa informasi mengenai *Beneficial Owner* dari seluruh nasabah wajib diidentifikasi dan diverifikasi oleh Penyedia Jasa Keuangan.
- Persiapan menghadapi MER Indonesia oleh *Financial Action Task Force* (FATF) tahun 2019/2020 sebagai syarat keanggotaan penuh Indonesia pada FATF; dan
- Penerbitan Peraturan Bersama Menlu RI, Kapolri, Kepala PPATK, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Adapun pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam POJK perubahan tersebut mencakup: (a) kewajiban bagi PJK untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal antara lain pemeliharaan data, identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas, dan pemblokiran secara serta merta; (b) penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang mengacu pada *National Risk Assessment* dan *Sectoral Risk Assessment*; (c) penyempurnaan ketentuan verifikasi dan penatausahaan dokumen pada kegiatan transfer dana; (d) dukungan percepatan penyampaian informasi kepada penegak hukum; serta (e) penetapan batas/*threshold* pengenaan sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan.

## 2. Kelembagaan Perbankan

### 2.1 Bank Umum

#### 2.1.1 Perizinan

Pada triwulan III-2019, telah diselesaikan 115 perizinan perubahan jaringan kantor Bank Umum di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan status bank, perubahan nama bank, dan merger bank umum. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 41 perizinan dan penutupan Kantor Cabang (KC) sebanyak 20 perizinan.

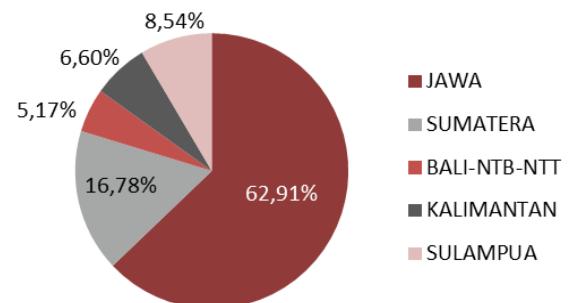
Perizinan merger bank yang telah disetujui yaitu merger Bank Mitraniaga ke dalam Bank Agris pada 14 Agustus 2019. Selain itu, terdapat dua proses perubahan nama bank yang disetujui pada triwulan III-2019, yaitu: (i) Perubahan nama Bank Dinar Indonesia menjadi Bank OKE Indonesia, dan (ii) Perubahan nama Bank Agris menjadi Bank IBK Indonesia.

#### 2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2019, terdapat 137.358 jaringan kantor BUK dari 96 BUK. Jaringan kantor tersebut berkurang 1.913 unit dari triwulan sebelumnya yang berjumlah 139.271 jaringan kantor. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh ATM/ADM

sebanyak 103.613 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terbanyak terdapat pada ATM/ADM yang berkurang 1.627 kantor, diikuti penurunan pada KCP sebanyak 232 kantor. Sementara itu, terdapat peningkatan pada *payment point* sejumlah 43 unit dan Kantor Pusat Non Operasional sebanyak 2 kantor.

**Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BUK**



Sumber: LKPBU

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 86.407 jaringan kantor (62,91%), diikuti pulau Sumatera 23.049 (16,78%), Sulampua 11.735 (8,54%), Kalimantan 9.065 (6,60%), dan Bali-NTB-NTT 7.102 (5,17%). Secara umum, jaringan kantor menurun pada semua wilayah, dengan penurunan terbesar terdapat di wilayah Jawa yang berkurang sejumlah 1.209 jaringan kantor utamanya berupa pengurangan ATM/ADM sebanyak 1.056 unit.

**Tabel 30 Jaringan Kantor BUK**

JARINGAN KANTOR	2019 TW II	2019 TW III
Kantor Pusat Operasional	47	46
Kantor Pusat Non Operasional	52	54
Kantor Cabang Bank Asing	8	8
Kantor Wilayah	172	171
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.865	2.852
Kantor Cabang (Luar Negeri)	1	1
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	25	25
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	16.001	15.769
Kantor Kas	10.280	10.254
Kantor Fungsional	1.062	1.029
<i>Payment Point</i>	2.080	2.123
Kas keliling/kas mobil/kas terapung	1.424	1.399
Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 8,9,10 *)	12	12
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri	2	2
<b>ATM/ADM</b>	<b>105.240</b>	<b>103.613</b>
<b>TOTAL</b>	<b>139.271</b>	<b>137.358</b>

Sumber: OJK

### **2.1.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)**

Dalam rangka menciptakan industri perbankan yang sehat, terdapat 3 (tiga) besaran kegiatan yang dilakukan yaitu memperbaiki kondisi keuangan bank, penerapan tata kelola bank yang baik, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Dengan demikian, pemilik, pengelola/pengurus bank harus memiliki integritas serta komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan maupun pengembangan aktivitas bank agar tercipta industri perbankan maupun individual bank yang sehat dan efisien. Selain itu, pengelolaan bank memerlukan

SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Dalam kaitan tersebut, dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan (FPT New Entry) terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang efektif dan proses wawancara yang efisien.

Pada triwulan III-2019, dari 94 permohonan terdapat 47 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 38 calon yang telah dinyatakan lulus sebagai PSP/PSPT, Dewan Komisaris, dan Direksi BUK berdasarkan SK FPT, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, terdapat 1 permohonan yang tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan.

**Tabel 31 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK**

Pemohon FPT	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Tidak ditindaklanjuti	TW III 2019
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	2	-	5	-	-	7
Dewan Komisaris	18	1	7	-	-	26
Direksi	27	4	26	3	1	61
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>94</b>

Sumber: OJK

## 2.2 Bank Syariah

### 2.2.1 Perizinan

Pada triwulan III-2019, OJK menerima 19 permohonan perizinan terkait perbankan syariah, yaitu:

- 4 permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan rincian 1 proses telah disetujui, dan 3 lainnya masih dalam proses penyelesaian;
- 2 permohonan izin usaha BPRS, dengan rincian 1 izin usaha BPRS telah disetujui dan 1 lainnya masih dalam proses penyelesaian;
- 6 permohonan perubahan kegiatan usaha dari BPR konvensional menjadi BPR Syariah (konversi) masih dalam proses penyelesaian;
- 1 permohonan pemisahan (*spin off*) masih dalam proses;
- 2 permohonan merger dan/atau akuisisi Bank Umum Syariah (BUS) dan 1 permohonan merger dan/atau akuisisi BPRS masih dalam proses;
- 1 permohonan perubahan nama BUS masih dalam proses; dan
- 2 permohonan pencabutan izin usaha, dengan rincian 1 pencabutan izin usaha yang telah selesai terhadap PT BPRS Safir Bengkulu dan 1 permohonan masih dalam proses penyelesaian.

Terkait pengembangan jaringan kantor perbankan syariah, terdapat 25 permohonan jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor dan pemindahan alamat kantor dengan hasil 12 permohonan telah disetujui dan 13 permohonan masih dalam proses penyelesaian.

*Service Level Agreement* (SLA) proses perizinan perbankan syariah berbeda-beda pada setiap jenis perizinannya. Sebagai contoh, SLA untuk perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) adalah 30 hari kerja sejak persyaratan dokumen dinyatakan lengkap. Rata-rata realisasi SLA pada triwulan III-2019 untuk proses PKK Direksi dan Komisaris Bank Syariah adalah 6 hari kerja.

Untuk perizinan pengembangan jaringan kantor, SLA terhitung 14 hari kerja setelah persyaratan dokumen dinyatakan lengkap. Rata-rata untuk perizinan pembukaan kantor baru adalah 3 hari kerja, penutupan jaringan kantor 2 hari kerja, dan pemindahan alamat kantor 3 hari kerja.

Sementara itu, SLA proses persetujuan izin prinsip pendirian dan izin usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selama 40 hari kerja sejak persyaratan dokumen dinyatakan lengkap, satu proses persetujuan prinsip pendirian yang telah disetujui adalah 5 hari

kerja, dan satu proses persetujuan izin usaha yang disetujui adalah 5 hari kerja. Sementara itu, untuk proses pencabutan izin usaha BPRS selama 40 hari kerja, dengan realisasi 5 hari kerja.

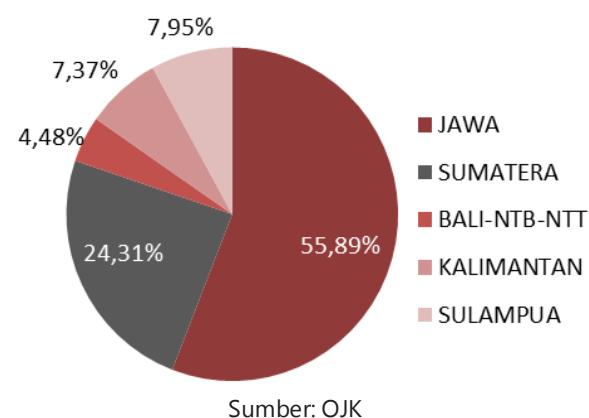
### 2.2.2 Jaringan Kantor

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan 360 jaringan kantor BUS menjadi 12.464 unit. Peningkatan jaringan kantor terbanyak terdapat pada Layanan Syariah/Office Channeling yang bertambah 251 unit. Sementara itu, terdapat pengurangan 4 Kantor Kas dan 2 unit kas keliling dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Sebaran jaringan kantor BUS sebagian besar masih berada di wilayah Jawa (55,89%, 6.966 kantor), diikuti Sumatera (24,31%, 3.030

kantor), Sulampua (7,95%, 991 kantor), Kalimantan (7,37%, 919 kantor), dan Bali-NTB-NTT (4,48%, 558 kantor). Semua wilayah mengalami peningkatan jaringan kantor dengan peningkatan terbanyak berada di wilayah Jawa yang bertambah 255 jaringan kantor, utamanya dalam bentuk Layanan Syariah/Office Channeling bertambah sebanyak 187 unit.

**Grafik 43 Penyebaran Jaringan Kantor BUS**



**Tabel 32 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah**

JARINGAN KANTOR	2018		2019		
	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III
Kantor Pusat Bank Umum	14	14	14	14	14
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	612	616	618	619	622
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	1.335	1.348	1.364	1.374	1.386
Kantor Kas	243	253	256	261	257
Unit Usaha	22	22	22	22	22
Payment Point	2.487	2.540	2.574	2.608	2.682
Kas keliling/kas mobil/kas terapung	174	179	183	183	181
ATM/ADM	2.944	2.969	2.971	2.952	2.978
Layanan Syariah/Office Channeling (di KC/KCP Konvensional)	3.368	4.030	4.068	4.071	4.322
<b>TOTAL</b>	<b>11.199</b>	<b>11.971</b>	<b>12.070</b>	<b>12.104</b>	<b>12.464</b>

Sumber: OJK

### 2.2.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)

Selama triwulan III-2019, dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan *New Entry* terhadap 21 calon pengurus perbankan syariah dan 2 calon Dewan

Pengawas Syariah (DPS). Hasil penilaian yaitu, untuk calon pengurus bank terdapat 2 calon yang disetujui, 1 calon ditolak karena belum memenuhi persyaratan, dan 18 calon masih dalam proses penyelesaian.

Sementara itu, 2 calon DPS masih dalam proses penyelesaian.

**Tabel 33 FPT Calon Pengurus dan DPS Perbankan Syariah**

Subjek	Ditolak/Belum			Total Permohonan
	Disetujui	Memenuhi Syarat	Proses	
Pengurus Bank	2	1	18	21
DPS	0	0	2	2
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>23</b>

Sumber: OJK

## 2.3 BPR

### 2.3.1 Perizinan

Pada triwulan III-2019, terdapat tiga jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui yaitu pendirian BPR, proses merger dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Izin pendirian BPR telah diberikan kepada PT BPR Modern Makassar.
- b) 3 proses Merger, yaitu pada:
  - i. PD BPR Beber, PD BPR Cirebon Selatan, PD BPR Ciwaringin, PD BPR Gegesik, PD BPR Kapetakan dan PD BPR Klangenan ke dalam PD BPR Astanajapura.
  - ii. PT BPR Sumber Ekonomi, PT BPR Arthamutiara Permai, PT BPR Polin Jaya, PT BPR Nauli Dhanaraya, PT BPR Mustika Permai, PT BPR Dipon Sejahtera, PT BPR Sahat Sentosadan PT BPR Sehat Ekonomi ke dalam PT BPR Sinar Mas Pelita; dan
  - iii. PD BPR Sumber, PD BPR Susukan,PD BPR Plumpon, PD BPR Cirebon Barat, PD BPR Cirebon Utara, PD BPR Karangsembung, PD BPR Lemahabang, PD BPR Arjawinangun, PD BPR Weru, PD

BPR Palimanan dan PD BPR Waled ke dalam PD BPR Babakan.

- c) Pencabutan Izin Usaha PT BPR Efita Dana Sejahtera dan PT BPR Calliste Bestari.

### 2.3.2 Jaringan Kantor

Jumlah BPR pada periode laporan sebanyak 1.578 BPR, berkurang dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.598 BPR. Pengurangan jumlah BPR utamanya terjadi pada BPR dengan kelompok aset Rp1-5 Miliar (16 bank) dan kelompok aset Rp5-10 Miliar (22 bank). Berkurangnya jumlah BPR utamanya disebabkan konsolidasi yang tercermin dari bertambahnya jumlah BPR kelompok aset >Rp 10 Miliar sebanyak 17 bank.

Pada triwulan III-2019, 1.578 BPR tersebut memiliki 14.943 jaringan kantor yang 6.287 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan 3 BPR dan 8 kantor BPR, sementara jaringan ATM dan *payment point* BPR meningkat masing-masing sebesar 2 unit dan 15 jaringan.

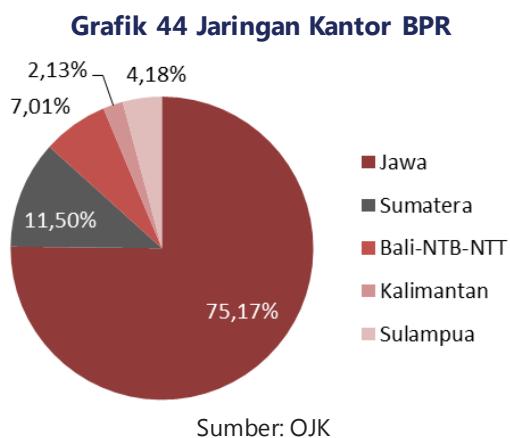
**Tabel 34 Jaringan Kantor BPR**

JARINGAN KANTOR	2018		2019
	TW III	TW II	TW III
- Kantor Pusat (KP)	1.598	1.581	1.578
- Kantor Cabang (KC)	1.674	1.703	1.710
- Kantor Kas (KK)	2.970	3.011	2.999
- ATM	224	182	184
<i>- Payment Point</i>	8.866	8.457	8.472
<b>TOTAL</b>	<b>15.332</b>	<b>14.934</b>	<b>14.943</b>

Sumber: OJK

Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 75,17% (4.726 kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 11,50% (723

kantor). Pengurangan kantor BPR sebagian besar terdapat di wilayah Nusa Tenggara Barat, sementara di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Bali masing-masing berkurang sebanyak 1 BPR. Selain itu, terdapat 1 penambahan BPR di wilayah Sulawesi Selatan yang telah disetujui selama triwulan III-2019.



### 2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (FPT New Entry)

Pada triwulan III-2019, telah dilakukan FPT New Entry kepada 310 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 256 calon (82,58% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, sementara 54 calon yang tidak disetujui (tidak lulus).

Sementara untuk BPRS, pada triwulan III-2019, telah dilakukan FPT New Entry kepada 36 calon Direksi dan Komisaris BPRS, dengan hasil terdapat 31 calon (86,11% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi dan Komisaris, sementara 5 calon lainnya tidak disetujui (tidak lulus).

**Tabel 35 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR**

Pemohon FPT	TW III 2019		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	140	45	185
Komisaris	90	9	99
PSP	26	-	26
<b>Jumlah</b>	<b>256</b>	<b>54</b>	<b>310</b>

Sumber: OJK

**Tabel 36 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS**

Pemohon FPT	TW III 2019		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	13	3	16
Komisaris	15	2	17
PSP	3	-	3
<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>36</b>

Sumber: OJK

# Koordinasi Antar Lembaga

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab V

# Koordinasi Antar Lembaga

**Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, koordinasi dengan lembaga-lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus dilakukan. Selain itu, OJK juga berkoordinasi dengan PPATK dan lembaga terkait dalam implementasi dan penguatan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan.**

### 1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan

#### 1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengadakan rapat berkala pada 31 Oktober 2019 di Bank Indonesia, Jakarta. Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam rapat ini, KSSK membahas agenda utama yaitu asesmen kondisi stabilitas sistem keuangan triwulan III-2019.

Rapat KSSK menyimpulkan stabilitas sistem keuangan triwulan III-2019 tetap terkendali di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian global. Ketidakpastian ini masih dipengaruhi ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok, meskipun pada Oktober 2019 sedikit mereda. Perkembangan ini menyebabkan penurunan volume perdagangan dan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia diikuti dengan melemahnya harga komoditas dan tekanan inflasi. Berbagai negara merespons perkembangan ini dengan melonggarkan kebijakan moneter dan memberikan stimulus fiskal, yang kemudian mendorong

masuknya aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi masih tetap baik meskipun kontraksi kinerja ekspor perlu mendapat perhatian karena berdampak pada kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) di triwulan III-2019 diperkirakan membaik didukung oleh surplus transaksi modal dan finansial yang tetap besar serta defisit transaksi berjalan yang terkendali. Cadangan devisa masih berada jauh di atas standar kecukupan internasional. Kinerja NPI yang membaik berdampak pada nilai tukar rupiah yang menguat. Sementara itu, inflasi terkendali pada level yang rendah dan stabil di dalam target 3,5+1%. Ketahanan ekonomi yang terjaga pada gilirannya mendukung stabilitas sistem keuangan.

Stabilitas sistem keuangan yang terkendali didukung ketahanan perbankan yang terjaga, likuiditas yang memadai, serta pasar uang yang stabil. Hal ini tercermin dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang tinggi dan risiko kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) yang tetap rendah. Kecukupan likuiditas tetap baik, tergambar dari rasio Alat Likuid

terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi. Perkembangan ini berkontribusi pada penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit yang searah dengan pelonggaran suku bunga kebijakan moneter.

Koordinasi kebijakan KSSK yang terus diperkuat berdampak positif pada stabilitas sistem keuangan yang tetap baik. Koordinasi kebijakan diarahkan untuk mempertahankan stabilitas sistem keuangan sehingga tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Selain itu, sinergi kebijakan juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan eksternal melalui berbagai upaya meningkatkan ekspor barang dan jasa, serta menarik aliran masuk modal asing, termasuk penanaman modal asing.

BI memperkuat bauran kebijakan akomodatif dengan menurunkan suku bunga kebijakan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 100 bps sejak Juli hingga Oktober 2019. Hal ini sejalan dengan prakiraan inflasi yang terkendali dan imbal hasil investasi keuangan domestik yang tetap menarik, serta sebagai langkah preemptive untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah kondisi ekonomi global yang melambat. BI juga melakukan relaksasi kebijakan makroprudensial. Pertama, meningkatkan kapasitas penyaluran kredit perbankan melalui pelonggaran pengaturan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)/RIM Syariah. Kedua, mendorong permintaan kredit pelaku usaha melalui pelonggaran ketentuan rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV), termasuk tambahan keringanan rasio LTV/FTV untuk

kredit/pembiayaan properti dan uang muka Kredit Kendaraan Bermotor yang berwawasan lingkungan. Selain itu, kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan pendalaman pasar keuangan juga terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas belanja dan menjaga pelaksanaan program-program prioritas agar APBN mampu memberikan daya dorong yang optimal bagi perekonomian. Pemerintah telah mengantisipasi potensi pelebaran defisit fiskal yang mungkin terjadi dan mempertimbangkan secara cermat beberapa opsi pendanaan yang dapat diambil, baik yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), penarikan pinjaman tunai, maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Dalam hal ini, Pemerintah akan mengedepankan prinsip efisiensi dan kehati-hatian dalam pengelolaan utang dengan tetap mengendalikan rasio utang dalam batas aman.

Untuk melengkapi insentif fiskal dan moneter, OJK akan terus mengoptimalkan kontribusi sektor jasa keuangan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan ketahanan sektor jasa keuangan. OJK akan terus memantau transmisi kebijakan moneter di pasar dan lembaga jasa keuangan, dimana saat ini suku bunga telah berada dalam tren yang menurun. Upaya lainnya dilakukan dengan mempertajam kebijakan dan insentif yang telah dikeluarkan dalam rangka pendalaman pasar keuangan, peningkatan akses keuangan, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil,

serta mendukung upaya pembiayaan pada sektor produktif yang prospektif dengan tetap memperhatikan aspek prudensial. Di sisi lain, OJK juga terus melakukan penyempurnaan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan. Ke depan, OJK akan senantiasa memantau dinamika perkonomian global dan berupaya memitigasi dampaknya terhadap kinerja sektor jasa keuangan dengan mengeluarkan langkah-langkah dan kebijakan yang dibutuhkan pasar secara tepat waktu dan terukur.

Merespons tren penurunan suku bunga simpanan yang terjadi secara bertahap pasca penurunan suku bunga kebijakan moneter serta kondisikuiditas perbankan yang relatif membaik, LPS pada periode September 2019 menurunkan kembali tingkat bunga penjaminan pada bank umum dan BPR masing-masing 25 bps menjadi sebesar 6,50% dan 9,0% untuk Rupiah sementara untuk valuta asing menjadi sebesar 2,00%. Mempertimbangkan bahwa proses penyesuaian suku bunga simpanan masih berlangsung, LPS akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan Tingkat Bunga Penjaminan sesuai dengan perkembangan suku bunga simpanan dan hasil asesmen atas kondisi ekonomi makro, likuiditas perbankan serta stabilitas sistem keuangan. KSSK berencana akan menyelenggarakan rapat berkala kembali pada bulan Januari 2020.

## **1.2 Bank Indonesia (BI)**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk

berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) BI-OJK. Pada triwulan III-2019, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi antara lain terkait:

- a. Penyempurnaan ketentuan operasional terkait Posisi Devisa Neto (PDN);
- b. Integrasi pelaporan;
- c. Pertukaran data sistem pembayaran perbankan;
- d. Pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- e. *Capacity building* terkait *Non Banking Financial Institution (NBFI) Surveillance Tools and Instruments*;
- f. Pendalaman analisis stabilitas dan ketidakseimbangan keuangan berdasarkan *Financial Account and Balance Sheet* Indonesia Triwulan I-2019;
- g. Penyusunan kajian bersama BI-OJK;
- h. Pembahasan mekanisme implementasi ketentuan Utang Luar Negeri (ULN) bank;
- i. Digitalisasi perbankan;
- j. Pengaturan terkait Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan *Central Clearing Counterparty* Suku Bunga Nilai Tukar (CCP SBNT);
- k. *Sharing* hasil asesmen BI di sektor IKNB dan Pasar Modal;
- l. Pembahasan hasil asesmen *Banking Industry Rating* oleh BI posisi Juni 2019; dan
- m. Pembahasan terkait *fintech lending*.

Selain itu, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan BI sesuai dengan UU PPKSK. Sebagai tindak lanjut implementasi dari UU PPKSK, koordinasi yang dilakukan antara OJK dan BI pada triwulan III-2019 meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan baik oleh OJK maupun BI;
- b. Pemeriksaan bank oleh BI;
- c. Pertukaran data rutin antara OJK dan BI; dan
- d. Monitoring kondisi likuiditas industri perbankan.

Pada triwulan III-2019 juga telah diadakan *High Level Meeting* (HLM) BI-OJK yang melibatkan Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK dan Anggota Dewan Gubernur (ADG) BI yang membahas tentang *full implementation Central Bank Money* (CeBM).

### **1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Selain terdapat pada amanat UU PPKSK, kerjasama dan koordinasi antara OJK dan LPS tertuang dalam Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS yang telah diperbarui pada 28 Januari 2019. Pada triwulan III-2019, telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS meliputi:

- a) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi OJK dan LPS termasuk penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pertukaran informasi dan/atau data yang merupakan salah satu amanat NK OJK-LPS;
- b) Koordinasi dalam rangka penyusunan *pilot project Resolution Plan*;
- c) Pembahasan Rancangan PLPS tentang *Single Customer View (SCV)*; dan
- d) Pertukaran data OJK-LPS hasil investigasi bank dalam investigasi.

## **2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT**

OJK secara aktif melakukan kerjasama sebagai bentuk sinergi dengan berbagai lembaga terkait dan juga asosiasi-asosiasi sektor jasa keuangan untuk membahas penguatan penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan.

Koordinasi kelembagaan merupakan bagian penting dalam penguatan rezim APU PPT di Indonesia. Dalam rezim APU PPT nasional telah dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menkopolhukam dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK merupakan salah satu anggota pada Komite TPPU.

Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite TPPU atau koordinasi bilateral antar lembaga. Selama triwulan III-2019, koordinasi kelembagaan bidang APU PPT dilakukan OJK dengan beberapa Kementerian/Lembaga seperti:

- a) PPATK (*joint audit* terhadap 3 BPD, Perjanjian Kerja Sama (PKS), *Sectoral Risk Assessment* (SRA), pelatihan);
- b) Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan *Press Release* kasus TPPU;
- c) Kementerian Sekretariat Negara terkait pembahasan perubahan Peraturan Pemerintah terkait pihak pelapor dalam rezim APU PPT Indonesia;
- d) Direktorat Jenderal Pajak terkait pengawasan kepatuhan *due diligence* dalam rangka pemenuhan standar *automatic exchange of information for tax purposes*;

- e) Pemerintah Amerika melalui program USAID Cegah;
- f) *Courtesy meeting* dengan Islamic Development Bank; dan
- g) *Courtesy meeting* dengan Congressman Stephen Lynch, U.S. House of Representatives Oversight and Reform Committee.

Halaman ini sengaja dikosongkan

# Asesmen Lembaga Internasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab VI

# Asesmen Lembaga Internasional

Dalam rangka mempersiapkan *on-site visit* dan *plenary meeting* MER FATF Indonesia pada tahun 2020, persiapan yang dilakukan OJK difokuskan pada penyusunan jawaban atas kuesioner efektivitas implementasi rekomendasi FATF (kuesioner Immediate Outcomes/IO) yang relevan dengan tugas dan fungsi OJK. Selain itu, pada periode laporan juga telah dilaksanakan FATF Indonesia *Country Training – Pre Mutual Evaluation Workshop* yang bertujuan membahas metodologi penilaian MER.

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa fora internasional, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global dengan ikut serta mengadopsi standar internasional. Sejalan dengan itu, OJK bekerjasama dan berkolaborasi dengan lembaga internasional yang berperan dalam melaksanakan asesmen terhadap kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia (SJKI). Pada triwulan III-2019, asesmen internasional terkait SJK yang dilaksanakan adalah *Mutual Evaluation Review* (MER).

### **1. Mutual Evaluation Review (MER)**

Indonesia tengah memulai proses *Mutual Evaluation Review* (MER) untuk menjadi anggota *Financial Action Task Force* (FATF) dengan agenda *on-site visit* pada bulan Maret 2020 dan hasilnya akan dibahas pada FATF *Plenary Meeting* bulan Oktober 2020. MER FATF adalah prosedur yang harus diikuti oleh suatu negara untuk dapat menjadi anggota penuh FATF. Pengajuan keanggotaan Indonesia pada FATF dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang didorong antara lain oleh kondisi Indonesia sebagai satu-satunya

anggota G20 yang belum menjadi anggota FATF.

Salah satu agenda penting MER FATF pada triwulan III-2019 adalah pelaksanaan FATF Indonesia *Country Training – Pre Mutual Evaluation Workshop* yang bertujuan untuk membahas metodologi penilaian MER yang terdiri dari *technical compliance* dan *effectiveness assessment*, serta melakukan *mock-up interview*. Narasumber pada kegiatan ini adalah perwakilan FATF *Secretariat* yaitu David Lewis – FATF *Executive Secretary*, Ashish Kumar dan Ailsa Hart, serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga yang berperan dalam rezim APU PPT di Indonesia.

OJK, sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur terbesar di rezim APU PPT Indonesia, memanfaatkan kegiatan FATF *Country Training* tersebut secara maksimal untuk menggali informasi dan menyusun strategi menghadapi MER FATF, serta memberikan impresi yang baik kepada perwakilan FATF *Secretariat* tentang kesiapan OJK khususnya saat *mock-up interview*. Sebelum pelaksanaan FATF *Country Training* tersebut, OJK bersama dengan tim *technical assistance* dari International Monetary Fund (IMF) telah

terlebih dahulu melakukan *mock-up interview* yang bertujuan untuk memberikan pengalaman dan mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan saat pelaksanaan *interview* pada *on-site visit* yang sebenarnya.

Selanjutnya, selama triwulan III-2019, upaya persiapan MER FATF yang dilakukan oleh OJK difokuskan pada penyusunan jawaban atas kuesioner efektivitas implementasi rekomendasi FATF (kuesioner *Immediate Outcomes/IO*) yang relevan dengan tugas dan fungsi OJK yaitu: (a) IO2 – *International Cooperation*; (b) IO3 – *Supervision*; (c) IO4 – *Preventive Measures*; (d) IO5 – *Legal Persons and Arrangements*; (e) IO7 – *Investigations*; (f) IO10 – *Terrorist Financing*; dan (g) IO11 – *Proliferation of Weapon Mass Destruction*. Dalam menyusun jawaban kuesioner IO tersebut, OJK melibatkan dan melakukan koordinasi aktif dengan internal OJK dan juga eksternal OJK (Kementerian/Lembaga dan perwakilan Penyedia Jasa Keuangan (PJK)).

Dengan berbagai upaya intensif di atas, OJK telah menyampaikan jawaban atas kuesioner IO tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selaku koordinator nasional persiapan MER FATF. Selanjutnya, terhadap jawaban kuesioner IO dari masing-masing Kementerian/Lembaga akan dikonsolidasikan oleh PPATK menjadi jawaban nasional dan direncanakan disampaikan kepadatim assessor MER FATF pada akhir bulan Oktober 2019.

Selain itu, OJK turut berpartisipasi dalam *training* persiapan menjadi assessor yang diselenggarakan oleh FATF dan *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kewajiban Indonesia, sebagai anggota APG dan nantinya sebagai anggota FATF, untuk menjadi bagian dari tim assessor yang menilai kepatuhan rezim APU PPT di negara anggota lainnya.

# Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab VII

# Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada triwulan III-2019, OJK telah menerima 7.090 permintaan layanan terkait dengan sektor Perbankan, terdiri dari 84,72% pertanyaan; 14,50% informasi; dan 0,78% pengaduan. OJK juga senantiasa meningkatkan literasi dan edukasi konsumen antara lain melalui program Laku Pandai, Simpel, SiMUDA serta Bulan Inklusi Keuangan.

### A. Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK).

Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, menyediakan pelayanan pengaduan terkait permasalahan LJK, melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK, dan bahkan meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.

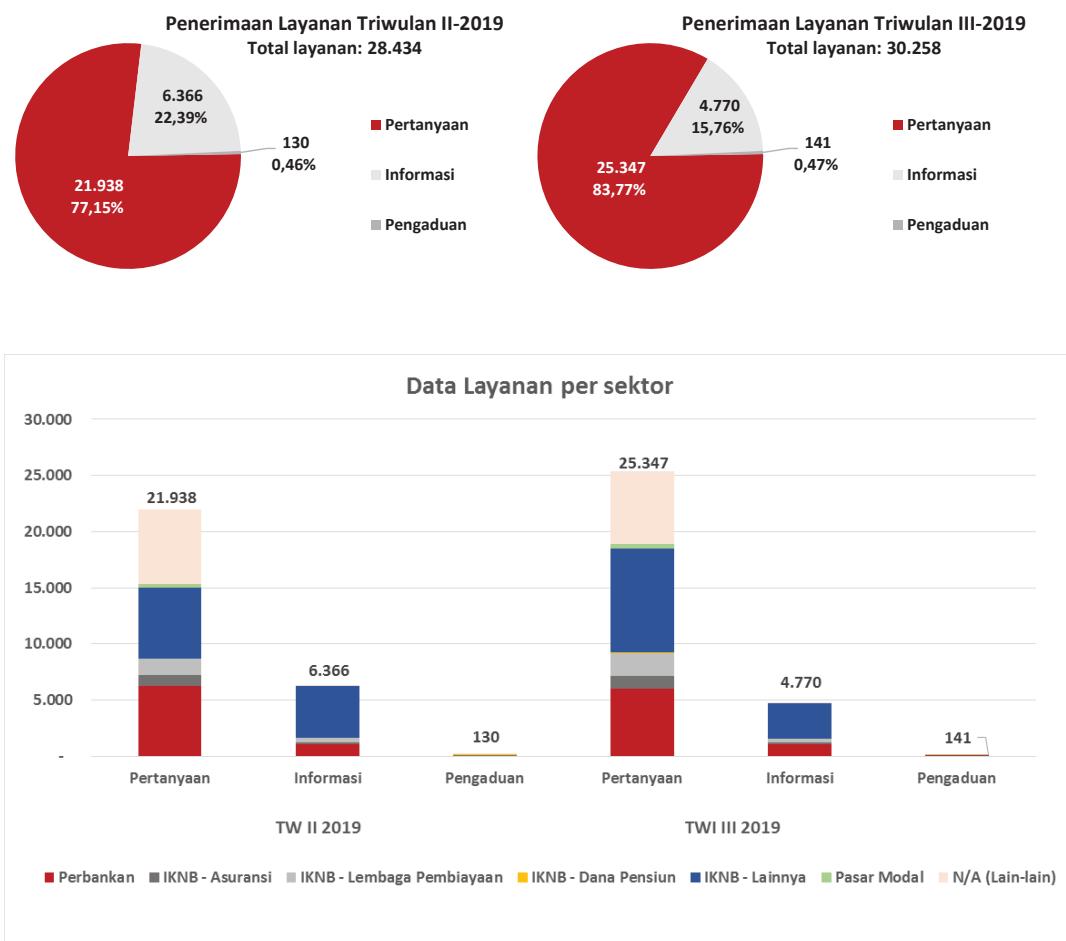
Agar terdapat standarisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, dan antisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diterbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

#### 1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan 3 (tiga) layanan utama, yaitu Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan), Layanan Penerimaan Informasi (laporan), dan Layanan Pengaduan (terkait hal dengan indikasi sengketa dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)). Pada triwulan III-2019, Layanan Konsumen OJK menerima 30.258 layanan yang terdiri dari 25.347 pertanyaan, 4.770 informasi, dan 141 pengaduan. Jumlah tersebut meningkat 6,41% (1.824 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

**Grafik 45 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan**



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

**Tabel 37 Total Layanan Per Sektor**

Sektor	TW II 2019	TW III 2019	qtq	Porsi
<b>Perbankan</b>	<b>7.371</b>	<b>7.090</b>	<b>-3,81%</b>	<b>23,43%</b>
<b>IKNB</b>	<b>13.999</b>	<b>16.192</b>	<b>15,67%</b>	<b>53,51%</b>
Asuransi	1.112	1.399	25,81%	4,62%
Lembaga Pembiayaan	1.938	2.393	23,48%	7,91%
Dana Pensiun	34	71	108,82%	0,23%
Lainnya	10.915	12.329	12,95%	40,75%
<b>Pasar Modal</b>	<b>343</b>	<b>436</b>	<b>27,11%</b>	<b>1,44%</b>
Lainnya	6.721	6.540	-2,69%	21,61%
<b>Total</b>	<b>28.434</b>	<b>30.258</b>	<b>6,41%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Berdasarkan sektoral, 30.258 layanan tersebut terdiri dari 7.090 layanan (23,43%) terkait Perbankan, 16.192 layanan (53,51%) terkait IKNB, 436 layanan (1,44%) terkait Pasar Modal, dan 6.540 layanan (21,61%) terkait hal lainnya. Selanjutnya pembahasan difokuskan pada sektor perbankan.

### 1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan

Dari 7.090 layanan Sektor Perbankan, 84,72% (6.007 layanan) merupakan pertanyaan, 14,50% (1.028 layanan) informasi, dan 0,78% (55 layanan) pengaduan. Pada triwulan III-2019, penerimaan layanan sektor perbankan menurun 3,81% (281 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

**Tabel 38 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan**

Layanan	TW II 2019	TW III 2019	qtq	Porsi
Pertanyaan	6.281	6.007	-4,36%	84,72%
Informasi	1.046	1.028	-1,72%	14,50%
Pengaduan	44	55	25,00%	0,78%
<b>Total</b>	<b>7.371</b>	<b>7.090</b>	<b>-3,81%</b>	<b>100%</b>

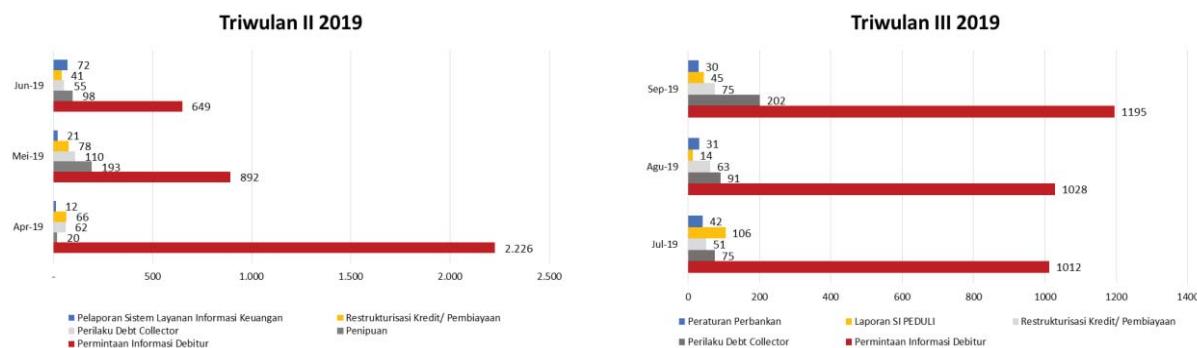
Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

#### 1.1.1 Layanan Pertanyaan

Layanan Konsumen OJK menerima 6.007 pertanyaan terkait sektor perbankan (23,70% dari total sebanyak 25.347 pertanyaan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini turun 4,36% (274 layanan). Layanan Pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan III-2019 adalah terkait permintaan informasi debitur sebesar 53,85% (3.235 layanan) dan terkait perilaku *debt collector* sebesar 6,13% (368 layanan). Sebagian besar layanan pertanyaan terkait permohonan informasi

debitur (IDEB) yaitu menanyakan dan pengecekan status kredit di suatu PUJK sebagai persyaratan dalam mengajukan kredit baru. Sementara itu, terkait permasalahan perilaku *debt collector*, umumnya Konsumen menyampaikan keluhan mengenai perilaku penagihan yang tidak kooperatif seperti menggunakan kekerasan dan ancaman, menghubungi tengah malam, meneror kerabat, penyebaran data, dan memermalukan melalui sosial media.

**Grafik 46 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan**



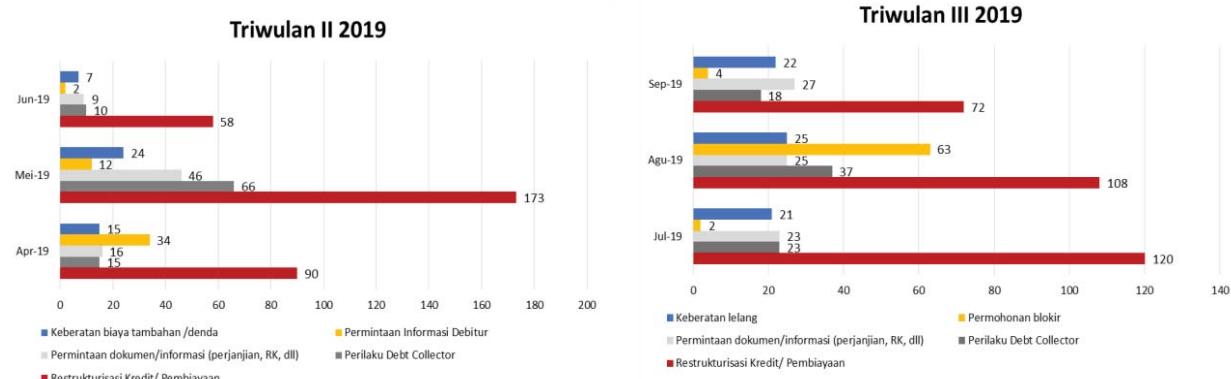
Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

### 1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi

Layanan informasi terkait perbankan pada periode laporan berjumlah 1.028 layanan (21,55% dari seluruh layanan informasi). Jumlah layanan informasi perbankan menurun 1,72% dari triwulan II-2019.

Layanan Informasi yang paling banyak adalah terkait restrukturisasi kredit/pembiayaan (29,18% - 300 Layanan) dan perilaku *debt collector* (7,59% - 78 Layanan).

**Grafik 47 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan**



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

### 1.1.3 Layanan Pengaduan

Pada triwulan III-2019, terdapat 55 pengaduan yang diterima terkait perbankan dengan beberapa permasalahan terbanyak yakni permasalahan sanggahan transaksi dan keberatan atas tagihan. Layanan pengaduan meningkat 11 pengaduan (25%) dari triwulan II-2019.

Selain itu, terdapat 55 indikasi pengaduan terkait sektor perbankan yang diterima pada triwulan III-2019. Indikasi Pengaduan tersebut paling banyak terkait dengan pelaporan Sistem Informasi Debitur sebesar 23,64% (13 layanan).

Secara akumulatif, dari 2013 sampai dengan triwulan III-2019, terdapat 4.389 pengaduan yang diterima oleh Layanan Konsumen OJK

dengan pengaduan terkait sektor perbankan sebanyak 2.289 pengaduan atau 52,15% dari total pengaduan yang diterima. Dari total pengaduan perbankan tersebut, 97,90% (2.241 pengaduan) telah diselesaikan.

## **2. Asistensi Layanan Konsumen OJK**

Sepanjang triwulan III-2019, OJK melakukan 4 kali kegiatan asistensi dan sosialisasi perlindungan konsumen sektor jasa Keuangan.

Pelaksanaan kegiatan asistensi bertujuan untuk mensosialisasikan ketentuan penanganan Layanan Konsumen OJK, meningkatkan kemampuan penanganan dan penyelesaian pengaduan bagi pegawai OJK di Kantor Regional maupun Kantor OJK, mendukung percepatan penanganan pengaduan, meningkatkan pemahaman tentang tata cara penggunaan Sistem Layanan Konsumen OJK/CRM, serta pemahaman penyelesaian sengketa konsumen melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Sementara itu, kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada PUJK mengenai pentingnya aspek perlindungan konsumen bagi industri jasa keuangan, mensosialisasikan ketentuan perlindungan konsumen OJK, mensosialisasikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta mensosialisasikan konsep pengawasan *market conduct* yang dilakukan oleh OJK dalam rangka pengawasan terhadap perilaku PUJK.

Beberapa hal yang menjadi *concern* OJK untuk dipaparkan kepada peserta kegiatan sosialisasi yaitu berkaitan dengan kepatuhan PUJK dalam menyusun perjanjian baku yang

tidak bertentangan dengan ketentuan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta *Service Level Agreement* (SLA) dalam rangka penanganan pengaduan pada tahap *Internal Dispute Resolution* (IDR).

## **3. Forum Group Discussion (FGD) Penegakan Kepatuhan PUJK dalam Pemberian Informasi dan/atau Dokumen terkait Pengaduan Konsumen**

Pada triwulan III-2019, OJK melaksanakan FGD Penegakan Kepatuhan PUJK dalam Pemberian Informasi dan/atau Dokumen terkait Pengaduan Konsumen. Kegiatan dihadiri oleh 31 (tiga puluh satu) perwakilan PUJK dari sektor Perbankan dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Kegiatan dimaksud bertujuan untuk memberikan pemaparan terkait urgensi penyelesaian pengaduan dan kewajiban PUJK dalam memberikan informasi dan/atau dokumen terkait pengaduan kepada OJK, serta upaya untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan PUJK dalam menyampaikan hal tersebut. Pada kegiatan FGD dimaksud, juga dijelaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

## **4. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen**

Pada periode laporan, OJK telah memulai persiapan pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi (LAPST). Pembentukan LAPST merupakan kebijakan OJK yang tertuang dalam *roadmap* 2018-2022 dalam mendorong penyelesaian

sengketa di luar pengadilan oleh satu lembaga, yang saat ini dilaksanakan oleh 6 (enam) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) terdaftar di OJK. Tujuan dibentuknya LAPST adalah untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa melalui satu LAPS serta mengefektifkan akses konsumen di seluruh wilayah Indonesia dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Persiapan dimulai dari *knowledge sharing* dengan ahli dan praktisi serta pembahasan dengan asosiasi sektor jasa keuangan. Pembahasan mencakup rancangan anggaran dasar, bentuk hukum, struktur organisasi, pendanaan, sumber daya manusia, remunerasi, dan peraturan LAPST. Hasil pembahasan antara lain menyepakati masa transisi pembentukan LAPST dan format struktur yang mengakomodasi keseluruhan LAPS yang terdaftar di OJK.

Selain itu dalam rangka aksesibilitas, OJK berkolaborasi dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan PUJK melalui sosialisasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

## 5. Pemeriksaan *Market Conduct*

Dalam kerangka penegakan disiplin pelaku pasar, OJK melaksanakan Pemeriksaan *Market Conduct* terhadap sampel Bank Umum, Bank Umum Syariah, maupun Bank Pembangunan Daerah dengan tema Perjanjian Baku. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepaklik oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk

dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.

Tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan kebijakan penyusunan perjanjian baku, implementasi perjanjian baku, evaluasi perjanjian baku, baik dari sisi format maupun konten klausula memenuhi prinsip keadilan, kewajaran, dan keseimbangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Hingga triwulan III-2019, OJK melaksanakan pemeriksaan *market conduct* terhadap 10 sampel PUJK yang terdiri dari 3 Bank Umum, 1 Bank Umum Syariah, 4 Bank Pembangunan Daerah, dan 2 Perusahaan Pembiayaan. Pemeriksaan *market conduct* dilaksanakan bersama dengan jadwal pemeriksaan oleh Pengawas Prudensial masing-masing sampel. Berdasarkan hasil pemeriksaan, masih ditemukan klausula dalam perjanjian baku yang belum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Terkait hal ini, OJK meminta PUJK untuk melakukan penyesuaian, sehingga klausula perjanjian baku memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, dan kewajaran baik bagi Konsumen maupun PUJK.

Hasil pemeriksaan *market conduct* diharapkan dapat menjadi pelengkap, sehingga PUJK tidak hanya kuat dari sisi bisnis, tapi juga menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Hal ini dimaksudkan agar tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia semakin meningkat.

## **6. Pemantauan Iklan Triwulan**

Melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI), OJK memantau iklan dan penawaran produk dan layanan jasa keuangan. Monitoring harian yang dilaporkan secara triwulan ini mencakup iklan yang dipublikasikan melalui media cetak nasional dan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sepanjang periode pelaporan, terdapat 73 iklan PUJK. Dari seluruh iklan tersebut, ditemukan 48% (35 iklan) melanggar ketentuan yang tertuang dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan, serta masih belum menyesuaikan tuntunan dalam Pedoman Iklan Jasa Keuangan. Jumlah pelanggaran tersebut menurun dibandingkan dengan triwulan II-2019 yaitu sebesar 56% iklan melanggar.

Kategori yang paling banyak dilanggar berturut-turut adalah tidak jelas, tidak akurat dan menyesatkan. Kategori pelanggaran Tidak Jelas meningkat pesat disebabkan oleh banyaknya iklan Tidak Langsung oleh *merchant* yang mempromosikan produk dan/atau layanan multi-PUJK. Iklan Tidak Langsung biasanya tidak mencantumkan pernyataan bahwa PUJK yang bekerja sama terdaftar dan

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Meski tidak langsung dipublikasikan oleh PUJK, Iklan Tidak Langsung tetap harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hasil pemantauan ini, sepanjang triwulan III-2019 OJK telah mengirimkan 24 Surat Pembinaan kepada PUJK yang melakukan pelanggaran iklan.

## **B. Literasi dan Inklusi Keuangan**

### **1. Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)**

Pada triwulan III-2019, terdapat 31 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan triwulan III-2019 mencapai 1.146.131 agen yang tersebar di 34 Provinsi dan 511 Kota/Kabupaten. Jumlah nasabah tabungan berkarakteristik *basic saving account* (BSA) juga bertambah menjadi sebanyak 25.777.824 nasabah, dengan dana yang dihimpun mencapai Rp2,22 triliun.

Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, agen Laku Pandai juga dapat berlaku sebagai agen penyalur Bantuan Sosial Non Tunai dan sarana pembayaran zakat untuk mendukung program Inklusi Zakat/zakat inclusion.

**Tabel 39 Realisasi Laku Pandai Triwulan III-2019**

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
<b>1.116.747</b>	<b>29.384</b>
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Nasabah	<i>Outstanding</i> Tabungan BSA
<b>25.777.824</b>	<b>Rp2,22 Triliun</b>

Sumber: OJK

## 2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang ditujukan bagi pelajar sejak PAUD hingga SMA ini diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2015 dan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Sampai dengan triwulan III-2019, program ini telah diikuti oleh 351 bank (21 Bank Umum, 10 Bank Umum Syariah, 26 BPD dan 294 BPR/BPRS) bekerjasama dengan 347.447 sekolah. Pada periode laporan, jumlah rekening yang mengikuti program SimPel mencapai sebanyak 21.584.281 rekening dengan nominal Rp8,76 triliun.

## 3. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA)

SiMUDA adalah program tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia. Skema produk tersebut antara lain SiMuda InvestasiKu, SiMuda RumahKu, dan SiMuda EmasKu. Sampai dengan triwulan III-2019, rekening SiMuda tercatat sebanyak 15.452 rekening dengan nominal sebesar Rp25,8 miliar dengan rincian sebagai berikut:

- SiMuda InvestasiKu: 56 rekening dengan nominal Rp35.259.962
- SiMuda RumahKu: 15.384 rekening dengan nominal Rp25.794.412.026
- SiMuda EmasKu: 12 rekening dengan nominal Rp17.624.466

Dalam rangka meningkatkan *awareness* masyarakat khususnya kelompok pemuda dan mahasiswa, OJK bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan bank peserta program tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) menyelenggarakan kegiatan "Aksi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Menabung (AKSiMUDA) 2019. Dalam kegiatan ini, juga dilakukan kegiatan terkait program literasi dan inklusi keuangan antara lain: (i) *relaunching* Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat Perguruan Tinggi cetakan tahun 2016; (ii) peluncuran Strategi Inklusi Keuangan Pemuda (*Youth Financial Inclusion Strategy/YFIS*); (iii) pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah Kompetisi Inklusi Keuangan 2019; dan (iv) penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemenpora dan Sekretariat DNKI tentang Pelayanan Kepemudaan Melalui Strategi Keuangan Inklusif.

## 4. Bulan Inklusi Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), telah ditetapkan target keuangan inklusif yaitu sebesar 75% pada akhir tahun 2019 atau setara dengan 145 juta penduduk dewasa yang memiliki akses kepada lembaga keuangan formal. Dengan demikian, dibutuhkan sekitar 50 juta rekening baru sampai dengan akhir tahun 2019 untuk mencapai target tersebut. Sejalan dengan Perpres SNKI dan untuk mendorong budaya

menabung di Indonesia, pada tanggal 20 Agustus 2019, telah dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung (HIM). Sejak tahun 2016, OJK bersama dengan kementerian/lembaga terkait dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah menginisiasi Bulan Oktober sebagai "Bulan Inklusi Keuangan".

Sebagai bentuk dukungan LJK dalam pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan, LJK dari berbagai industri (perbankan, perasuransian, pasar modal, pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, dan fintech) menginisiasi kegiatan Puncak Bulan Inklusi Keuangan melalui penyelenggaraan *FinEXPO and Sundown Run* sejak tahun 2018. Pada tahun ini, kegiatan tersebut diikuti oleh 86 LJK dengan dukungan penuh dari OJK dan Bank Indonesia (BI).

Dalam kegiatan ini OJK, BI dan LPS juga melaksanakan pencanangan "Sinergi Aksi Indonesia Menabung" yang merupakan salah satu implementasi dari diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung yang diperlakukan setiap tanggal 20 Agustus. Sinergi aksi ini juga melibatkan LJK dalam meningkatkan kedaulatan masyarakat tentang pentingnya menabung untuk investasi, perlindungan dan masa depan.

Selama kegiatan *FinEXPO and Sundown Run* 2019 ini, 86 LJK yang berpartisipasi telah melakukan penjualan produk dan/atau jasa keuangan berinsentif dengan berbagai promo khusus serta tawaran yang menarik hanya di bulan Oktober, dengan memberikan berbagai *discount*, bonus, *cash back* dan *reward* untuk konsumen dalam rangka membuka akses keuangan bagi masyarakat.

Berdasarkan data rekapitulasi dari LJK yang berpartisipasi selama berlangsungnya kegiatan *FinEXPO and Sundown Run* 2019, tercatat jumlah nominal pembukaan rekening baru dan transaksi telah mencapai hingga Rp100 miliar dengan jumlah pembukaan rekening baru dan transaksi sebanyak 23.843 rekening.

Dengan adanya kegiatan ini sebagai agenda nasional yang dilakukan secara berkesinambungan pada bulan Oktober setiap tahunnya, diharapkan akan semakin memperkuat komitmen dan dukungan dari seluruh *stakeholders* dalam rangka implementasi Perpres tentang SNKI dan Keppres tentang HIM. Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang positif khususnya dalam pemenuhan dan peningkatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta pencapaian target indeks inklusi keuangan sebesar 75% pada akhir tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam SNKI.

Halaman ini sengaja dikosongkan

# Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

**LAMPIRAN I****Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko**

No.	Nama	Rumus
<b>Indikator Kinerja Perbankan</b>		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
<b>Risiko Kredit</b>		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL)</i> atau <i>Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL)</i> atau <i>Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
<b>Risiko Pasar</b>		
9.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
10.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
<b>Risiko Likuiditas</b>		
11.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
12.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
15.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

**LAMPIRAN II****Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan III-2019**

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
1	POJK Nomor 20/POJK. 03/2019	Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	2 September 2019	Perkembangan kondisi BPRS yang bersifat dinamis mendorong sistem penilaian Tingkat Kesehatan BPRS yang dinamis pula sehingga perlu diatur tersendiri agar dapat memberikan gambaran tentang kondisi saat ini dan pada waktu mendatang termasuk dalam penerapan Prinsip Syariah.	<p>a. Direksi dan Dewan Komisaris BPRS wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi tingkat kesehatan BPRS.</p> <p>b. OJK melakukan penilaian tingkat kesehatan BPRS, mencakup penilaian terhadap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen.</p> <p>c. Penilaian atas faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas dihitung secara kuantitatif dan diberi peringkat 1 s.d 5.</p> <p>d. Penilaian atas faktor manajemen dilakukan secara kualitatif dan diberi peringkat A s.d D.</p> <p>e. BPRS wajib melakukan penghitungan rasio keuangan yang terkait dengan penilaian Tingkat Kesehatan BPRS secara triwulan.</p>	POJK Nomor 20/POJK. 03/2019
2	POJK Nomor 21/POJK. 03/2019	Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	11 September 2019	Dalam rangka memperkuat ketahanan dan daya saing industri BPR dan BPRS antara lain melalui Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, diperlukan ketentuan yang menjadi dasar mekanisme dan tata cara pelaksanaan yang dapat dilakukan oleh BPR maupun BPRS.	<p>a. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BPR atau BPRS dapat dilakukan atas inisiatif BPR atau BPRS atau perintah OJK, dengan tetap wajib memperoleh izin dari OJK.</p> <p>b. Penggabungan atau peleburan dapat dilakukan antara BPR dengan BPR dengan BPRS, atau BPRS dengan BPRS. BPR hanya dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPRS dalam hal BPR hasil penggabungan atau peleburan menjadi BPRS.</p> <p>c. Mekanisme pelaksanaan penggabungan atau</p>	POJK Nomor 21/POJK. 03/2019

No.	No. POJK/ SEOJK	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
				<p>peleburan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyampaian dokumen berupa rancangan dan konsep akta oleh BPR/S;</li> <li>2) penelaahan dokumen persiapan pelaksanaan penggabungan atau peleburan oleh OJK, berupa kelengkapan dan kebenaran dokumen, kondisi keuangan, penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama dan penelitian calon pemegang saham, pemeriksaan setoran modal, dan penelitian kesiapannya teknologi informasi;</li> <li>3) tindak lanjut oleh BPR/S, berupa pengumuman ringkasan rancangan akta, pengajuan keberatan dari kreditur, pengajuan hak pemegang saham, pelaksanaan RUPS, dan akta penggabungan atau peleburan;</li> <li>4) pemberian persetujuan atau penolakan oleh OJK didasarkan pada penelitian terhadap berita acara RUPS, akta penggabungan atau peleburan, bukti pengumuman, dan laporan kinerja BPR/S terkini;</li> <li>5) pengajuan persetujuan atau pemberitahuan penggabungan atau peleburan kepada instansi yang berwenang; dan</li> <li>6) kewajiban penyampaian dokumen oleh BPR/S setelah mendapatkan izin penggabungan atau peleburan, berupa neraca penutupan, neraca pembukaan, dan laporan pelaksanaan penggabungan</li> </ol>	

No.	No. POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
				<p>atau peleburan.</p> <p>d. Kriteria pengambilahan BPR/S yang mengakibatkan beralihnya pengendalian adalah apabila kepemilikan saham memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menjadi pemegang saham dengan kepemilikan saham terbesar pada BPR/S; atau</li> <li>2) kepemilikan saham tidak melebihi pemegang saham terbesar namun menentukan baik langsung atau tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijakan BPR/S.</li> </ol> <p>e. Mekanisme pelaksanaan pengambilahan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyampaian dokumen berupa rancangan dan konsep akta pengambilahan oleh BPR/S;</li> <li>2) penelaahan dokumen persiapan pelaksanaan pengambilahan oleh OJK, berupa kelengkapan dan kebenaran dokumen serta sumber dana yang digunakan untuk mengambil alih BPR/S;</li> <li>3) tindak lanjut oleh BPR/S, berupa pengumuman ringkasan rancangan akta, pengajuan keberatan dari kreditur, pengajuan hak pemegang saham, dan pelaksanaan RUPS;</li> <li>4) pemberian persetujuan atau penolakan oleh OJK yang didasarkan pada penelaahan atas kelengkapan dokumen dan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang melakukan</li> </ol>		

No.	No. POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>pengambilalihan;</p> <p>5) tindak lanjut oleh BPR/S berupa penuangan rancangan pengambilalihan ke dalam akta pengambilalihan;</p> <p>6) pengajuan persetujuan atau pemberitahuan terhadap perubahan anggaran dasar kepada instansi yang berwenang; dan</p> <p>7) kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan pengambilalihan oleh BPR/S setelah mendapatkan izin pengambilalihan.</p> <p>f. Dalam kondisi tertentu OJK dapat memerintahkan BPR/S untuk melakukan pengabungan, peleburan, atau pengambilalihan.</p>	<p>SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK, serta harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku antara lain POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang KAP dan PPAP BPR.</p>
3	SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2019	Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat	29 Agustus 2019	Perubahan SEOJK sehubungan dengan telah ditetapkannya POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK, serta harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku antara lain POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang KAP dan PPAP BPR.	<p>a. Perubahan yang cukup mendasar dari SEOJK ini yaitu terkait format dan pedoman pengisian Laporan Keuangan Publikasi BPR yang merupakan Lampiran dari SEOJK.</p> <p>b. Penyusunan Laporan Keuangan Publikasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja BPR melalui penyampaian informasi mengenai laporan keuangan, informasi lainnya, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan komposisi pemegang saham termasuk <i>ultimate shareholders</i> secara triwulan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha BPR.</p> <p>c. Terdapat 5 (lima) jenis laporan yang menjadi cakupan Laporan Keuangan Publikasi dengan</p>	<p>SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2019</p>

No.	No. POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>beberapa penyesuaian format sejalan dengan Laporan Bulanan BPR, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Format Laporan Posisi Keuangan;</li> <li>2) Format Laporan Laba Rugi;</li> <li>3) Format Laporan Kualitas Aset Produktif;</li> <li>4) Format Laporan Komitmen dan Kontinjenji; dan</li> <li>5) Format Laporan Informasi Lainnya.</li> </ol> <p>d. SEOJK ini juga menghapus kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Publikasi melalui rekaman data beserta sanksinya, dikarenakan BPR menyampaikan data dan informasi dalam Laporan Keuangan Publikasi secara daring sebagai bagian dari laporan bulanan BPR sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK, sehingga BPR tidak wajib menyampaikan rekaman data Laporan Keuangan Publikasi secara terpisah kepada OJK.</p>	

**LAMPIRAN III****GLOSSARY**

<b>Istilah</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Aktivitas Bank</b>	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
<b>AL/DPK</b>	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = <i>Final Excess Reserve + Kas + Penempatan pada BI lainnya + Reserve Repo</i> ) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold AL/DPK &gt;10%</i> .
<b>AL/NCD</b>	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold AL/NCD &gt;50%</i> .
<b>Anti Money Laundering (AML)</b> atau <b>Anti Penurunan Uang (APU)</b>	Suatu rezim yang mencegah dan membasi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
<b>Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)</b>	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATM R Kredit, ATM R Operasional, dan ATM R Pasar.
<b>B</b>	
<b>Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)</b>	Pengelompokkan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki, yaitu: (i) BUKU 1 = modal inti kurang dari Rp1 triliun; (ii) BUKU 2 = modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun; (iii) BUKU 3 = modal inti Rp5 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun; (iv) BUKU 4 = modal inti diatas Rp30 triliun (POJK No.6/POJK.03/2016)
<b>Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)</b>	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
<b>C</b>	
<b>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)</b>	Penyiangan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai, kurang dari nilai tercatat awal.
<b>Capital Adequacy Ratio (CAR)</b>	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan $(\text{modal}/\text{ATMR}) \times 100\%$ , dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS ( <i>Bank for International Settlements</i> ) sebesar minimal 8%.
<b>Current Account and Saving Account (CASA)</b>	Sumber dana jangka pendek dengan biaya yang relatif murah. Merupakan proporsi tabungan dan giro terhadap total DPK.
<b>Cash Ratio (CR)</b>	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Pemetaan Status dan

Istilah	Keterangan
<i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Concentration Ratio</i>	Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Countering Financing Terrorism (CFT) atau Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)</i>	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total asset.  Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
<b>D</b>	
<i>Dana Pihak Ketiga (DPK)</i>	Dana yang diperoleh dari masyarakat dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
<i>Debitur Inti</i>	Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup ( <i>one obligor concept</i> ) diluar pihak terkait sesuai total asset bank, yaitu sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> <li>Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup</li> <li>Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup</li> <li>Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup</li> </ol> (SEBI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum)
<i>Deposito</i>	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
<b>F</b>	
<i>Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan/Fit and Proper Test (FPT New Entry)</i>	Proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh OJK terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsiya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank).
<i>Fraud</i>	Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi.
<b>G</b>	

Istilah	Keterangan
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
Good Corporate Governance (GCG)	Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya.
<b>I</b>	
Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib).
Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
<b>K</b>	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMMM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan belum cukup. (Permenko No.11 Tahun 2017)
<b>L</b>	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Layanan Informasi	Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produksinya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Istilah	Keterangan
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun Local entity (Non KCBA) (POJK Nomor 42/POJK/03/2015)
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
<b>M</b>	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama ( <i>Common Equity Tier 1</i> ) dan modal inti tambahan ( <i>Additional Tier 1</i> ). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengeluaran untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
<b>N</b>	
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Non Performing Loan/Finance (NPL)</i> atau (NPF), Kredit/Pembayaran Bermasalah	Kredit/pembayaran yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
<b>P</b>	
Pejabat Eksekutif	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional bank.
<i>Pembayaan Istishna'</i>	Pembayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)

Istilah	Keterangan
Pembentukan Mudharabah	Pembentukan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lahal, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembentukan Murabahah	Pembentukan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembentukan Musyarakah	Pembentukan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembentukan Qardh	Pembentukan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengandung di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar, (2) seluruh transaksi antar Bank, dan (3) seluruh pinjaman ( <i>borrowing</i> ) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih berih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih berih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjenji dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK)	Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

Istilah	Keterangan
Rencana Bisnis Bank (RBB)	<b>R</b> Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk mewujudkan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset (ROA)</i>	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portfolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi asset maupun kewajiban.
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
<b>T</b>	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Tagihan Derivatif	Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian transaksi derivatif yang merupakan selisih positif antara nilai perjanjian dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>The Fed (Federal Reserve)</i>	Bank Sentral Amerika Serikat
<i>Transaksi Forward</i>	Transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi swap adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka ( <i>forward</i> ) yang dilakukan secara simultan, dengan <i>counterparty</i> yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).

Istilah	Keterangan
<i>Undisbursed loan</i>	<b>U</b> Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. <i>Undisbursed loan</i> terbagi dua, (1) <i>committed</i> yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) <i>uncommitted</i> yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.
<i>Wadiah</i>	<b>W</b> Perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).





